

PROFIL PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Sanksi Pelanggaran Pasal 27

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa yang melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (1) bulan dan/atau denda yang paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran. Hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Profil Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Nusa Tenggara Timur
2021**

Profil Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur

Reviewer: M. Joni Yulianto

Proof reader: Sunarman Sukamto, Dr. David Pandie

Editor dan Penyelarar Akhir: Dr. Ishak Salim

Olah Visual Cover: Yafas Aguson Lay

Olah Visual Isi: Supratman

Tim Penyusun Profil Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021

1. Dinna Novista Noach, S.I.Kom, Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Disabilitas
2. Kosmas D Lana, SH., M.Si, Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
3. Esron M. Elim, SE., M.Si, Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Bappelitbangda Nusa Tenggara Timur
4. Theresia M. Sri Sarinah Lendes, SE., Kasubid Kesos dan Budaya pada Bappelitbangda Nusa Tenggara Timur
5. Maria Margareta S Nduru, S.Sos, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Berti Soli Dima Malingara, SE., MDPP, Koordinator Riset pada Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) NTT
7. Elmi Sumarni Ismau, A.Md, Wakil Direktur pada Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) NTT
8. I Made Astika Dhana, A.Md, Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Kota Kupang
9. Charles C Rambung, Apt, MIPH, MHM pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Ansgarius Wahana Mau pada Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

11. Adelheid Ese Paji Sabon. S.IP pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Fransisca Th. Bakker, S.Ip pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
13. Rahmi Fausia, A.Md pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. I Made Dwi Payana, S.Pt pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kontributor Profil Organisasi Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Yafas Aguson Lay (Direktur GARAMIN NTT)
2. Rina Astuti (Sekretaris PHDF)
3. Margaretha Helena (Pendiri FORSADIKAI)
4. Paulus Manek (Ketua PERMATA Indonesia)
5. Roberth Oktavianus Riwu (Ketua PERTUNI Cabang Sumba Timur)
6. Anselmus G Kartono (Sekretaris DPC PERTUNI Manggarai Barat)
7. Petronela Sau Naikofi (Ketua YTTM)
8. Sabinus Ngadu, S.Pd (Ketua DPC PERTUNI Manggarai)
9. I Made Astika Dhana (Sekretaris PERTUNI Cabang Kota Kupang)
10. Maria Yasinta Danu Atok (Ketua PERSAMA)
11. Imanuel Nuban (Ketua KIPDA Timor Tengah Selatan)
12. Maria Elisabeth Tunga Toa (PERTUNI Cabang Ngada)
13. Viktor Haning (Ketua NPC NTT)
14. Mario Lado (Ketua KTK)
15. Serafina Bete (Ketua PERSANI NTT)
16. El Asamau (Ketua Yayasan Dola Koya koya)
17. Avent Saur (Pendamping KKI)
18. Silomeno DC Cortereal (Sekretaris KUMPESA Rai Belu)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku profil organisasi penyandang disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur telah hadir di bumi Flobamora tercinta di tengah situasi pandemi yang tak kunjung berakhir. Dalam upaya mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas, penyediaan data penyandang disabilitas melalui organisasi disabilitas yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu hal penting. Ini merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemenuhan, perlindungan, kesetaraan dan pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas di semua sektor kehidupan.

Informasi terkait organisasi penyandang disabilitas masih sangat minim sehingga dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi perangkat daerah belum banyak melibatkan penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan isu disabilitas masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Kurang akuratnya data penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur juga menjadi salah satu tantangan untuk mendorong advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas sekaligus pemberdayaan penyandang disabilitas itu sendiri baik sebagai individu maupun dalam kelompok atau wadah organisasi. Pada bagian satu buku ini, kita akan disuguhkan dengan data penyandang disabilitas secara makro di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Bagian kedua, kita akan masuk lebih dalam lagi dengan mengenal 18 organisasi penyandang disabilitas lengkap dengan detail sejarah, keanggotaan, kontak person dan potensi yang dimiliki anggota. Mayoritas masih memberikan data umum sehingga ke depan masih bisa diperbaharui lagi.

Selain menyajikan data tersebut, pada bagian tiga buku ini membedah lebih lagi tentang pengalaman, kemitraan dan kerjasama dalam berorganisasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi disabilitas di NTT, juga digambarkan partisipasi organisasi disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dan aksesibilitas terhadap fasilitas publik ramah disabilitas, dokumen perencanaan dan bantuan sosial.

Pada saat pandemi, penyandang disabilitas mengalami kerentanan lebih karena mobilisasi yang kadang masih bergantung dengan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk bisa melihat sejauh mana organisasi beradaptasi dengan pandemi. Bahkan mungkin organisasi penyandang disabilitas juga bertahan dan berkontribusi bagi masyarakat baik umum maupun sesama penyandang disabilitas untuk terus berjuang mendapatkan hak-haknya di berbagai bidang. Pada bagian empat cerita tentang inovasi saat Covid-19 akan terpotret dengan jelas.

Buku ini lahir dari kreativitas dan semangat inklusi yang dibangun dalam tim penyusun yang solid yang majemuk yang terus berupaya untuk bisa memberikan kontribusi saat pandemi Covid-19. Ada harapan yang besar dari tim penyusun agar ke depan buku ini bisa

bermanfaat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang inklusi yang tidak melupakan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan kesepakatan Tujuan Pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainability Development Goals (SDGS)* serta berpegang pada asas *No one left behind*. Semoga buku ini bisa memberikan harapan bagi organisasi penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas, organisasi perangkat daerah, legislative maupun semua stakeholder yang ingin mengambil bagian dalam mendukung Nusa Tenggara Timur inklusi ke depan.

Akhirnya penyusun menyampaikan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penyusun, para contributor dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Sekali lagi, semoga buku ini merupakan symbol gerakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas untuk terus mewujudkan Nusa Tenggara Timur Inklusi menuju Indonesia yang inklusi.

Kupang, 20 Desember 2021
Atas nama Tim Penyusun

Kepala Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kosmas D. Lana, SH, MSi
Pembina Utama Madya
NIP.19650927 199011 004

KATA PENGANTAR

Sunarman Sukamto

*Tenaga Ahli Madya Kedeputan V Kantor Staf Presiden
Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum,
Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis*

Konstitusi kita menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diriminatif.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan skkebebasan manusia, tanpa diskriminasi. Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih, berkenaan dengan kekhususannya. Bahkan secara eksplisit undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Meskipun konstitusi dan UU tentang HAM menjamin HAM penyandang disabilitas, tetapi selama ini penyandang disabilitas masih banyak mengalami

diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akibat adanya berbagai hambatan dari lingkungan, baik kultural, infrastruktur maupun struktural. Persepsi pemangku kebijakan dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih ditempatkan sebagai individu yang bermasalah secara sosial bahkan dianggap sebagai beban sosial. Dalam persepsi seperti itu, penyandang disabilitas diposisikan sebagai obyek belas kasihan saja.

Bapak Presiden Joko Widodo secara tegas menyampaikan bahwa paradigma negara terhadap penyandang disabilitas sudah bergeser dari paradigma belas kasihan (charity based) menjadi paradigma HAM (human rights based). Dalam perspektif dan pendekatan HAM, problem bukan terletak pada individu dengan disabilitas, melainkan terletak pada bagaimana sistem dan norma masyarakat dalam merespon keberadaan penyandang disabilitas. Sistem dan norma yang sudah menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas disebut sistem dan norma yang inklusif. Paradigma HAM terhadap penyandang disabilitas dan inklusi disabilitas masih perlu diingatkan dan ditingkatkan secara terus menerus.

Gagasan pembangunan inklusif disabilitas telah menjadi arah bagi kerangka kebijakan pemerintah Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Paradigma HAM sebagai perspektif baru menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang hak-hak penyandang disabilitas ditingkat

nasional, antara lain Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta aturan turunannya yaitu ada tujuh Peraturan Pemerintah, dua Peraturan Presiden, dan 3 Peraturan Menteri.

Dari berbagai regulasi tersebut, sudah diturunkan menjadi rencana induk dan rencana aksi, antara lain Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional dan Daerah Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Nasional HAM. Semua regulasi dan rencana aksi ini wajib kita kawal agar terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran.

Terbitnya buku profile organisasi penyandang disabilitas di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini memiliki makna strategis karena akan memberikan beberapa kontribusi dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas. Yang pertama buku ini menunjukkan bahwa kawan-kawan difabel di NTT sudah memiliki kesadaran tentang hak-haknya dan mampu mengorganisir gerakan bersama untuk mendorong dan mewujudkan NTT inklusi disabilitas. Hal ini sangat penting karena inklusi disabilitas tidak akan pernah terjadi jika tidak ada kesadaran, partisipasi dan kontribusi dari kawan-kawan difabel itu sendiri. Yang kedua adalah adanya dukungan dari jajaran pemerintah provinsi NTT dalam menyusun buku ini. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah provinsi NTT mendukung peran dan partisipasi aktif difabel dan organisasi difabel dalam pembangunan NTT. Dukungan dan peran dari pemerintah daerah sangat penting karena untuk mewujudkan hak-hak difabel bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga. Yang ketiga adalah buku ini

menggambarkan visi inklusi yang kuat diantara organisasi difabel di NTT dan mengobarkan semangat untuk berkolaborasi. Yang keempat buku ini bisa menjadi rujukan bagi berbagai pihak untuk mendapatkan informasi dan data penyandang disabilitas yang tergabung dalam berbagai organisasi difabel di NTT. Hal ini sangat penting karena salah satu tantangan pembangunan inklusi disabilitas di pusat dan daerah adalah belum tersedianya data pilah penyandang disabilitas yang valid dan komprehensif.

Buku ini penting untuk bisa diperbaharui setiap saat sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi difabel di NTT. Selamat atas terbitnya buku profile organisasi difabel di NTT ini.

MENGUATNYA AKTOR PERUBAHAN: SEBUAH PENGANTAR

Muhammad Joni Yulianto

*Dewan Pengurus SIGAB Indonesia,
Koordinator Forum Masyarakat Pemantau untuk
Indonesia Inklusi Disabilitas (FORMASI Disabilitas)*

Inkluksi adalah prinsip yang melibatkan rangkaian proses, hasil, dan semua yang tercantum di dalamnya. Ketika difabel / penyandang disabilitas menjadi subyek yang inklusif, maka bersama mereka, jaminan kepastian akan keterlibatan, pengarusutamaan, serta partisipasi yang penuh makna dalam proses maupun penikmatan hasil pembangunan haruslah nyata.

Tersusunnya buku profil organisasi disabilitas di NTT merupakan Bukti bahwa organ pergerakan difabel telah memulai membangun ruang inklusif ini. Mereka, dengan berbagai keterbatasan, tapi energi dan komitmen yang besar, telah menghadirkan banyak karya untuk Kelompok mereka, untuk masyarakat, bahkan untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Membaca profile 18 organisasi ini, yang pasti bisa lebih banyak, tak cukup hanya diakhiri dengan mengapresiasi. Mereka adalah kekuatan masa depan NTT dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dimana tiada satu orang pun yang tertinggal. Mereka adalah bagian dari kekuatan untuk membangun tatanan so-

sial yang lebih adil dan memanusiakan, bukan hanya untuk difabel, melainkan juga masyarakat rentan lainnya. Tetapi, tentunya Peran itu sangat berlebihan. Jika hanya dibebankan ke pundak mereka, tanpa komitmen nyata untuk mendengarkan dan memfasilitasi aspirasinya.

Tak hanya bagi pemerintah dan masyarakat di NTT, buku profil ini juga sangat membantu berbagai pihak di luar NTT yang hendak turut mengembangkan program dan kerjasama dengan organisasi dan pegiat difabel di NTT untuk turut berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih inklusif. Semakin banyaknya aktor masyarakat sipil yang bekerja pada isu Difabel, pada saatnya juga akan turut memperkuat upaya bersama dalam pemantauan kolektif atas pemenuhan hak difabel.

Akhirnya, disampaikan selamat dan terimakasih kepada rekan-rekan Penyusun yang telah memulai inisiatif profil organisasi difabel di NTT ini. Semoga inisiatif ini memberikan lebih banyak manfaat, dan dapat diikuti oleh berbagai daerah lainnya.



SAMBUTAN STAF KHUSUS
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG DISABILITAS

Dinna Novista Noach

Staf Khusus Gubernur NTT bidang Disabilitas

Saya sangat mengapresiasi kehadiran profil organisasi penyandang disabilitas di NTT. Profil ini adalah bukti dukungan pemerintah bagi organisasi penyandang disabilitas yang bergerak bersama pemerintah untuk mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas di area kerja masing-masing. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang sangat kaya dengan keanekaragaman baik suku, bahasa, budaya yang memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung hak-hak kelompok rentan lainnya termasuk penyandang disabilitas. Dukungan kebijakan berupa PERGUB No 68 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang disusul dengan adanya inisiatif Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyusun Peraturan

Daerah Terkait penyandang disabilitas merupakan komitmen yang luar biasa bagi para difabel di NTT.

Tim penyusun buku yang inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa inklusi itu lahir dalam keseharian kita dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas profil ini memberikan pengalaman berharga bagi penyandang disabilitas dalam bermitra dengan pemerintah dan menghasilkan sebuah dokumen yang akan bermanfaat bagi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Saya berharap buku ini akan bisa menjadi ruang untuk terus belajar mengenal organisasi penyandang disabilitas. Kehadiran buku profil ini hendaknya menjadi acuan, sumber informasi dan sarana untuk menjembatani Organisasi penyandang disabilitas dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun stakeholder lainnya yang mendukung terwujudnya Nusa Tenggara Timur Yang inklusif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Deputi V Kantor Staf Presiden	ix
Kata pengantar Koordinator Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi Disabilitas (FORMASI Disabilitas).....	xiii
Sambutan Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas	xv
Daftar Isi	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Dasar Hukum	6
D. Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	8
BAB II PROFIL ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS	18
A. Profil organisasi GARAMIN NTT	24
B. Profil FORSADIKA Maumere	32
C. Profil PERTUNI Kota Kupang	36
D. Profil PHDF	42
E. Profil PERMATA	48
F. Profil YTTM	52
G. Profil Komunitas Tuli Kupang	58
H. Profil PERSANI	62
I. Profil KIPDA TTS	66

J. Profil PERSAMA	70
K. Profil Dola Koyakoya	76
L. Profil PERTUNI Ngada	82
M. Profil PERTUNI Sumba Timur	88
N. Profil PERTUNI Manggarai Barat	94
O. Profil PERTUNI Manggarai	100
P. Profil NPC NTT	106
Q. Profil Yayasan Kita Keluarga Insani	112
R. Profil Kumpesa Rai Belu	116
BAB III PENGALAMAN ORGANISASI	120
A. Pengalaman Organisasi GARAMIN NTT	124
B. Pengalaman Organisasi FORSADIKAMAumere	132
C. Pengalaman Organisasi PERTUNI Kota Kupang	135
D. Pengalaman Organisasi PHDF	137
E. Pengalaman Organisasi PERMATA	140
F. Pengalaman Organisasi YTTM	143
G. Pengalaman Organisasi PERTUNI Sumba Timur	148
H. Pengalaman Organisasi PERTUNI Manggarai Barat	151
I. Pengalaman Organisasi PERTUNI Ngada	153
J. Pengalaman Organisasi PERTUNI Manggarai	154
K. Pengalaman Organisasi PERSAMA	156
L. Pengalaman Organisasi KIPDA TTS	158
M. Pengalaman Organisasi NPC NTT	161
N. Pengalaman Organisasi Komunitas Tuli Kupang	162
O. Pengalaman Organisasi KUMPESA	166
P. Pengalaman Organisasi PERSANI	168

Q. Pengalaman Organisasi Dola Koyakoya .	171
R. Pengalaman Organisasi Yayasan Kita Keluarga Insani	173
BAB IV INOVASI DAN PEMBELAJARAN YANG DIPETIK (LESSON LEARNED) DARI LAKU INOVATIF DALAM KOMUNITAS DAN KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS	180
A. Yayasan Dola Koyakoya (Rumah Asuh untuk Orang dengan gangguan jiwa di Alor)	192
B. FORSADIKA (Pengorganisasian Kelompok Difabel di tingkat Desa)	202
C. PERTUNI Kota Kupang (Koperasi Tuna Netra)	218
D. PHDF (Pendidikan inklusif di kota Kupang).....	225
E. GARAMIN NTT (WhatsApp Group Tanggap Covid-19 NTT Inklusif)	239
 BAB V PENUTUP	 248
DAFTAR PUSTAKA	250
 Lampiran-lampiran	
1. Kesan tim penyusun buku profil	252
2. Dokumentasi proses penyusunan buku profil	256
3. Rujukan Regulasi	264
4. Rujukan Website	266

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tren global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam pembangunan. Eksklusi tersebut tidak hanya dari kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Konsekuensinya, warga penyandang disabilitas cenderung memiliki kualitas hidup lebih rendah daripada warga non-disabilitas: seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah, serta kesempatan kerja dan akses terhadap fasilitas umum yang lebih terbatas. Di samping itu, rumah tangga dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada kelompok kesejahteraan rendah. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya makin memarginalkan peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Mewujudkan pembangunan yang inklusif penyandang disabilitas telah menjadi salah satu prinsip kerangka pembangunan global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penggunaan prinsip pembangunan yang inklusif ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi ketidakmerataan yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan, suara dan pengaruh antar individu/antar kelompok (termasuk individu/kelompok penyandang disabilitas) dalam proses

pembangunan. Pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya tatanan ekonomi, tetapi juga tatanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2016). Tanpa adanya upaya mewujudkan pembangunan inklusif, penyandang disabilitas akan makin termarginalkan yang selanjutnya akan makin memperparah wajah kemiskinan dan ketimpangan. Ini merupakan catatan penting dalam pergerakan disabilitas. Penting untuk mengaitkan dengan pendekatan kapasitas untuk mendorong maksimalnya inklusivitas seperti yang diutarakan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum (lihat juga, Baylies C, *Disability and the notion of human development: questions of rights and capabilities, Disability and society* Vol.17, Iss. 7, 2002).

Indonesia telah melembagakan pembangunan inklusi disabilitas ke dalam agenda pembangunan nasional, yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini berarti Indonesia berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif penyandang disabilitas untuk memastikan tidak adanya satu orang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari UU 8 Tahun 2016, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan mendorong proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan yang inklusif, serta meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam keseluruhan proses pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penyandang disabilitas di daerah, serta mengoptimalkan peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-hak dasar sebagaimana warga negara lainnya. Dukungan politis Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada penyandang disabilitas juga ditunjukkan dengan mengangkat seorang Penyandang disabilitas sebagai staf khusus gubernur bidang disabilitas yang diharapkan dapat membantu pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mewujudkan pembangunan yang inklusif sehingga bisa mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur. Langkah Gubernur ini merupakan salah satu Langkah awal untuk melawan ableism yang terjadi ditengah masyarakat dan memberikan ruang untuk para penyandang disabilitas mengembangkan diri dan berkontribusi dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Di Indonesia, kata orang dengan disabilitas dalam konteks regulasi disebutkan sebagai penyandang disabilitas.

Sedangkan dalam pergerakan lebih dikenal dengan sebutan difabel. Difabel merupakan orang yang memiliki kemampuan tetapi mengalami kondisi stigmatik biomedik sehingga kemampuannya itu tidak diakui dan tidak dikenali sebagai hal yang melekat dalam dirinya. Buku ini menggunakan istilah penyandang disabilitas dalam konteks regulasi sesuai yang termuat dalam undang-undang no 8 tahun 2016. Akan tetapi, juga memuat istilah difabel yang dalam konteks pergerakan istilah difabel juga diakui. Istilah difabel adalah bentuk perjuangan melawan kontruksi sosial yang menganggap disabilitas tidak mampu menjadi seseorang yang mampu berkontribusi dalam pembangunan.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, diperlukan pendataan yang akurat karena ketersediaan data yang kredibel merupakan unsur krusial dalam perencanaan pembangunan. Keterbatasan data riil penyandang disabilitas dan organisasi yang menaungi para Penyandang disabilitas masih menjadi kendala bagi pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas disebabkan oleh beberapa penyebab utama, antara lain: 1) pendataan melalui survei atau sensus yang dilakukan BPS belum memasukan instrumen terkait identitas penyandang Penyandang disabilitas; 2) Dinas Sosial hanya memiliki data disabilitas berat yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penghuni panti disabilitas, dan penerima bantuan sosial. Ketika penyandang

disabilitas dipandang sebagai salah PMKS sesungguhnya merupakan salah satu bentuk paradigma dan bentuk tindakan menjadikan Penyandang disabilitas sebagai obyek dalam pembangunan. Masyarakat juga masih membuat penyandang disabilitas menjadi tidak mampu, karena kondisi tubuh mereka seperti yang dikatakan oleh Oliver bahwa "*disabled by society, not by our bodies*" (Oliver, 1990, Thomas, 1999, hal.14). Ini membuat kita perlu bekerja keras untuk menghilangkan hambatan di masyarakat berupa stigmatisasi yang masih kuat pada penyandang disabilitas melalui pendekatan sosial dan pendekatan berbasis Hak asasi manusia.

B. Maksud dan Tujuan Pembuatan

Profil penyandang disabilitas ini disusun untuk menjawab tantangan kebutuhan data aktual terkait penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur, dengan fokus utama untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan organisasi disabilitas yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk potensi dari setiap organisasi disabilitas. Memerdekakan penyandang disabilitas dari stigma masyarakat dengan menunjukkan kapabilitas yang dimiliki dalam organisasi penyandang disabilitas merupakan salah satu alasan lahir buku profil ini. Penyusunan profil disabilitas ini juga diharapkan bisa menjadi akses bagi Penyandang disabilitas dalam membangun kemitraan dengan pemerintah sebagai mitra pembangunan, sehingga penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur tidak lagi diposisikan sebagai obyek, melainkan

subyek pembangunan yang akan mendukung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang semakin inklusif. Profil ini juga diharapkan menjadi penyemangat dalam pergerakan organisasi disabilitas di Nusa Tenggara Timur serta mendorong gerak inklusi baik di Provinsi, Kabupaten dan desa.

Profil disabilitas ini memuat beberapa bagian penting, antara lain: *pertama*, Pendahuluan berisi latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum dan data penyandang disabilitas dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Bagian kedua gambaran umum organisasi yang meliputi alamat, jumlah pengurus dan anggota berdasarkan kelompok usia, jenis disabilitas, jenis kelamin serta potensi yang dimiliki oleh lembaga disabilitas; *Ketiga*, pengalaman organisasi meliputi kerjasama yang dilakukan baik dengan sesama lembaga disabilitas maupun organisasi lainnya, akses ke pelayanan publik, dan juga keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan; keempat, hal-hal inovatif yang telah dihasilkan oleh organisasi disabilitas khususnya selama pandemic covid-19.

C. Dasar Hukum

Berikut landasan hukum dalam menyusun buku profil organisasi penyandang disabilitas, antara lain:

1. Undang -Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan da-

- lam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
3. Peraturan presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang komisi nasional disabilitas.
 4. Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
 5. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas
 6. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang disabilitas
 7. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman pelayanan publik dari bencana bagi penyandang disabilitas.
 9. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang ketenaga kerjaan
 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 68 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
 11. Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

D. Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki data riil penyandang disabilitas. Sensus Penduduk yang dilaksanakan BPS pada 2020 telah memasukan indikator terkait penyandang disabilitas namun hingga proses penyusunan profil disabilitas ini, hasil sensus penduduk dimaksud masih dalam proses pengolahan. Oleh karena itu, data-data yang akan ditampilkan berikut bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penanggung-jawab pendataan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2020, sekitar 0.15% (8.081) penduduk Nusa Tenggara Timur merupakan penyandang disabilitas. Sebaran penyandang disabilitas di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur tidak merata. Penyandang disabilitas paling banyak berada di Pulau Timor tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu 1.063 orang atau 0.41% dari total jumlah penduduk di Kabupaten TTU. Selanjutnya, posisi kedua dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak ditemukan di Kota Kupang sebanyak 973 orang, atau sekitar 0.22% dari total jumlah penduduk di Kota Kupang. Sementara itu, beberapa kabupaten yang baru dimekarkan seperti kabupaten Sabu Raijua dan Malaka tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit, masing-masing 2 dan 96 orang.

Tabel 1
 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Provinsi NUSA
 TENGGARA TIMUR

No	Kab/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas	Jumlah Total Penduduk
1	Alor	296	211,872
2	Belu	377	217,973
3	Ende	794	270,763
4	Flores Timur	578	276,896
5	Kota Kupang	973	442,758
6	Kupang	760	366,383
7	Lembata	98	135,930
8	Malaka	40	183,898
9	Manggarai	393	312,855
10	Manggarai Barat	165	256,317
11	Manggarai Timur	365	275,603
12	Nagekeo	108	159,732
13	Ngada	570	165,254

14	Rote Ndao	212	143,764
15	Sabu Raijua	2	89,327
16	Sikka	325	321,953
17	Sumba Barat	96	145,097
18	Sumba Barat Daya	302	303,650
19	Sumba Timur	119	244,820
20	Timor Tengah Selatan	445	455,410
21	Timor Tengah Utara	1063	259,829
	Jumlah	8081	

Sumber: Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPS, 2020

Berdasarkan ragam atau jenis disabilitas, hampir setengah dari total penyandang disabilitas merupakan penyandang disabilitas ganda, yang menyandang lebih dari satu jenis disabilitas, sekitar 3.378 orang. Selain itu, jumlah penyandang disabilitas fisik dan kusta atau penyakit kronis, juga tercatat tinggi sebanyak 2.308 orang. Sementara itu, penyandang disabilitas intelektual tercatat memiliki jumlah paling sedikit, sebanyak 383 orang. Selengkapnya jumlah penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori Disabilitas

Jenis Disabilitas	Jumlah
Disabilitas Fisik	2,308
Disabilitas Mental	795
Disabilitas Sensorik	1,217
Disabilitas Intelektual	383
Disabilitas Ganda	3,378
Total	8,081

Sumber: Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Menurut Data Riskesda 2018, penyandang disabilitas Anak yang berusia 5 - 17 tahun, disabilitas dewasa yang berusia 18 - 59 tahun dan disabilitas lanjut usia yang berusia 60 tahun dan 60 tahun ke atas.

Untuk kondisi NTT, disabilitas anak sebanyak 3,4 %, disabilitas dewasa sebanyak 27,3 %. NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah ketergantungan terrendah untuk katagori lansia

sebanyak 2,9%. Berbeda dengan konteks Indonesia, Di NTT, disabilitas dewasa atau usia produktif yang menjadi mayoritas atau memiliki jumlah tertinggi ini justru akan menjadi potensi dan kekuatan bagi provinsi NTT untuk bisa mendorong pemenuhan hak disabilitas bagi disabilitas anak dan lansia.

Berbagai program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan, baik yang dilakukan melalui sistem panti maupun non panti. Pelayanan disabilitas berbasis panti sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan pihak swasta pada 33 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/yayasan/ lembaga/panti sosial. Apabila dibandingkan antar populasi jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020 yaitu sebanyak 8,081 jiwa, penyandang disabilitas yang terlayani baik melalui panti sosial pemerintah maupun swasta hanya 1,284 orang (15.9 %). Sebaran penyandang disabilitas di LKS/ panti sosial/Yayasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Data LKS/Yayasan/Lembaga Yang Menangani
Penyandang Disabilitas
(Per Mei 2021)

NO	Kab/Kota		LKS/Panti	Jumlah Klien
1	Kota Kupang	1	Pa. Bhakti Luhur A Souverdi	18

		2	Yys. Bhakti Luhur B Sikumana	24
		3	PA. Kasih Kupang	
			Dalam Panti	30
			Luar Panti	26
		4	UPT. Tuna Netra Hitbia	50
2	Kab. Kupang	5	Pa. Bhakti Luhur Baumata Kupang	28
		6	BRSPDS Rungu Wicara Efata Kupang	23
3	TTU	7	Yys. Brayat Penuji	33
		8	Yayasan Bunda Pembantu Abadi (Panti Rehabilitasi Kusta Naob)	86
4	Belu	9	Hardinan Haklaran Tenubot	30
		10	PA. Bhakti Luhur	20

			Alma Atambua	
		11	Pusat Rehabilitasi Hidup Baru	
			Dalam Panti	33
			Luar Panti	10
5	Flores Timur	12	Pac. Damian Weri	34
		13	PA. St. Ignasia	21
		14	YPD. PA. Acamistar	
			Dalam Panti	41
			Luar Panti	14
6	Lembata	15	Panti Rehabilitasi Kusta Damian Lewoleba	16
7	Sikka	16	Pa. St. Aloysius Wairklau	50
		17	PAC. St. Maria Pau- dodo	22
		18	Pac. Maria Stella Maris Nangamure	19

		19	Panti Rehabilitasi St. Dymphna Wairklau	122
8	Ende	20	Pa. Jie Pama Pawe	40
		21	PAC. Bhakti Luhur Cab. Ende	
			Dalam Panti	16
			Luar Panti	8
9	Nagekeo	22	Pac. Bhakti Luhur Alma Boawae	39
		23	PAC. Bhakti Luhur Cab. Mundemi	
			Dalam Panti	13
			Luar Panti	5
		24	PAC. Bhakti Luhur Boanio	
			Dalam Panti	20
			Luar Panti	2
10	Ngada	25	Pa. Bhakti Luhur Cab. Bajawa	30

		26	Yayasan Citra Ngada	37
11	Manggarai	27	Yayasan Karya Murni Ruteng	65
		28	Yayasan St. Damian Cancar	70
		29	Panti Rehabilitasi Renceng Mose	25
12	Manggarai Barat	30	Yayasan St. Damian Binongko	20
13	Sumba Timur	31	Pa. Bhakti Luhur Cab. Waingapu	
			Dalam Panti	13
			Luar Panti	27
14	Sumba Barat	32	Pa. Bhakti Luhur Putri Waikabubak	
			Dalam Panti	19
			Luar Panti	50
		33	PA. Bhakti Luhur	

			Putra Waikabubak	
			Dalam Panti	12
			Luar Panti	23
Jumlah				1284

Sumber: Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

BAB II PROFIL ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS

Pengumpulan profil Organisasi disabilitas ini dilakukan dengan beberapa tahap sejak Januari 2020 hingga Juli 2021 antara lain dengan bermitra dengan organisasi difabel melalui grup WA tim penulis yang terdiri dari 3 orang difabel dari organisasi difabel dan staf khusus gubernur bidang disabilitas. Untuk mengumpulkan data, beberapa kegiatan dilakukan antara lain mengadakan pertemuan organisasi Penyandang disabilitas se-Nusa Tenggara Timur secara virtual dan dilanjutkan dengan surat resmi yang dikeluarkan Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Organisasi-organisasi Penyandang disabilitas melalui jaringan maupun kontak pribadi ketua organisasi dengan melampirkan link google-form. Organisasi mengisi formulir online yang telah disusun oleh tim. Akan tetapi, beberapa diantaranya membutuhkan bantuan tim bahkan dilakukan komunikasi mendalam untuk bisa mengumpulkan informasi yang lengkap.

Wawancara mendalam dilakukan juga bagi organisasi difabel yang melakukan inovasi saat pandemi covid 19. Dari proses tersebut, tim berhasil mengumpulkan 21 organisasi disabilitas yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, dua diantaranya tidak kami potret dalam profil kali ini antara lain PERTUNI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum mau mengisi formulir yang kami ki-

rimkan dan GERKATIN Manggarai Barat yang setelah ditelusuri ternyata masih merupakan inisiatif individu yang belum mengimpun anggota dan belum ada kegiatan-kegiatan organisasinya. Oleh karena itu, hanya 18 organisasi yang bisa dipotret dalam profil disabilitas kali ini. Untuk organisasi yang belum sempat terpotret karena terbatasnya waktu untuk menyelesaikan buku profil ini, akan dilihat Kembali sehingga ke depan menjadi catatan untuk bisa terus diperbaharui agar bisa masuk dalam profil di tahun mendatang.

18 Organisasi Penyandang disabilitas yang telah berhasil dipotret tersebut tersebar di 11 kota/kabupaten, antara lain Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Timur. Organisasi yang ada merupakan organisasi berbagai ragam disabilitas seperti Disabilitas Fisik, Disabilitas sensorik Netra, disabilitas sensorik Tuli, Disabilitas psikososial, disabilitas intelektual. Dan ada juga organisasi Penyandang disabilitas yang inklusi melibatkan non Penyandang disabilitas di dalam organisasinya. Berikut potret 18 organisasi Penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 4
Daftar 18 Organisasi Disabilitas di
Nusa Tenggara Timur

No	Nama Organisasi	Kota/Kabupaten
1	Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang
2	Forum Belarasa Penyandang disabilitas Nian Sikka (For-sadika)	Kab. Sikka
3	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kota Kupang	Kota Kupang
4	Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF)	Kota Kupang
5	Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA)	Kota Kupang

6	Yayasan Transfigurasi Tabor Mulia (YTTM)	Kota Kupang
7	Komunitas Tuli Kupang	Kota Kupang
8	Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI)	Kota Kupang
9	Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) Timor Tengah Selatan	Kab TTS
10	Persama (Perkumpulan penyandang Disabilitas Malaka)	Kab Malaka
11	Yayasan Dola Koyakoya	Kab Alor
12	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kab. Ngada	Kab Ngada

13	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kab. Sumba Timur	Kab Sumba Timur
14	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat
15	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kab. Manggarai	Kab. Manggarai
16	National Paralimpic Committee (NPC) Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang
17	Yayasan Kita Keluarga Insani	Kab Ende
18	Kumpulan Penyandang Disabilitas (KUMPESA) Rai Belu	Kab Belu

**Berikut Detail Potret 18
Organisasi Disabilitas
di Provinsi
NUSA TENGGARA TIMUR**



Jl.Noelmina Dalam, 7A, RT 003, RW, 001,
Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang, NTT

Email : garaminntt@yahoo.com/
garaminntt2020@gmail.com

Website : <http://garamin.org>

Facebook : Garamin Ntt

Instagram : Garamin NTT

Narahubung :

Yafas A. Lay (Direktur): 081997988296

Elmi Ismau (Wakil Direktur) : 082339485302

2.1 Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusi (GARAMIN) Nusa Tenggara Timur

2.1.1 Legalitas dan sejarah singkat

Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) Nusa Tenggara Timur didirikan pada tanggal 14 Februari 2020 di Kupang dan terdaftar di akta notaris dengan nomor 22. GARAMIN didirikan oleh 6 anak muda bernama Yafas A. Lay, Elmi Sumarni Ismau, Mariana D. Nunuhitu, Yunita Baitanu, Berti Soli Dima Malingara, Dinna N. Noach.

Nusa Tenggara Timur didirikan karena belum semua penyandang disabilitas memahami dan memperoleh haknya di berbagai sektor kehidupan. Hak-hak tersebut antara lain hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi, pariwisata, olahraga, serta akses untuk layanan publik lainnya. Masih banyak penyandang disabilitas yang hanya menjadi objek pembangunan dan mengalami ketidakadilan dalam mengakses hak-hak tersebut. Selain itu, pemerintah dan sektor lain belum melihat penyandang disabilitas sebagai warga negara yang harus menerima hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Penyandang disabilitas belum secara maksimal dilibatkan dalam perencanaan dan masuk dalam prioritas pembangunan. GARAMIN hadir untuk membuka jaringan seluas-luasnya dengan pemerintah sebagai sektor seperti organisasi penyandang disabilitas, LSM lokal, LSM Internasional, perguruan tinggi, lembaga Agama, lembaga adat dan sektor lainnya. GAR-

AMIN berharap dapat bergandengan tangan untuk membebaskan penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Kami berupaya agar kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa diwujudkan dengan kerjasama yang kuat.

Visi GARAMIN “Nusa Tenggara Timur inklusi dengan mengedepankan kesetaraan penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan”.

Misi GARAMIN: (1) Penelitian dan pemutakhiran data dan informasi penyandang disabilitas; (2) Kemitraan dengan pemerintah dan stake-holder lain yang mendukung Nusa Tenggara Timur inklusi; (3) Kampanye dan pendidikan publik; (4) Advokasi kebijakan; (5) Mendorong partisipasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan

Rencana Strategis Organisasi GARAMIN antara lain; (1) Peningkatan kapasitas pengurus dan lembaga; (2) Kemitraan dan kerjasama; (3) Menumbuhkan kesadaran publik tentang inklusi; (4) Advokasi; dan (5) Riset.

GARAMIN memiliki Strategi internal untuk memperkuat organisasi, antara lain: (1) Penguatan struktur dan sistem operasional organisasi; (2) Pengorganisasian kelompok disabilitas; (3) Peningkatan kapasitas pengurus dan staf.

GARAMIN juga mengembangkan Strategi eksternal, melalui (1) Membangun kemitraan dengan pemerintah untuk mendorong kebijakan dan pro disabilitas; (2) Membangun kemitraan dengan organisasi disabilitas, lembaga swadaya lokal dan internasional

serta multi stake holder untuk Nusa Tenggara Timur yang inklusi; (3) Mendorong keterlibatan orangtua dan masyarakat untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas.

2.1.2 Potret Pengurus /Anggota GARAMIN berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin

Jumlah pengurus /Anggota Total : 25 Orang, dengan rincian laki-laki :10 orang dan Perempuan 15 orang. Rincian ragam disabilitas dan usia. Anak Penyandang disabilitas netra (low vision) laki-laki 1 orang, Penyandang disabilitas sensorik Tuli laki-laki 1 orang dan Penyandang disabilitas intelektual 1 orang perempuan. Ketiganya berusia kurang dari 12 tahun. Penyandang disabilitas fisik dewasa usia 18 - 64 tahun ada 8 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Penyandang disabilitas Ganda usia dewasa (18-64 Tahun) perempuan ada 1 orang. Jumlah Penyandang disabilitas 12 orang dan Jumlah non Penyandang disabilitas dalam organisasi ada 13 orang dewasa yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

2.1.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota GARAMIN

Gambaran pendidikan pengurus/ anggota yang tidak sekolah, belum sekolah, sudah tamat dan masih menempuh pendidikan dirincikan sebagai berikut; anggota yang tidak sekolah 1 orang perempuan de-

wasu dan 1 orang anak laki-laki Penyandang disabilitas Tuli yang belum masuk sekolah. Penyandang disabilitas yang masih studi di SDLB laki-laki 1 orang dan 1 orang perempuan. Anggota yang tamat SMP 1 orang perempuan dan yang tamat SMA 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Penyandang disabilitas yang tamat D3 ada 2 orang perempuan. Jumlah Penyandang disabilitas yang tamat S1 perempuan 2 orang. Penyandang disabilitas yang masih sedang menempuh pendidikan Strata 1 ada 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

2.1.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota GARAMIN.

Penyandang disabilitas yang sudah bekerja ada 5 orang, laki-laki 1 orang dan perempuan 4 orang. Penyandang disabilitas yang belum bekerja dalam organisasi ada 2 orang dengan rincian 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

2.1.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di GARAMIN

Potensi yang dimiliki GARAMIN yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Peternakan, Pertanian, Kerajinan tangan, Menenun (design motif), Desain grafis, Kuliner, Fotografi, Komputer, Pegawai swasta, Wirausaha (Kios), Lainnya: Staff Khusus Gubernur Bidang disabilitas, Peneliti dan relawan.

Tabel.
Potensi yang dimiliki GARAMIN, antara lain:

No	Potensi yang dimiliki	Keterangan
1.	Pertanian	Yunita Baitanu, sekretaris GARAMIN NUSA TENGGARA TIMUR, sorang Penyandang disabilitas ganda (Fisik dan Intelektual) dan keluarganya mengelola lahan pertanian seluas setengah hektar. Lahan tersebut ditanami sayur sawi, kangkung, bayam, selada dan jagung. Selama ini hasil kebun tersebut langsung dibeli oleh pembeli di kebun. Namun jika tidak ada pembeli, maka hasil kebun dibawa ke pasar Oeba.
2.	Peternakan	Yafas A. Lay memelihara 10 ekor ayam, dan seekor babi. Yafas juga memiliki lahan seluas 15x20 yang bias digunakan untuk beternak ayam, maupun babi.

3.	Kerajinan Tangan	<p>-Yafas A. Lay bisa mendekorasi untuk panggung pengantin.</p> <p>-Dinna Noach bisa menjahit hiasan tutup galon, taplakmeja dan taplak kulkas, membuat kalung, membuat sarung kotak tisu dari pernak pernik.</p>
4.	Kuliner	Yafas, Elmi, Dinna, Nita, Rita dan Yanni bisa memasak masakan sederhana dan pencuci mulut
5.	Menenun/ Design Motif	Elmi S. Ismau mampu mengikat be-nang dari Amarasi
6.	Design Grafis	Yafas A. Lay mampu mendesign poster, buku, sticker, pamflet, dll.
7.	Fotografi	Yafas A Lay memiliki skill untuk memotret dengan baik, tetapi tidak punya alat dan kamera.
8.	Komputer	Yafas, Yomi, Elmi, Yakub, Dinna, Nita, Yanni, Dewi memiliki kemampuan mengetik dalam office excel,

		word, power point.
9.	Pegawai Swasta	Yomiani Radja bekerja di Koperasi Bank Nusa Tenggara Timur
10.	Wirausaha	Rita Rohi menjual sirih pinang di pertokoan dekat terminal Kupang.
11.	Peneliti	Elmi, Dina, Yafas, Yani dan Nita sedang belajar menjadi peneliti di desa.



Organisasi FORSADIKA:

Jl. Mgr Soegyopranoto No 1, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Maumere 86111.

Kontak Person: Ellen 081353234515

Email : elleonoramargita@yahoo.co.id

2.2. Forum Belarasa Penyandang disabilitas Nian Sikka atau FORSADIKA

2.2.1 Legalitas Lembaga dan sejarah singkat lembaga

FORSADIKA maumere telah terdaftar secara legal di akta notaris dengan nomor No Akta : 09 Notaris Gervasius Portasius Mude, SH, MH, tgl 19 September 2018. Selain itu, juga terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Sikka No Surat Ijin Operasional Organisasi Sosial dengan Nomor DINSOS.460/25/I/2019No.22/14 Feb 2020. Lembaga ini juga terdaftar di Kesbangpol dengan nomor Kesbangpol.224/01/STTPKO/I/2019.

Organisasi ini dibentuk melalui Lokakarya Manajemen Organisasi di Maumere pada tgl 11-14 Juli 2018 difasilitasi oleh Romo Yansen Raring. Peserta pertemuan berjumlah 29 orang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Peserta terdiri dari Penyandang disabilitas, orang tua anak Penyandang disabilitas dan pemerhati.

Alasan membentuk organisasi Penyandang disabilitas butuh wadah untuk berjuang Bersama mendapatkan pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas yang sudah diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.

Wadah ini dapat mengakomodir semua Penyandang disabilitas yang ada di Sikka dan dapat mengetahui berbagai permasalahan Penyandang disabilitas di Sikka. Pendiri organisasi ini adalah aktifis Penyandang disabilitas yakni Bapak Sipri Sadipun (seorang Penyandang disabilitas daksa) dan Margaretha Helena (pemerhati Penyandang disabilitas).

Visi organisasi “Menjadi forum peduli Penyandang disabilitas yang penuh cinta kasih dan rasa bangga berjuang dalam kebersamaan demi terpenuhinya kesejahteraan kaum lemah, miskin, tertinggal dan Penyandang disabilitas.

Misi organisasi;(1) Mengabdikan kepada kemanusiaan khususnya yang lemah, miskin, tertinggal dan Penyandang disabilitas; (2) Memilih peduli Penyandang disabilitas; (3) Memperjuangkan kesamaan Hak dan Martabat Penyandang disabilitas; (4) Menegakkan hukum demi keadilan sosial; (5) Menjalin kemitraan dengan para pihak untuk kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis Organisasi yang dikembangkan, antara lain; (1) Sosialisasi keberadaan forum pada pemerintah; (2) Mengadvokasi organisasi perangkat daerah terkait untuk mengakomodir kepentingan kaum lemah, miskin, tertinggal dan Penyandang disabilitas dalam usulan kegiatan organisasi perangkat daerah. (3) Menyediakan data Penyandang disabilitas; (4) Mengidentifikasi kebutuhan Penyandang disabilitas; (5) Memediasi kepentingan dan kebutuhan Penyandang disabilitas kepada para pihak; (6) Melakukan hearing dengan pemerintah dan DPRD terkait hak-hak Penyandang disabilitas (7) Menyiapkan draft Perda inisiatif; (8) Melakukan konsultasi publik;(9) Mengawal dokumen legal formal (Perda inisiatif untuk kepentingan Penyandang disabilitas).

2.2.2 Potret Pengurus /Anggota FORSADIKA berdasarkan ragam disabilitas ragam usia dan jenis kelamin

Jumlah pengurus keseluruhan sebanyak 12 orang, dengan rincian 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jumlah anggota non Penyandang disabilitas/ Disabilitas ada 4 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sedangkan jumlah Penyandang disabilitas/ Disabilitas ada 9 orang yaitu 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

2.2.3. Potret latar belakang pendidikan dan pekerjaan anggota FORSADIKA

Belum tergambar dengan jelas secara rinci mengenai tingkat Pendidikan dan pekerjaan pengurus dan anggota FORSADIKA.

2.2.4. Potret Potensi yang dimiliki FORSADIKA

Potensi/ Ketrampilan yang ada dalam organisasi FORSADIKA secara umum yang bisa dilihat antara lain (1) Pertanian; (2) Peternakan; (3) Kerajinan tangan; (4) Kuliner; (5) Designer Pakaian; (6) Penjahit; (7) Menenun (design motif); (8) Bengkel; (9) Pertukangan; (10) Komputer; (11) Servis Elektronik; (12) Wirausaha (Kios).



PERTUNI Kota Kupang

Jl. TDM 2 RT.10 RW.03, Kelurahan Tuak Daun
Merah (TDM), Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR.
Kontak Person: I Made Astika Dhana
(Sekretaris) Hp 085253522019
Email: pertuni.dpckotakupang@gmail.com

2.3 Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Kota Kupang

2.3.1. Legalitas dan sejarah singkat

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) telah terdaftar di Notaris, Dinas Sosial dan Kesbangpol.

PERTUNI adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 di Surakarta. Hingga saat ini, PERTUNI telah memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pertuni Kota Kupang dibentuk pada tahun 2000 melalui surat keputusan Ketua Pertuni daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.02/PJK/DPD/PERTUNI/2000 tentang pembentukan Pertuni Kota Kupang. Pertuni Kota Kupang merupakan Unit Operasional organisasi tingkat Kota yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh DPD Pertuni Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan program pelayanan dan memberikan perlindungan segala kepentingan para Penyandang disabilitas sensorik netra. Pendiri PERTUNI Kota Kupang ada 4 orang tokoh disabilitas sensorik netra (Maximus Hun, Adio Datus Libing, Muhamad Anwar dan Yohanes Selan). PERTUNI Kota Kupang sebagai organisasi kemasyarakatan Penyandang disabilitas sensorik netra senantiasa berupaya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan demi kesejahteraan seluruh anggota PERTUNI Kota Kupang. Alasan membentuk organisasi PERTUNI adalah untuk

mewujudkan keadaan yang kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan.

Visi PERTUNI adalah “terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan”.

Misi PERTUNI: (1) Membangun Pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi sumber daya manusia, dana, sarana maupun prasarana; (2) Melakukan advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan memastikan orang tunanetra mendapatkan hak asasinya; (3) Membangun kesadaran publik mengenai hakikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan dan bersikap positif serta supportif terhadap para tunanetra.

2.3.2 Potret Pengurus /Anggota PERTUNI Kota Kupang berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin

Jumlah pengurus /Anggota PERTUNI Kota Kupang: 120 Orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 77 orang dan Perempuan: 43 orang. Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik penglihatan/ Disabilitas sensorik netra Usia Anak (Kurang dari 12 Tahun) sebanyak 5 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyand-

dang disabilitas sensorik penglihatan Usia Dewasa (18-64 Tahun) ada sebanyak 113 orang dengan rincian 41 orang Perempuan dan 72 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik penglihatan Lanjut usia (Diatas 64 tahun) ada 2 orang yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

2.3.3 Potret Pendidikan Pengurus /Anggota PERTUNI Kota Kupang

Jumlah Anggota Penyandang disabilitas yang tidak atau belum sekolah ada 72 orang dengan rincian 35 orang laki-laki dan 37 orang perempuan. Jumlah Anggota Penyandang disabilitas yang tamat SDLB, ada 10 orang, dimana ada 7 orang Laki-laki dan Perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas/disabilitas yang tamat SMPLB ada 11 orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan 4 orang. Jumlah anggota Penyandang disabilitas/disabilitas yang tamat SMALB/SMK ada 21 orang, yang terdiri dari 6 orang Perempuan dan 15 orang laki-laki. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas/disabilitas yang tamat Diploma (D3) ada 2 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat Sarjana Strata 1 ada 4 orang, yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 3 orang. Jumlah anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja Laki-laki sebanyak 69 Orang dan Perempuan sebanyak 34 orang. Jumlah anggota Penyandang disabilitas belum bekerja dalam organisasi ada 8 orang laki-laki dan Perempuan sebanyak 9 orang.

2.3.4 Potret Potensi/ Ketrampilan yang dimiliki Pengurus /Anggota PERTUNI Kota Kupang

Mayoritas potensi/ Ketrampilan yang ada dalam organisasi PERTUNI Kota Kupang adalah ketrampilan pijat yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Panti Hitbia. Namun karena strategi pemasaran yang kurang baik dan kurangnya dukungan sehingga ketrampilan ini jarang menjadi pekerjaan pokok. Banyak yang memilih berjualan sapu debu atau kemoceng saja. Selain itu, potensi atau ketrampilan lain yang dimiliki PERTUNI Kota Kupang antara lain Peternakan, Kerajinan tangan dan Komputer. Ada pengurus atau anggota yang menjadi PNS dan Pegawai swasta.



**PELITA HARAPAN DISABILITAS
FLOBAMORA**

Jl. Damai No.351, Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang,
NUSA TENGGARA TIMUR.

Kontak Person : Rina Astuti (Staf)

No.Hp:085323455800

Alamat email :

phdfflobamora02@yahoo.com

smartkoboy@gmail.com

Facebook : Pelita Harapan Disabilitas Flobamora

2.4. PELITA HARAPAN DISABILITAS FLOBAMORA (PHDF)

2.4.1. Legalitas dan sejarah singkat Organisasi

Organisasi Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF) telah terdaftar pada notaris dengan nomor akta 143. Lembaga ini juga sudah terdaftar di kesbangpol melalui SK Kemenhum dan HAM RI No. C-142 HT 03.01 tahun 2005 pada tanggal 15 Juli 2005. Lalu terdaftar pada SK. KEP. BPN. RI SK.KEP.BPN. RI NO.669-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006. Lembaga ini terdaftar lagi pada KESBANGPOL melalui KESBANGPOL 220/63/BKBPPM/07/2012.

Organisasi ini didirikan oleh Bapak Hermawan Pongkapadang pada tanggal 27 Oktober tahun 2011. Alasan membentuk organisasi ini adalah bahwa Beliau tidak ingin para penyandang disabilitas mengalami berbagai bentuk diskriminasi seperti apa yang telah dialami semasa hidupnya. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti orang non-disabilitas pada umumnya sebagai warga negara Indonesia.

Visi organisasi “Terwujudnya partisipasi penuh dengan kesamaan dan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Misi organisasi Lembaga ini antara lain: (1) Mengupayakan akses pendidikan dan Kesehatan serta pelatihan bagi anak-anak dan remaja disabilitas; (2) Melakukan Advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan anak-anak dan remaja dis-

abilitas; (3) Menyeimbangkan kewajiban dan Hak disabilitas sebagai warga negara Indonesia; (4) Mengupayakan keterpaduan langkah ,potensi disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas ,efektifitas , efesiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat; (5) Memerdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi; (6) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas.

Rencana Strategis Organisasi yang dikembangkan adalah Pendidikan berbasis terapi bagi anak disabilitas (khususnya disabilitas mental/intelektual) dan Pendidikan bagi orangtua/keluarga penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi/mata pencaharian dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektoral pemerintah demi terciptanya masyarakat yang inklusi dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai UU No.8 Tahun 2016.

2.4.2 Potret Pengurus /Anggota Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF) berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin

Jumlah pengurus /Anggota sebanyak 10 Orang, dengan rincian 3 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Jumlah Anggota Penyandang disabilitas Fisik usia dewasa (18-64Tahun) berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas In-

telektual Usia Anak (Kurang dari 12 Tahun) berjumlah 17 orang yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas intelektual Usia remaja (13-17 Tahun) sebanyak 30 orang dengan rincian 19 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas intelektual Usia Dewasa (18-64 Tahun) sebanyak 7 orang yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Jumlah anggota non disabilitas ada 3 orang dengan rincian 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

2.4.3 Potret Pendidikan dan Pekerjaan Pengurus /Anggota Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF)

Gambaran Penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat Pendidikan baik tidak sekolah, yang sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan. Jumlah pengurus Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tidak sekolah sebanyak 19 orang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 12 orang Perempuan. Jumlah pengurus Penyandang disabilitas yang masih SDLB ada 1 orang perempuan. Jumlah pengurus Penyandang disabilitas yang tamat SMALD/SMK ada 1 orang laki-laki (sementara melanjutkan D3 Fisioterapi di UKI-Jakarta). Jumlah anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat master/Sarjana Strata 2 ada 1 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja sebanyak 4 orang dengan rincian 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas belum bekerja dalam or-

ganisasi ada 41 orang dengan rincian 21 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Akan tetapi, PHDF menyediakan lapangan pekerjaan sendiri berupa *home industry/* Usaha rumahan bagi beberapa remaja usia produktif.

2.4.4 Potret potensi/ ketrampilan Pengurus /Anggota Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF)

Pada tahun 2019 dan 2020 ini sudah beberapa kali mendapat dukungan peralatan dari DISNAKERTRANS, DISPERINDAG dan DINAS KOPERASI DAN UMKM tentang usaha kuliner serta mendapat predikat UKM Terbaik dari TAPALEUK yaitu aplikasi belanja online buat anak muda NUSA TENGGARA TIMUR. Selain itu, Potensi/ Ketrampilan yang ada dalam organisasi PHDF antara lain; Kerajinan tangan, Kuliner, Bengkel, Wirausaha (Kios), dan Usaha jasa cuci pakaian/ *Laundry*.



PERHIMPUNAN MANDIRI KUSTA

Jl. Penkase RT.002/RW.001,
Kelurahan Penkase-Oeleta,
Kecamatan Alak, Kota Kupang,
NUSA TENGGARA TIMUR
Kontak Organisasi : HP/ WA
Paulus Manek (ketua): 082145027226
e-mail: permataidonesia.org

2.5 PERHIMPUNAN MANDIRI KUSTA (PERMATA)

2.5.1 Legalitas dan sejarah singkat organisasi

PERMATA telah terdaftar pada Notaris pada tanggal 15 Februari 2007. Organisasi ini didirikan oleh 12 perwakilan dari 3 provinsi (Jawa Timur, NUSA TENGGARA TIMUR dan Sulawesi selatan) yang disaksikan oleh Duta Eliminasi Kusta (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI.

Alasan membentuk organisasi ini adalah sebagai bentuk upaya JANGAN ADA STIGMA dan Diskriminasi terhadap orang yang mengalami kusta.

Visi organisasi “Bebas stigma dan Diskriminasi menuju kualitas hidup yang lebih baik”.

Adapun Misi organisasi, antara lain: Koordinasi, konsolidasi dan pencegahan kusta dan disabilitas yang diakibatkan, kemandirian yang berdaya, penerimaan yang bermartabat. Rencana Strategis Organisasi yang dikembangkan antara lain Renstra, Pengembangan kapasitas, Kampanye, penemuan kasus secara dini, penghapusan stigma dan kemandirian ekonomi.

2.5.2. Potret Pengurus/ Organisasi berdasarkan ragam usia dan jenis kelamin

Jumlah pengurus PERMATA sebanyak: 103 orang. Ini merupakan organisasi yang ada di tingkat nasional yang memiliki cabang di 5 Provinsi dan 28 Kabupaten/ Kota. Rincian laki-laki sebanyak 73 orang dan

perempuan sebanyak 30 orang. Ada 57 orang yang penyandang disabilitas akibat kusta sebanyak 57 orang dengan rincian 34 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Jumlah anggota PERMATA di NTT sebanyak 816 orang.

2.5.3 Potret Pengurus/ Organisasi berdasarkan Pendidikan

Jumlah Penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat Pendidikan antara lain Pengurus Penyandang disabilitas yang tamat Diploma (D3) ada 34 orang dengan rincian Perempuan sebanyak 11 orang dan 23 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat Sarjana Strata 1 ada 16 orang dengan rincian perempuan sebanyak 6 orang dan laki-laki sebanyak 10 orang. Jumlah anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja sebanyak 35 orang.

2.5.4 Potret Potensi/ Ketrampilan yang dimiliki PERMATA

Adapun potret potensi atau ketrampilan yang dimiliki PERMATA antara lain Pertanian, Peternakan, Kerajinan tangan, Kuliner, Designer Pakaian, Menenun (design motif), Desain grafis, Fotografi, Komputer, PNS, Pegawaiswasta, Wirausaha (Kios). Anggota PerMaTa wilayah Nusa Tenggara Timur sebanyak 816 orang, dan 80 persen memiliki lahan pertanian hampir 1 Hektar.



Yayasan Transfigurasi Tabor Mulia

kantor: Jalan Johanis Fanggi RT/RW: 026/007

Kontak Person: Petronela Sau Naikofi, SE

(Ketua) Telp/ WA :085237179972

email: petronelanaikofi926@gmail.com

2. 6.Yayasan Transfigurasi Tabor Mulia (YTTM)

2.6.1. Legalitas dan Sejarah singkat Organisasi

Telah terdaftar pada notaris dengan nomor 01/KET/NOT/I/2015. Terdaftar pada Dinas Sosial dengan nomor 2.460/42/I/2017. Terdaftar di Kesbangpol dengan nomor 3.BKBP,230/002/I/01/2017.

Organisasi ini didirikan oleh Pastor Adrian Ola Duli, Pr pada tanggal 06 Januari 2016. Alasan organisasi ini dibentuk untuk mendorong kehidupan para Penyandang disabilitas untuk mengembangkan talenta yang ada pada Penyandang disabilitas secara mandiri. Alasan lain adalah untuk menghargai martabat para Penyandang disabilitas yang masih dianggap org lemah, orang tak berdaya.

Visi organisasi YTTM “Para Penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang luar biasa, jika di hargai dan di kembangkan melalui penanaman dan traning yang berkelanjutan”.

Misi YTTM antara lain; (1) membangun kepercayaan diri para Penyandang disabilitas untuk menerima keterbatasan fisik; (2) membangun kesadaran bhw Penyandang disabilitas perlu di hargai dan di terima dalam hidup bermasyarakat; (3) menjunjung tinggi harga diri Penyandang disabilitas dg cara memberi pelatihan sesuai minat; (4) menanggapi keadaan dengan cara mendorong aktivitas para Penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam membangun kerjasama sebagai kontribusi dalam pembangunan.

Adapun rencana strategis organisasi ini adalah menjadi organisasi disabilitas yang murni dengan kemampuan anggota untuk menghidupi diri, lewat organisasi utk membangun pemahaman pandangan masyarakat tentang para Penyandang disabilitas. Bergerak di bidang sosial, pemberdayaan ekonomi, kerohanian, Advokasi.

2.6.2 Potret Pengurus/ Anggota YTTM berdasarkan ragam disabilitas, usia dan jenis kelamin

Jumlah pengurus /Anggota YTTM sebanyak 7 Orang, dengan rincian laki-laki 3 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik netra Usia Anak (Kurang dari 12 Tahun) ada 1 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik netra Usia Dewasa (18-64 Tahun) sebanyak 2 orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas Fisik Usia Anak (Kurang dari 12 Tahun) ada 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas Fisik/ Disabilitas Fisik Usia Remaja (13 - 17 Tahun) ada 1 orang Perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas Fisik/ Disabilitas Fisik Usia Dewasa (18-64 Tahun) sebanyak 15 orang dengan rincian 5 Orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas/Disabilitas Intelektual Usia remaja (13-17Tahun) ada 1 orang Perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas/ Disabilitas Psikososial Usia Dewasa (18-64 Tahun) sebanyak 1 orang Perempuan. Jumlah anggota non Penyandang disabilitas/

Disabilitas sebanyak 5 orang dengan rincian 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

2.6.3 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan tingkat pendidikan baik yang tidak sekolah, sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan.

Jumlah Anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tidak atau belum sekolah sebanyak 2 orang, dengan rincian 1 orang laki-laki belum sekolah dan 1 orang perempuan tidak sekolah. Jumlah Anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang masih SDLB ada 2 orang (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan). Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat SMP ada 1 orang Perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat SMALB/SMK ada 4 orang (1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan). Jumlah anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat Sarjana Strata 1 ada 1 orang perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja ada 9 orang (4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan). Jumlah anggota Penyandang disabilitas belum bekerja dalam organisasi ada 9 orang (2 orang laki-laki dan 7 orang Perempuan).

2.6.4. Potret Potensi/ Keterampilan yang ada dalam organisasi

Secara umum, potensi/ Keterampilan yang ada dalam organisasi YTTM antara lain Pertanian, Peternakan, Kerajinan tangan, Kuliner, Penjahit, Pertukangan, Salon dan Komputer. Anggota bekerja dengan keterampilan mereka. Ada yang bercocok tanam hortikultura, piara ayam, menjahit, salon, usaha kios, catering di tempat mereka masing -masing.



Alamat . Komunitas Tuli Kupang

Jl. Bajawa GangMekar 3, RT 044, RW 013,
Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang, 85111

Kontak Telp/ WA : Mario Lado (Ketua)
081236737356

Email : darcolado@gmail.com

2.7. Komunitas Tuli Kupang (KTK)

2.7.1 Legalitas dan Sejarah singkat organisasi

Komunitas Tuli Kupang (KTK) belum terdaftar dimanapun. Organisasi dibentuk pada tanggal 5 Januari 2016. Didirikan oleh Mario F. Lengi Lado dan sekumpulan relawan yang memiliki hambatan pendengaran dan hambatan berbicara (Disabilitas Rugi/Tuli). Alasan membentuk Organisasi ini untuk penggalangan sumberdaya dan penyediaan informasi seputar pendidikan dan lapangan kerja bagi penyandang hambatan pendengaran. KTK juga memberikan dukungan kepada keluarga penyandang hambatan pendengaran untuk mendapatkan kesetaraan.

Visi KTK “Mewujudkan Organisasi Tuli sebagai wadah untuk pembelajaran dan sarana aktualisasi dari Komunitas Tuli NUSA TENGGARA TIMUR yang mandiri, Setara dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat”.

Adapun Misi KTK antara lain (1) Membentuk layanan interpreter; (2) Memberi pengetahuan tentang komputer untuk orang - orang Tuli; (3) Mengembangkan dan memperkenalkan bahasa isyarat kepada masyarakat;(4)Membangun usaha mandiri bagi organisasi dan mencari dana untuk mendukung organisasi; (5) Memberikan pendidikan bagi semua orang tuli agar dapat maju dengan kekuatan dan pikirannya; (6) Sosialisasi dan advokasi HAK Tuli; (7)Partisipasi; (8) Perencanaan yang juga berpihak (9) Membangun kerja sama dengan Lembaga lain (10) Memberi motivasi

kepada semua orang tuli; (11) Memberi pemahaman tentang Tuli kepada Masyarakat.

2.7.2 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin

Jumlah pengurus orang /Anggota sebanyak 72 orang dengan rincian perempuan 33 orang dan laki-laki 39 orang. Rincian Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik pendengaran/ Tuli Usia Dewasa (18-64 Tahun) Perempuan sebanyak 33 orang dan 39 orang laki-laki. Jumlah anggota non Penyandang disabilitas/ Disabilitas ada 13 orang dengan rincian laki-laki 4 orang dan perempuan 9 orang.

2.7.3 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan tingkat Pendidikan

Gambaran pengurus/ anggota berdasarkan tingkat Pendidikan baik yang Belum sekolah, tidak sekolah, sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan. Jumlah Pengurus Tuli yang tidak sekolah ada 4 orang. Jumlah Pengurus Tuli yang tamat SD/ SDLB ada 5 orang dengan rincian laki-laki ada 4 orang dan perempuan ada 1 orang. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas Tuli yang tamat SMP/ SMPLB ada 3 orang laki-laki. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas Tuli yang tamat SMA LB/ SMK ada 38 orang (laki-laki ada 25 orang dan Perempuan sebanyak 13 orang). Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas Tuli yang tamat Diploma (D1, D2, D3) ada 2 orang (laki-laki sebanyak 1 orang dan Perempuan ada 1 orang). Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas Tuli yang

tamat Sarjana Strata 1 sebanyak 3 orang (2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki).

2.7.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan

Jumlah anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja ada 20 orang (laki-laki ada 12 orang, Perempuan ada 8 orang). Jumlah anggota Penyandang disabilitas belum bekerja dalam organisasi sebanyak 23 orang (laki-laki ada 14 orang dan Perempuan ada 9 orang).

2.7.5 Potret Potensi/ Keterampilan Pengurus/ Anggota

Secara umum Potensi/ Keterampilan yang ada dalam organisasi KTK antara lain; Pertanian, Peternakan, Kerajinan tangan, Kuliner, Penjahit, Desain grafis, Bengkel, Guru Bahasa Isyarat, Pertukangan, Salon, Fotografi, Komputer, Servis Elektronik, Wirausaha (Kios).



Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani

Jalan Oelon III, Kelurahan Sikumana,
Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Kontak Telp/WA : Ketua (Serafina Bete)
082145272095

Email : persaniNusa Tenggara Timur@yahoo.co.id

Facebook : Persani Nusa Tenggara Timur

Instagram : Persani Nusa Tenggara Timur

2. 8. Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI)

2. 8.1 Legalitas dan sejarah Singkat

Lembaga PERSANI NTT sudah terdaftar di Notaris. PERSANI terbentuk pada tanggal 21 April 2010. Didirikan oleh 3 orang perempuan Penyandang disabilitas Serafina Bete, Aplonia Kune dan Mery Riwu. Alasan membentuk Organisasi ini untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.

Visi “Bebas dari stigma dan diskriminasi menuju kualitas hidup yang lebih layak”. Misi PERSANI NTT antara lain meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian serta partisipasi aktif Tuna Daksa di masyarakat.

Adapun Rencana Strategis PERSANI NTT, sebagai berikut: Mendorong partisipasi anggota dalam meningkatkan kualitas hidup yang layak, Menumbuhkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas di NTT dan Memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di NTT.

2.8.2 Potret Pengurus /Anggota PERSANI Nusa Tenggara Timur berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin

Jumlah pengurus /Anggota Total: 22 Orang, dengan rincian laki-laki : 12 orang dan Perempuan 10 orang. Rincian ragam disabilitas dan usia. Penyan-

dang disabilitas sensorik netra dewasa usia 18 - 64 tahun ada 1 orang perempuan. Disabilitas intelektual dewasa usia 18 - 64 tahun ada 3 orang laki-laki. Penyandang disabilitas fisik usia dewasa (18-64 Tahun) perempuan ada 9 orang dan laki-laki ada 7 orang. Jumlah non Penyandang disabilitas dalam organisasi ada 5 orang dewasa yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

2.8.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota PERSANI NTT

Gambaran pendidikan pengurus/ anggota yang tidak sekolah dan sudah tamat pendidikan dirincikan sebagai berikut. Anggota yang tidak sekolah 4 orang perempuan dewasa. Anggota yang tamat SMA LB/SMK 4 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Penyandang disabilitas yang tamat D3 ada 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Jumlah Penyandang disabilitas yang tamat S1 ada perempuan 2 orang dan laki-laki 2 orang.

2.8.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota PERSANI Nusa Tenggara Timur

Penyandang disabilitas yang sudah bekerja laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang. Penyandang disabilitas yang belum bekerja dalam organisasi ada 20 orang masing-masing laki-laki 11 orang dan perempuan 9 orang.

2.8.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di PERSANI Nusa Tenggara Timur

Potensi yang dimiliki Persani NUSA TENGGARA TIMUR yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Peternakan, Kerajinan tangan, Komputer, Desain Grafis, Wirausaha (Kios), Lainnya: Katering Makanan dan Relawan.



Komite Penyandang Disabilitas

Jalan Johar belakang SPBU KM 3 gang 3 kiri,
Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kontak Telp/WA : Ketua (Imanuel Nuban)
0388 2421205. 082339461121

Email : Nubanimanuel80@gmail.com

Facebook : Grup KIPDA TTS

2.9 Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) Timor Tengah Selatan

2.9.1. Legalitas dan sejarah singkat

Lembaga Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) Timor Tengah Selatan (TTS) sudah terdaftar di Notaris Maya Lyng Christian Sayuna, SH,M.Kn. dengan Nomor Akta Notaris 121. KIPDA TTS telah terbentuk pada tanggal 14 februari 2018 Didirikan oleh 1 orang laki-laki Penyandang disabilitas Imanuel Nuban, dan 4 orang laki-laki non Penyandang disabilitas diantaranya Arifin Bete Lette Beti, Joni Arni Konai, Macu Buanambau dan Febrianus CHR Fallo. Alasan membentuk Organisasi ini untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS.

Visi KIPDA adalah “Terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di kabupaten TTS secara holistik dalam kehidupan”.

Misi KIPDA : (1) Melakukan pendataan, koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan isu-isu disabilitas di seluruh Kabupaten TTS. (2) Melakukan Advokasi hukum dan HAM terhadap perjuangan hak dan peningkatan Kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten TTS, (3) Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS sebagai warga negara Indonesia, (4) Mengupayakan perpaduan langkah, potensi para penyandang disabilitas di kabupaten TTS dalam rangka peningkatan kualitas efektivitas efisiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling

menghargai dan bermartabat, (5) Memberdayakan penyandang disabilitas yang ada di kabupaten TTS agar turut berpartisipasi dalam pembangunan, (6) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran masyarakat di kabupaten TTS sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas.

2.9.2 Potret Pengurus /Anggota KIPDA TTS berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus dengan Jumlah 12 orang diantaranya 6 orang non Penyandang disabilitas, sedangkan 6 orang penyandang disabilitas dengan rincian 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, jumlah anggota dengan Total: 1.609 orang. Berdasarkan Jenis Kelamin diantaranya perempuan 822 orang dan laki-laki 787 orang. Organisasi KIPDA tidak memilah jumlah anggota berdasarkan Klasifikasi Usia dan ragam Disabilitas.

2.9.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota KIPDA TTS.

Gambaran pendidikan pengurus yang sudah tamat pendidikan berjumlah 13 orang Yang tamat SMA LB/SMK diantaranya perempuan ada 3 orang, laki-laki 5 orang, sedangkan pengurus yang tamat Sarjana Strata satu perempuan 1 orang dan laki-laki 4 orang. Sedangkan, jumlah anggota berdasarkan latar pendidikan belum dirincikan.

2.9.4. Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota KIPDA TTS

Pengurus yang sudah bekerja dan berprofesi sebagai Guru Honorer 1 orang, Ibu Rumah Tangga 2 orang, Wiraswasta 2 orang, Tenaga Tata Usaha Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Soe 1 orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 6 orang. Sedangkan Anggota KIPDA belum dirincikan berdasarkan pekerjaan.

2.9.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di KIPDA TTS

Potensi yang dimiliki KIPDA TTS yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Peternakan, Kuliner, Designer Pakaian, Bengkel, Menenun (Design Motif), Bengkel, Wartawan, Pertukangan, Salon, Fotografi, Komputer, Servis Elektronik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta dan Wirausaha (Kios). Pertanian mempunyai Alat Traktor, Jasa Foto, Percetakan dan menjahit semua difasilitasi oleh KIPDA TTS.



Perkumpulan Penyandang Disabilitas

RT 02/RW 01, Desa Kamanasa, Kecamatan
Malaka Tengah Kabupaten Malaka

Kontak Telp/ WA : Ketua (Sinda Atok)
081337488130

Email : sindaatok@gmail.com

Facebook : Persama Malaka

2.10 Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PERSAMA) Kabupaten Malaka

2.10.1. Legalitas dan sejarah singkat

Lembaga PERSAMA Malaka sudah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Malaka, tetapi baru mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Malaka. PERSAMA MALAKA telah terbentuk pada tanggal 27 september 2019, Didirikan oleh Sinda Atok Penyandang disabilitas fisik bersama dengan teman-teman Penyandang disabilitasnya sebanyak 27 orang dari berbagai ragam Penyandang disabilitas baik itu disabilitas Fisik, Penyandang disabilitas Tuli, Penyandang disabilitas Sensorik Netra dan Penyandang disabilitas Mental. Alasan membentuk organisasi ini untuk Mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Malaka.

Visi PERSAMA adalah “Mewujudkan Partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada umumnya”.

Misi PERSAMA : (1) Melakukan kunjungan Rumah, (2) Melakukan Advokasi terhadap perjuangan Hak dan Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, (3) Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif berbasis masyarakat, (4) Melakukan pembinaan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, bersekolah dasar, atau sekolah luar biasa sampai pendidikan lebih

tinggi, (5) Melakukan Kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

2.10.2 Potret Pengurus /Anggota PERSAMA berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus 6 orang. Anggota sebanyak 140 orang dengan rincian perempuan 78 orang dan laki-laki 62 orang. Rincian Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik penglihatan/Netra Usia Dewasa (18-64 Tahun) sebanyak 4 orang dengan rincian; Perempuan sebanyak 3 orang dan 1 orang laki-laki. Jumlah Penyandang disabilitas sensorik pendengaran/ Tuli Usia Anak (Kurang dari 12 Tahun) sebanyak 3 orang, terdiri dari perempuan 2 orang dan laki-laki 1 orang. Jumlah Penyandang disabilitas Sensorik Pendengaran/ Tuli Usia Remaja (13-17tahun) sebanyak 30 orang, terdiri dari perempuan sebanyak 21 orang dan laki-laki 9 orang, Penyandang disabilitas Sensorik Pendengaran/Tuli Usia Dewasa (18-64 tahun) sebanyak 5 orang dengan rincian; perempuan 3 orang dan laki-laki 2 orang. Jumlah Penyandang disabilitas fisik Usia Remaja (13-17 tahun) sebanyak 7 orang, terdiri dari perempuan 4 orang dan laki-laki 3 orang, Jumlah Penyandang disabilitas fisik usia dewasa (18-64 tahun) sebanyak 57 orang dengan rincian; laki-laki sebanyak 38 orang dan perempuan 19 orang, Jumlah Penyandang disabilitas intelektual Usia remaja (13-17 tahun) perempuan 4 orang. Jumlah Penyandang disabilitas Intelektual Usia Dewasa (18-64

tahun) sebanyak 5 orang dengan rincian; laki-laki 1 orang dan perempuan 4 orang, Jumlah Penyandang disabilitas ganda Usia anak (kurang dari 12 tahun) sebanyak 5 orang dengan rincian; perempuan sebanyak 4 orang dan laki-laki 1 orang, Jumlah Penyandang disabilitas ganda usia remaja (13-17 tahun) sebanyak 3 orang, dengan rincian; perempuan 2 orang dan laki-laki 1 orang, Jumlah Penyandang disabilitas ganda Usia Dewasa (18-64 tahun) sebanyak 3 orang dengan rincian; laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang. Ada 12 orang lainnya berusia diatas 64 tahun yang tidak teridentifikasi ragam disabilitasnya. Jumlah anggota non Penyandang disabilitas/ Disabilitas ada 6 orang dengan rincian laki-laki 3 orang dan perempuan 3 orang.

2.10.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota PERSAMA MALAKA.

Gambaran pendidikan anggota yang tidak sekolah dan sudah tamat pendidikan belum dirincikan. Sedangkan Pengurus yang tamat SMA LB/SMK 1 orang perempuan dan pengurus yang tamat SD/SDLB 2 orang perempuan.

2.10.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota PERSAMA MALAKA

Penyandang disabilitas yang sudah bekerja laki-laki 3 orang dan perempuan 4 orang. Penyandang disabilitas yang belum bekerja dalam organisasi ada 133

orang masing-masing laki-laki sebanyak 72 orang dan perempuan 61 orang.

2.10.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di PERSAMA MALAKA

Potensi yang dimiliki PERSAMA Malaka yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Pertanian, Peternakan, Kerajinan Tangan, Penjahit, Menenun (Design Motif), Desain Grafis, Bengkel, Pertukangan, Salon, Fotografi, Komputer, Pegawai Swasta dan Lainnya: Honorer di Puskesmas dan Main Gitar saat Koor Gereja (Musik).



Yayasan Dola KoyaKoya

Jalan. Sam Ratulangi, RT.09/RW.04, Kelurahan
Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor

Kontak Telp/ WA : Ketua (Ell Asamau)
081353440315

Email : elyasasamau@gmail.com

Facebook : [dolakoyakoya](https://www.facebook.com/dolakoyakoya)

Website : www.dolakoyakoya.com

INFO@DOLAKOYAKOYA.COM

2.11. Yayasan Dola KoyaKoya (YDK) Kabupaten Alor

2.11.1 Legalitas dan sejarah singkat

Lembaga Dola Koyakoya (YDK) sudah terdaftar di Akta Notaris No. 2 tertanggal 8 April 2020, dan telah tercatat di Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0006585.AH.01.04. Tahun 2020. Yayasan Dola Koyakoya telah terbentuk pada Tahun 2010, Didirikan oleh Elyas Yohanis Asamau, S.IP,M.P.P. Alasan membentuk yayasan ini untuk berdirinya Yayasan Dola Koya koya atau yang disingkat YDK adalah memperluas area pelayanan program Pendidikan Luar Sekolah yang sudah dilaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Alor inda sejak Tahun 2010. PKBM Alor inda menjalankan tiga program utama yakni Kursus Bahasa Inggris, Pendidikan Kesetaraan, serta Taman Baca Masyarakat. Kegiatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah ini sebelumnya hanya berfokus di Kabupaten Alor, namun seiring banyaknya permintaan dari Kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur yang ingin juga dilayani. Kedepan, setiap kabupaten akan terlayani dengan kehadiran YDK.

Visi Yayasan Dola KoyaKoya adalah “Bebas dari stigma dan diskriminasi menuju kualitas hidup yang lebih layak”.

Misi Yayasan Dola Koya Koya: (1) Berjuang mengurangi angka Putus Sekolah melalui Program Belajar Kesetaraan, (2) Berjuang meningkatkan Jumlah Penerima Beasiswa melalui

program Kursus Bahasa Inggris dan Pojok Beasiswa, (3) Berjuang meningkatkan Literasi Warga Belajar melalui pendirian Taman Baca Masyarakat serta menyelenggarakan pekan membaca ceria bagi anak-anak, (4) Berjuang memberdayakan Warga Belajar melalui pendampingan kelompok, pendidikan dan pelatihan serta proyek-proyek mikro kredit, seperti: Kelompok usaha Bersama, Kelompok Swadaya Wanita, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi dan sebagainya, (5) Mendirikan Rumah Asuh bagi Warga Belajar agar bisa dilakukan pemusatan belajar, (6) Berjuang meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pembangunan sarana - prasarana kesehatan seperti : Poliklinik, Rumah Sakit, Program Gizi dan penanggulangan penyakit-penyakit seperti: Malaria, TBC, AIDS dan sebagainya, (7) Berjuang meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga miskin serta penderita kelainan fisik (Penyandang disabilitas) dan mental melalui proyek gizi, perawatan, serta pendidikan yang dilaksanakan dalam kerjasama dengan berbagai lembaga atau organisasi, (8) Berjuang mempererat kerukunan antar umat beragama melalui penggalakan dialog dan kerjasama antar agama dan kepercayaan, (9) Memulihkan kondisi korban bencana alam melalui pemberian bantuan darurat, pembangunan kembali rumah-rumah dan fasilitas publik yang rusak, pendampingan kelompok serta bantuan lainnya yang dianggap relevan, (10) Mempromosikan gerakan-gerakan penggalakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup untuk menghambat cepatnya

perubahan iklim (climate change), seperti melalui kegiatan penghijauan dan lain-lain.

2.11.2 Potret Pengurus /Anggota Yayasan Dola Koyakoya berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus 11 orang non disabilitas. Anggota sebanyak 2 orang perempuan yang merupakan Penyandang disabilitas sensorik Mental Usia Dewasa (18-64 Tahun). Jumlah pengurus non disabilitas ada 11 orang dengan rincian laki-laki 6 orang dan perempuan 5 orang.

2.11.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota Yayasan Dola Koyakoya.

Gambaran pendidikan anggota yang sudah tamat pendidikan SMA ada perempuan 2 orang. Sedangkan Pengurus yang tamat SMA 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, sedangkan pengurus yang tamat Sarjana Strata perempuan 1 orang dan laki-laki 2 orang dan pengurus yang tamat Sarjana Strata 2 laki-laki 1 orang.

2.11.4. Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota Yayasan Dola Koyakoya

Penyandang disabilitas yang belum bekerja perempuan 2 orang. Sedangkan pengurus yang sudah

bekerja masing-masing laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 5 orang.

2.11.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di Yayasan Dola Koyakoya

Potensi yang dimiliki Yayasan Dola Koyakoya yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Pertanian, Peternakan, Kerajinan Tangan, Menenun (Design Motif), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Wirausaha (Kios)



Persatuan Tuna Netra Indonesia

Jalan. Palapa No.8, Kelurahan Ngedukelu,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

Kontak Telp/ WA : Ketua

(Maria Elisabeth Tunga Toa) 081322402911

Email : elsatoa88@gmail.com

2.12 Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Ngada

2.12.1. Legalitas dan sejarah singkat

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) telah terdaftar di Notaris, Dinas Sosial dan Kesbangpol.

PERTUNI adalah organisasi kemasyarakatan tuna netra tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 di Surakarta. Hingga saat ini, PERTUNI telah memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pertuni cabang Ngada dibentuk pada tanggal 18 April 2019 melalui surat keputusan Ketua Pertuni daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertuni Cabang Ngada merupakan Unit Operasional organisasi tingkat Kabupaten yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh DPD Pertuni Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan program pelayanan dan memberikan perlindungan segala kepentingan para Penyandang disabilitas sensorik netra. PERTUNI Cabang Kabupaten Ngada, diketuai oleh Elsa Toa. PERTUNI Cabang Kabupaten Ngada sebagai organisasi kemasyarakatan Penyandang disabilitas sensorik netra senantiasa berupaya mengimplementasikan kegiatan - kegiatan yang telah diprogramkan demi kesejahteraan seluruh anggota PERTUNI Cabang Kabupaten Ngada. Alasan membentuk organisasi PERTUNI adalah agar Penyandang disabilitas sensorik Netra di Kabupaten Ngada bisa diperhatikan oleh Pemerintah dan masyarakat setempat.

Visi PERTUNI adalah “terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan”.

Misi PERTUNI: (1) Membangun Pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi sumberdaya manusia, dana, sarana maupun prasarana; (2) Melakukan advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan memastikan orang tunanetra mendapatkan hak asasinya; (3) Membangun kesadaran public mengenai hak ikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan dan bersikap positif serta suportif terhadap para tunanetra.

2.12.2 Potret Pengurus /Anggota Cabang Kabupaten Ngada berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus 6 orang dengan rincian 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anggota sebanyak 15 orang dengan rincian 6 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. Rincian Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik Penglihatan/ Disabilitas Netra Usia Anak (Kurang dari 12 tahun) Laki-laki sebanyak 2 orang dan 1 orang perempuan, Jumlah Penyandang disabilitas Sensorik Penglihatan/ Sensorik Netra Usia Dewasa (18-64 Tahun) laki-laki sebanyak 4 orang dan 3 orang perempuan. Jumlah pengurus non Penyan-

dang disabilitas/ Disabilitas ada 5 orang dengan rincian laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang.

2.12.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota Pertuni Cabang Ngada.

Gambaran pengurus/ anggota berdasarkan tingkat Pendidikan baik yang Belum sekolah, tidak sekolah, sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas yang tidak sekolah ada 2 orang diantaranya 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat SMA LB/ SMK ada 1 orang laki-laki. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat Diploma (D3) ada 1 orang Perempuan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat Sarjana Strata 1 sebanyak 1 orang laki-laki. Sedangkan untuk anggotanya belum semuanya dirincikan latar belakang pendidikannya.

2.12.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota Pertuni Cabang Ngada

Jumlah anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja ada 3 orang (laki-laki ada 1 orang, Perempuan ada 2 orang). Jumlah anggota Penyandang disabilitas belum bekerja dalam organisasi sebanyak 6 orang (laki-laki ada 4 orang dan Perempuan ada 2 orang).

2.12.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di Pertuni Cabang Ngada

Potensi yang dimiliki Pertuni Cabang Ngada yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Honorer, Pedagang dan Guru Ngaji



Persatuan Tuna Netra Indonesia

Jalan. Umbu Taranggaha No.04, RT 01/RW 03,
Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera,
Kabupaten Sumba Timur
Kontak Telp/ WA : Ketua
(Roberth Oktavianus riwu) 081339155377
Email : robertriwu74@gmail.com

2.13 Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Sumba Timur

2.13.1. Legalitas dan sejarah singkat

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) telah terdaftar di Notaris, Dinas Sosial dan Kesbangpol.

PERTUNI adalah organisasi kemasyarakatan tuna netra tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 di Surakarta. Hingga saat ini, PERTUNI telah memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pertuni cabang Sumba Timur dibentuk pada tanggal 26 sampai 28 Juli 2018 melalui proses musyawarah cabang Sumba Timur yang cukup panjang, PERTUNI cabang Sumba Timur sudah terdaftar di Kesbangpol SKT nomor: BKBP 210/40/VI/2019 . Pertuni Cabang Sumba Timur merupakan Unit Operasional organisasi tingkat Kabupaten yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh DPD Pertuni Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan program pelayanan dan memberikan perlindungan segala kepentingan para Penyandang disabilitas sensorik netra.

PERTUNI Cabang Kabupaten Sumba Timur, diketuai oleh Roberth Riwu. PERTUNI Cabang Kabupaten Sumba Timur sebagai organisasi kemasyarakatan Penyandang disabilitas sensorik netra senantiasa berupaya mengimplementasikan kegiatan - kegiatan yang telah diprogramkan demi kesejahteraan seluruh anggota PERTUNI Cabang

Kabupaten Sumba Timur. Alasan membentuk organisasi PERTUNI adalah wadah bagi penyandang Penyandang disabilitas netra untk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat untuk mengembangkan dirinya bahkan terlibat juga sebagai subjek pembangunan yang setara di Kabupaten Sumba Timur dlm memperjuangkan hak hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, informasi dan juga akses lain nya.

Visi PERTUNI adalah “terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan”.

Misi PERTUNI: (1) Membangun Pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi sumberdaya manusia, dana, sarana maupun prasarana; (2) Melakukan advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan memastikan orang tunanetra mendapatkan hak asasinya; (3) Membangun kesadaran public mengenai hak ikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan dan bersikap positif serta supportif terhadap para tunanetra.

2.13.2 Potret Pengurus /Anggota Cabang Kabupaten Sumba Timur berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus/ anggota 41 orang dengan rincian 21 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Rincian

Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik Penglihatan/ Disabilitas Netra Usia Anak (Kurang dari 12 tahun) Laki-laki 3 orang. Jumlah Penyandang disabilitas Sensorik Penglihatan/ Disabilitas Sensorik Netra Usia Dewasa (18-64 Tahun) laki-laki sebanyak 19 orang dan 11 orang perempuan. Jumlah Penyandang disabilitas Sensorik Penglihatan/Disabilitas Sensorik Netra Usia Lansia (Diatas 64 tahun) laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang. Jumlah pengurus non disabilitas ada 6 orang perempuan.

2.13.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota Pertuni Cabang Sumba Timur.

Gambaran pengurus/ anggota berdasarkan tingkat Pendidikan baik yang belum sekolah, tidak sekolah, sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat SD/SDLB ada 4 orang diantaranya 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas yang tamat SMP/SMPLB ada 2 orang laki-laki. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas yang tamat SMA LB/ SMK ada 2 orang laki-laki dan ada 10 orang perempuan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas yang tamat Sarjana Strata 2 ada 1 orang laki-laki, sedangkan untuk anggotanya belum semuanya dirincikan latar belakang pendidikannya.

2.13.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota Pertuni Cabang Sumba Timur

Jumlah anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja ada 4 orang (laki-laki ada 3 orang, Perempuan ada 1 orang). Jumlah anggota Penyandang disabilitas belum bekerja dalam organisasi sebanyak 26 orang (laki-laki ada 16 orang dan Perempuan ada 10 orang).

2.13.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di Pertuni Cabang Sumba Timur

Potensi yang dimiliki Pertuni Cabang Sumba Timur yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Pertanian, Peternakan, Kerajinan Tangan, Wirausaha (Kios) dan lainnya diantaranya Pijat.



PERTUNI Cabang Manggarai Barat

Kompleks SLB Negeri Komodo. Jalan Frans
Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
Labuan Bajo
Kontak Telp/ WA : Sekretaris (Anselmus G
Kartono) 081338425115
Email : anselkartono@gmail.com

2.14 Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Manggarai Barat

2.14.1 Legalitas dan sejarah singkat

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) telah terdaftar di Notaris, Dinas Sosial dan Kesbangpol.

PERTUNI adalah organisasi kemasyarakatan tuna netra tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 di Surakarta. Hingga saat ini, PERTUNI telah memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pertuni cabang Manggarai Barat dibentuk pada tanggal 10 Nopember 2020 melalui proses musyawarah cabang Manggarai Barat. Pertuni Cabang Manggarai Barat merupakan Unit Operasional organisasi tingkat Kabupaten yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh DPD Pertuni Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan program pelayanan dan memberikan perlindungan segala kepentingan para Penyandang disabilitas sensorik netra. PERTUNI Cabang Manggarai Barat. PERTUNI Cabang Manggarai Barat sebagai organisasi kemasyarakatan Penyandang disabilitas sensorik netra senantiasa berupaya mengimplementasikan kegiatan - kegiatan yang telah diprogramkan demi kesejahteraan seluruh anggota PERTUNI Cabang Manggarai Barat.

Alasan membentuk organisasi PERTUNI Untuk memperjuangkan hak dan kesempatan penyandang disabilitas Netra yang di Manggarai Barat.

Visi PERTUNI adalah “terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan”.

Misi PERTUNI: (1) Membangun Pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi sumberdaya manusia, dana, sarana maupun prasarana; (2) Melakukan advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan memastikan orang tunanetra mendapatkan hak asasinya; (3) Membangun kesadaran public mengenai hak ikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan dan bersikap positif serta supportif terhadap para tunanetra.

2.14.2 Potret Pengurus /Anggota Cabang Manggarai Barat berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus/anggota 15 orang dengan rincian 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, Relawan 3 orang dengan Rincian 1 laki-laki dan 2 perempuan. Rincian Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik Penglihatan/ Netra Usia Anak (Kurang dari 12 tahun) Dengan Jumlah 3 orang, Rincian Laki-laki 1 orang dan perempuan 2 orang, Jumlah Penyandang disabilitas Sensorik Penglihatan/ Netra Usia Dewasa (18-64 Tahun) laki-laki sebanyak 9 orang dan 3 orang perempuan. Jumlah pengurus non disabilitas ada 3

orang dengan rincian perempuan 2 orang dan laki-laki 1 orang.

2.14.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota Pertuni Cabang Manggarai Barat

Gambaran pengurus/ anggota berdasarkan tingkat Pendidikan baik yang Belum sekolah, tidak sekolah, sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas yang masih menempuh SD/SD LB ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.

Jumlah Pengurus/anggota yang Tidak tamat SDLB/SD dengan rincian 8 orang laki-laki. Jumlah pengurus/Anggota yang masih menempuh SMP LB/SMP 1 orang laki-laki. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas yang tamat SMA LB/ SMK ada 2 orang laki-laki dan ada 3 orang perempuan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas yang tamat Sarjana Strata 1 ada 1 orang laki-laki.

2.14.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota Pertuni Cabang Manggarai Barat

Jumlah anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja ada 12 orang (laki-laki ada 9 orang, Perempuan ada 3 orang). Jumlah anggota Penyandang disabilitas belum bekerja dalam organisasi sebanyak 3 orang (laki-laki ada 1 orang dan Perempuan ada 2 orang karena masih menempuh pendidikan).

2.14.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di Pertuni Cabang Manggarai Barat

Potensi yang dimiliki Pertuni Cabang Manggarai Barat yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Pertanian, Peternakan, Wirausaha (Kios) dan lainnya diantaranya Pijat.



Indonesia PERTUNI Cabang Manggarai

Jalan Nasution No.1, Kelurahan Tenda,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai.

Kontak Telp/ WA : Ketua (Sabinus Ngadu,S.Pd)
081236500799

Email : pertuniruteng@gmail.com

2.15 Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Manggarai

2.15.1 Legalitas dan sejarah singkat

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) telah terdaftar di Notaris, Dinas Sosial dan Kesbangpol.

PERTUNI adalah organisasi kemasyarakatan tuna netra tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 di Surakarta. Hingga saat ini, PERTUNI telah memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pertuni cabang Manggarai dibentuk pada Tahun 2011 dan Sudah terdaftar di Dinas Sosial dan Kesbangpol Kabupaten Manggarai. Pertuni Cabang Manggarai merupakan Unit Operasional organisasi tingkat Kabupaten yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh DPD Pertuni Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan program pelayanan dan memberikan perlindungan segala kepentingan para Penyandang disabilitas sensorik netra. PERTUNI Cabang Manggarai di ketuai oleh Bapak. Agustinus Nogo, S.Pd. Organisasi PERTUNI Kabupaten.

Manggarai di dasarkan atas keinginan dan kesadaran teman-teman disabilitas netra di Manggarai untuk membangun kesatuan yang dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan saling membantu antar sesama disabilitas. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah membangun hubungan antara organisasi dengan pemerintah daerah melalui advokasi-advokasi di lembaga-

lembaga pemerintahan dan swasta lainnya. Dengan membangun rasa kekeluargaan. Kemudian pada tahun 2016 dilaksanakan Musyawarah Cabang I yang dilaksanakan di Ruteng, yang kemudian terpilihnya Bpk. Sabinus Ngadu, S.Pd sebagai ketua yang baru untuk menjalankan Visi dan Misi organisasi. Kemudian dari itu organisasi PERTUNI Kabupaten Manggarai juga menjalin hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang terdapat di Manggarai khususnya Ruteng. Ada beberapa prestasi yang telah diperoleh oleh PERTUNI Kabupaten Manggarai adalah terwujudnya PERDA No. 6 tahun 2015 tentang kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, selain hal tersebut Organisasi PERTUNI Kabupaten Manggarai juga melibatkan secara aktif seluruh anggota untuk mensosialisasikan keberadaan disabilitas melalui Paduan-Paduan Suara yang dilakukan di berbagai tempat di Manggarai.

PERTUNI Cabang Manggarai sebagai organisasi kemasyarakatan Penyandang disabilitas sensorik netra senantiasa berupaya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan demi kesejahteraan seluruh anggota PERTUNI Cabang Manggarai. Alasan membentuk organisasi PERTUNI Manggarai untuk mewujudkan keadaan yang kondusif bagi Penyandang disabilitas Sensorik Netra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga Negara Indonesia yang cerdas, Mandiri, dan Produktif, tanpa adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Visi PERTUNI adalah “terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan”.

Misi PERTUNI: (1) Membangun Pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi sumberdaya manusia, dana, sarana maupun prasarana; (2) Melakukan advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan memastikan orang tunanetra mendapatkan hak asasinya; (3) Membangun kesadaran public mengenai hak ikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan dan bersikap positif serta supportif terhadap para tunanetra.

2.15.2 Potret Pengurus /Anggota Cabang Manggarai berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus 4 (laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang). Jumlah anggota 45 orang dengan rincian 26 orang laki-laki dan 19 orang perempuan, Jumlah Relawan yang non Penyandang disabilitas 7 orang dengan Rincian 3 laki-laki dan 4 perempuan. Rincian Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik Penglihatan/ Netra Usia Remaja (13-17 tahun) Dengan Jumlah 6 orang, Rincian Laki-laki 3 orang dan perempuan 3 orang, Jumlah Penyandang disabilitas Sensorik Penglihatan/Netra Usia Dewasa (18-64

Tahun) sebanyak 39 orang, Rincian jumlah 16 orang perempuan dan laki-laki ada 23 orang).

2.15.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota Pertuni Cabang Manggarai

Gambaran pengurus/ anggota berdasarkan tingkat Pendidikan baik yang Belum sekolah, tidak sekolah, sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan. Jumlah Anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang sudah Tamat SD/SD LB ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Jumlah Anggota yang tamat SMP LB/SMP ada 3 (laki-laki 1 orang dan perempuan ada 2 orang). Jumlah Anggota yang masih menempuh SMP LB/SMP 6 (3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan). Jumlah Anggota Penyandang disabilitas/ disabilitas yang tamat SMA LB/ SMK ada 7 orang (laki-laki 4 dan ada 3 orang perempuan). Jumlah Anggota yang menempuh Sarjana Strata 1 ada 11 orang (laki-laki 6 orang dan perempuan ada 5 orang), Jumlah pengurus/ Anggota yang tamat Sarjana Strata 1 ada 15 orang (laki-laki 11 orang dan perempuan ada 4 orang).

2.15.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota Pertuni Cabang Manggarai

Jumlah pengurus yang sudah bekerja 4 orang dengan Rincian Perempuan 4 dan laki-laki 2 orang, sedangkan Anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja ada 15 orang (laki-laki ada 9 orang, Per-

empuan ada 5 orang). Jumlah anggota Penyandang disabilitas belum bekerja dalam organisasi sebanyak 35 orang (laki-laki ada 20 orang dan Perempuan ada 15 orang).

2.15.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di Pertuni Cabang Manggarai

Potensi yang dimiliki Pertuni Cabang Manggarai yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Kerajinan Tangan, Kuliner, Komputer, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, Wirausaha (Kios) dan lainnya antara lain Paduan Suara, Ketrampilan Pijat, Olahraga, Pengajar, Pemusik dan Penyanyi.



National Paralympic Committee

Jalan Banteng Nomor 07, Jalan Banteng Nomor
07, RT 20/RW 4, Kelurahan Nunleu, Kecamatan
Kota Raja, Kota Kupang, NTT
Kontak Telp/ WA : Ketua (Viktor H Haning)
082147358817
Email : Nusa Tenggara Timurnpc@gmail.com

2.16 National Paralympic Committee (NPC) Nusa Tenggara Timur

2.16.1 Legalitas dan sejarah singkat

National Paralimpic Committee Pusat Telah terdaftar di Notaris, Dinas Sosial dan Kesbangpol.

Organisasi olahraga disabilitas didirikan pada tanggal 31 Oktober 1962 dengan Akta notaris Nomor 71, tanggal 31 Oktober 1962. Organisasi ini diberi nama Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC). Pada Musornas YPOC ke VII tanggal 31 Oktober - 1 November 1993 di Yogyakarta telah diputuskan perubahan nama organisasi menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC), dengan perubahan Akta Notaris nomor 15, tanggal 15 Desember 1993. Pada tanggal 18 November 2005 dalam pertemuan General Assembly IPC telah diputuskan bahwa gerakan dan kegiatan olahraga penyandang disabilitas harus menggunakan kata 'paralympic', karena semua olahraga yang dinaungi IPC adalah olahraga prestasi (bukan lagi olahraga rehabilitasi maupun olahraga rekreasi). Sejalan dengan keputusan tersebut, negara-negara anggota IPC wajib mencantumkan kata 'paralympic' pada nama organisasinya.

Pada tanggal 27 - 28 Juli 2010 diadakan Musornaslub BPOC tentang perubahan nama organisasi, dan dalam Musornaslub yang diselenggarakan di Solo tersebut, menghasilkan keputusan perubahan nama organisasi dari Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) menjadi National Paralympic Committee (NPC), dengan diikuti

perubahan Akta Notaris Nomor 32 tanggal 30 Agustus 2010.

National Paralympic Committee Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah organisasi kemasyarakatan bagi Penyandang disabilitas yang memiliki hobby dalam bidang olahraga. Hingga saat ini, National Paralympic Committee telah memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

National Paralympic Committee NTT dibentuk dari tahun 2002 oleh National Paralympic Committee Pusat sebagai Wadah Organisasi Pembina Olahraga Prestasi Penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur, NPC setara dengan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Untuk Non Penyandang disabilitas dan NPC NTT kedepan akan membentuk NPC di Kabupaten dan Kota seluruh Nusa Tenggara Timur dan National Paralympic Committee Cabang NTT belum terdaftar di Notaris, Dinas Sosial dan Kesbang-pol.

National Paralympic Committee (NPC) NTT di ketuai oleh Bapak. Viktor Haning dari tahun 2015 sampai sekarang. NPC NTT sebagai organisasi kemasyarakatan Penyandang disabilitas, senantiasa berupaya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan demi kesejahteraan seluruh Penyandang disabilitas dalam bidang Olahraga. Alasan membentuk NPC NTT agar dapat merekrut, melatih dan membina Olahraga Disabilitas di Nusa Tenggara Timur.

Visi National Paralympic Committee (NPC) NTT adalah “Memperjuangkan Kesetaraan Penyandang disabilitas dalam Bidang Olahraga”.

Misi National Paralympic Committee: Berjuang, Semangat pantang menyerah untuk meraih Prestasi

2.16.2 Potret Pengurus /Anggota National Paralympic Committee (NPC) NTT berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus 11 orang (laki-laki 7 orang dan perempuan 4 orang). Sedangkan Jumlah anggota belum dirincikan dengan baik. Rincian Jumlah pengurus Penyandang disabilitas sensorik Penglihatan/ Disabilitas Netra Usia Dewasa (18-64 tahun) 2 orang, Jumlah Penyandang disabilitas fisik/ Disabilitas fisik Usia Dewasa (18-64 Tahun) sebanyak 2 orang. Tujuh lainnya non disabilitas. Organisasi ini belum merincikan anggotanya berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin karena yang gabung di NPC dari beberapa organisasi yang ada di Kota Kupang.

2.16.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota National Paralympic Committee (NPC) NUSA TENGGARA TIMUR

Gambaran pengurus/ anggota berdasarkan tingkat Pendidikan baik yang belum sekolah, tidak sekolah, sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan. Jumlah pengurus/Anggota yang tamat

Sarjana Strata 1 ada 6 orang (laki-laki 5 orang dan perempuan ada 1 orang).

2.16.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota National Paralympic Committee (NPC) NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah pengurus/anggota yang sudah bekerja 5 orang dengan Rincian Perempuan 2 dan laki-laki 3 orang, sedangkan Anggota Penyandang disabilitas yang sudah bekerja ada 6 orang.

2.16.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di National Paralympic Committee (NPC) NUSA TENGGARA TIMUR

Potensi yang dimiliki National Paralympic Committee yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, dan lainnya antara lain Swasta.



Alamat Yayasan Kita Keluarga Insani

Jalan Woloare B, Lingkungan Kazoza, RT
007/RW 007, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan
Ende Utara kabupaten Ende.

Kontak Telp/ WA : Pendamping (Avent Saur)
085239603323

Email : aventsaur@yahoo.co.id

Facebook: Kelompok Kasih Insanis
(Relawan Peduli ODJG Prov NTT)

Youtube : Kasih Insanis Channel

2.17 Yayasan Kita Keluarga Insani

2.17.1 Legalitas dan sejarah singkat

Yayasan Kita Keluarga Insani didirikan oleh Welmince H.O. Ie Anggo dan Sudrasman Arifin Nuh pada tanggal 4 februari 2020 dan sudah terdaftar di akta notaris dengan Akta notaris AHU-0002948.AH.01.12.Tahun 2020 Tanggal 04 Februari 2020, Yayasan ini dimulai dari gerakan relawan Kelompok Kasih Insani Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kini relawan Komunitas Kasih Insani tersebar di belasan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alasan membentuk Yayasan Kita Keluarga Insani karena banyak penderita gangguan jiwa di Nusa Tenggara Timur yang belum diperhatikan dalam pelbagai aspek.

Visi Yayasan Kita Keluarga Insani adalah “Manusia bebas diskriminasi dan stigma”.

Misi Yayasan Kita Keluarga Insani: Membebaskan penderita gangguan jiwa dari diskriminasi dan stigma serta memberdayakan penderita sebagai pribadi bermartabat

Rencana Strategis “Membongkar dan mengendalikan pemasungan, membongkar stigma, memberdayakan penderita, mengedukasi masyarakat, dan mengadvokasi kepentingan” penderita.

2.17.2 Potret Pengurus /Anggota Yayasan Kita Keluarga Insani berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus 3 orang (Laki-laki 2 orang dan 1 orang perempuan). Organisasi Ini tidak mengkategorikan Anggota berdasarkan Ragam Disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

2.17.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota Yayasan Kita Keluarga Insani

Organisasi ini tidak mengkategorikan berdasarkan latar belakang Pendidikan pengurus dan Anggota.

2.17.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota Yayasan Kita Keluarga Insani

Organisasi ini tidak mengkategorikan berdasarkan Pekerjaan Pengurus dan anggota.

2.17.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di Yayasan Kita Keluarga Insani

Potensi yang dimiliki Yayasan Kita Keluarga Insani yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Pertanian (lahan pertanian bervariasi menurut kepemilikan Orang Dengan Gangguan Jiwa), Peternakan, Penjahit, Bengkel, Wartawan, Pertukangan, Fotografi, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta dan Wirausaha (kios).



Kumpulan Penyandang Disabilitas

Jalan Pramuka, RT 017/RW 006, Kelurahan Bei
Rafu, Kecamatan Atambua Barat
Kabupaten Belu

Kontak Telp/ WA : Ketua (Samuel)

081328499183,081238924105

Email :kumpesaraibelu2019@gmail.com

2.18 Kumpulan Penyandang Disabilitas (KUMPESA) Rai Belu

2.18.1 Legalitas dan sejarah singkat

Kumpesa Rai Belu didirikan pada tahun 2019 oleh 13 orang Penyandang disabilitas yang ada di Belu diantaranya (1 orang laki-laki Penyandang disabilitas Sensorik Netra) dan 12 orang Penyandang disabilitas fisik (6 perempuan, Penyandang disabilitas fisik dan 6 laki-laki Penyandang disabilitas fisik), Sementara sedang diproses No. Akta Notarisnya di Kantor Akta Notaris. Alasan membentuk Kumpesa Rai Belu agar Pemerintah dan Masyarakat tidak memandang Penyandang disabilitas dengan sebelah, memperjuangkan hak-hak Penyandang disabilitas dalam semua lintas sektor.

Visi Kumpesa Rai Belu adalah “bebas dari stigma dan diskriminasi menuju kualitas hidup yang layak dengan mendapatkan pengakuan dalam berpartisipasi aktif bermasyarakat”.

Misi Kumpesa Rai Belu: meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian serta partisipasi aktif penyandang disabilitas di masyarakat.

2.18.2 Potret Pengurus /Anggota KUMPESA RAI BELU berdasarkan ragam disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin.

Jumlah pengurus 4 orang (Laki-laki 3 orang dan 1 orang perempuan). Dan jumlah anggota sebanyak 97 orang (laki-laki sebanyak 57 orang dan perempuan

sebanyak 44 orang. Anggota berdasarkan Ragam Disabilitas, ragam usia dan jenis kelamin. Jumlah anggota Penyandang disabilitas sensorik penglihatan/ Disabilitas sensorik netra Usia Dewasa (18-64 Tahun) 2 Orang laki-laki. Jumlah anggota Penyandang disabilitas Fisik/ Disabilitas Fisik Usia Anak (Kurang dari 12 Tahun) 6 Orang (3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan). Jumlah anggota Penyandang disabilitas Fisik/ Disabilitas Fisik Usia Remaja (13 - 17 Tahun) 5 Orang (3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki). Jumlah anggota Penyandang disabilitas Fisik/ Disabilitas Fisik Usia Dewasa (18-64 Tahun) 77 Orang dengan rincian laki-laki sebanyak 42 orang dan perempuan sebanyak 35 orang. Jumlah anggota Penyandang disabilitas Fisik/ Disabilitas Fisik Usia lansia (Diatas 64 tahun) 3 Orang (2 orang perempuan dan ada 1 orang laki-laki). Jumlah anggota Penyandang disabilitas/Disabilitas Intelektual Usia Dewasa (18-64 Tahun) sebanyak 3 orang perempuan. Jumlah anggota Penyandang disabilitas/ Disabilitas Psikososial Usia Dewasa (18-64 Tahun) 1 perempuan.

2.18.3 Potret latar belakang pendidikan pengurus/ anggota KUMPESA RAI BELU

Gambaran pengurus berdasarkan tingkat Pendidikan baik yang Belum sekolah, tidak sekolah, sudah tamat maupun yang masih menempuh Pendidikan. Jumlah Pengurus Penyandang disabilitas yang tamat SMA LB/ SMK sebanyak 3 orang diantara 2 perempuan dan 1 laki-laki. Jumlah pengurus yang tamat Sarjana Strata 1 ada orang laki-laki. Sedangkan

anggota-anggotanya belum dirincikan berdasarkan tingkat pendidikan.

2.18.4 Potret Pengurus/ Anggota berdasarkan pekerjaan Pengurus/ Anggota KUMPESA RAI BELU

Jumlah pengurus/anggota yang sudah bekerja 73 orang dengan Rincian Perempuan sebanyak 33 orang dan laki-laki sebanyak 40 orang. Sedang Penyandang disabilitas yang belum bekerja laki-laki sebanyak 21 orang dan perempuan ada 7 orang.

2.18.5 Potensi/ Ketrampilan yang ada di KUMPESA RAI BELU

Potensi yang dimiliki Kumpesa Rai Belu yang perlu mendapatkan dukungan antara lain Pertanian, Peternakan, kerajinan tangan, Kuliner, Designer Pakaian, Penjahit, Menenun (Design Motif), Desai Grafis, Bengkel, Pertukangan, Salon, Komputer, Servis Elektronik, Wirausaha (kios). Dan lainnya diantaranya: Tenaga Kontrak.

BAB III PENGALAMAN ORGANISASI

Dalam bab ini, selain pengalaman, kemitraan dan kerjasama dalam berorganisasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi disabilitas di NTT, juga digambarkan partisipasi organisasi disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dan aksesibilitas terhadap fasilitas publik ramah disabilitas, dokumen perencanaan dan bantuan sosial. Pertama, penting untuk melihat pengalaman dan kemampuan membangun jaringan dari setiap organisasi agar bisa memetakan potensi untuk bisa terus mengembangkan jaringan maupun perlu mendorong atau menjembatani organisasi difabel yang belum mampu membangun jaringan advokasi hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, ini akan memberikan potret Lembaga-lembaga mana saja yang selama ini memberikan dukungan bagi peregerakan dan upaya memajukan organisasi penyandang disabilitas baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kedua, memotret keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan menjadi dasar utama agar ke depan bisa melakukan monitoring yang lebih terstruktur guna memastikan penyandang disabilitas terlibat aktif sebagai warga negara dalam kegiatan-kegiatan perencanaan di berbagai level baik desa, kecamatan, Kabupaten dan Provinsi NTT. Selain itu, juga membidik organisasi yang belum aktif terlibat atau bahkan sama sekali be-

lum tahu bagaimana dan pentingnya terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Harapannya organisasi difabel di NTT yang belum terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dapat terlibat mulai dari tahapan pra MUSRENBANG baik di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota dan provinsi sehingga penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan melainkan dapat terlibat secara maksimal sebagai subjek pembangunan, dimana

Musrenbang merupakan forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat sesuai amanat pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga mendorong keterlibatan aktif difabel secara penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Ditambah lagi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ini adalah jaminan negara untuk mendorong pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan-kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan. Ketiga, informasi mengenai akses terhadap pelayanan publik yang ada di daerah masing-masing sangat diperlukan untuk bisa mengetahui sejauhmana daerah memberikan ruang publik yang akses dan aman bagi semua orang

termasuk penyandang disabilitas. Tidak hanya itu saja, hal ini menjadi penting untuk menjadikan alat bukti untuk terus mengadvokasi bangunan publik yang ramah untuk semua orang di masing-masing kabupaten/ kota. Keempat, Kemampuan organisasi penyandang disabilitas untuk mengakses dokumen perencanaan. Poin utama mengapa ini penting adalah agar memastikan semua orang mendapatkan akomodasi yang layak dalam mengakses informasi yang setara, misalnya dokumen baik berupa hard copy, soft copy yang akses bagi disabilitas sensorik Netra serta juru Bahasa isyarat dalam setiap pertemuan-pertemuan untuk menjelaskan dengan mudah bagi rekan-rekan Tuli. Kelima, informasi terkait bantuan sosial dari pemerintah dan *stakeholders* lainnya juga diharapkan dapat diakses dengan baik, sehingga para penyandang disabilitas dapat menerima bantuan sosial tersebut dan secara tidak langsung dapat meminimalisir masalah kemiskinan di NTT. Mekanisme dalam mendistribusikan bantuan juga menjadi catatan penting selama pandemi agar memastikan penyandang disabilitas bisa mengakses dengan mudah dan aman. Semakin terlibat maka penyandang disabilitas akan semakin paham hak-haknya dan mempercepat proses penyadaran bagi masyarakat bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Catatan ini akan bermanfaat bagi pemerintah untuk bisa menemukan mitra strategis dalam upaya pembangunan yang tidak melupakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Ini juga akan menjadi cermin bagi pemerintah untuk melihat sejauh-

hmana pelayanan yang diberikan bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Selain itu, potret ini bisa menjadi cambuk atau penyemangat pemerintah untuk terus berupaya membangun kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas, dan bersama-sama melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan prima bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah bisa menjadikan informasi sebagai acuan untuk Menyusun berbagai program yang inklusi dengan melibatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas yang juga merupakan subyek pembangunan.

Informasi dalam bab ini ini juga akan bermanfaat bagi mitra pembangunan yang ingin bekerjasama dalam upaya mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun peraturan-peraturan, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di NTT maupun upaya berkontribusi mewujudkan Rencana Induk Penyandang Disabilitas Nasional.

Selanjutnya, secara rinci dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini:

1. GARAMIN NTT

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<ul style="list-style-type: none">- Bersama organisasi disabilitas lainnya yaitu PERTUNI Provinsi NTT, PERTUNI Kota Kupang, PERMATA NTT, KTK, YTTM, FORSADIKA, KIPDA Soe, NPC, KUMPESA, KKI dan PERSAMA melakukan pendidikan publik terkait	<ul style="list-style-type: none">- Mengikuti Musrenbang tingkat desa, kelurahan dan kecamatan sebagai organisasi Difabel.- Membantu Bappelitbangda untuk mengkoordinir organisasi difabel lainnya melalui WA grup untuk membantu penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none">- Beberapa fasilitas publik ramah disabilitas sudah ditempatkan di kota kupang yang menjadi wilayah kerja GARAMIN NTT yaitu Sebagian kantor pemerintah seperti Kantor Gubernur, Kantor Kemenkumham, Pengadilan Tinggi Negeri, Puskesmas di Kota Kupang, Kan-

<p>dengan sistem pendataan difabel dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama organisasi disabilitas di luar NTT yaitu SIGAB Indonesia, Yayasan SAPDA, PUSPADI Bali, PERDIK dan LIDI FOUNDATION melakukan penguatan kapasitas sumber daya lembaga, riset anatomi perempuan difabel dan sebagai koordinator wilayah (NTT, NTB dan Bali) survey dampak covid terhadap penyandang 	<p>mengikuti Musrenbang Provinsi NTT secara virtual 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlibat dalam musrenbang desa khusus kelompok rentan termasuk difabel dan terlibat aktif di pemetaan kebutuhan kelompok dan perengkian prioritas kebutuhan untuk dimasukan dalam program prioritas pemerintah - Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya alokasi anggaran bagi kaum disabilitas. Bantuan yang diberikan pemerintah desa masih berupa spontan- 	<p>tor Lurah Oebobo, Nunbaun Sabu, Kantor camat Oebobo, Kantor Desa Oelomin dan Gereja Paulus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RPJM baik Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi dapat diakses dari pendamping desa dalam bentuk hard copy tetapi perlu soft copy dalam bentuk file word agar bisa dibaca <i>screen reader/</i> pembaca layer bagi orang dengan hambatan melihat. - Informasi terkait bantuan dari pemerintah/ LSM/NGO/Lembaga Agama/ Pihak swasta seperti bantuan sosial atau bantuan
---	---	---

<p>disabilitas (https://ncovid19.sigab.or.id/2020/06/09/yang-bergerak-dan-yang-terdampak-di-masa-pandemi-suara-disabilitas-dari-indonesia/) di tiga puluh empat provinsi di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama organisasi non disabilitas yaitu Bengkel APPEK, CIS Timor, PIAR, IRGSC, Yayasan Bahtera, YASALTI, Sanggar Suara Perempuan, Rumah Harapan GMIT, Yayasan Pijar Timur Indonesia, PIKUL, Yayasan Tanpa 	<p>itas membuat bidang miring di kantor desa dan belum masuk dalam perencanaan desa saat ini. Namun tahun depan akan dimasukkan dalam perencanaan desa.</p>	<p>Jaring Pengaman Sosial (JPS) dapat diakses dengan baik melalui pemerintah setempat, website resmi bantuan sosial kota kupang, surat edaran, poster, dan media sosial. Sejauh ini terdapat lima orang anggota GARAMIN NTT yang mendapat bantuan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan informasi beasiswa oleh kampus hendaknya dibuat di ruang yang aksesibel dan bisa mudah dijangkau penyandang disabilitas - Perlu ada sosialisasi informasi beasiswa bagi organisasi-organisasi penyandang
--	---	---

<p>Batas, Yayasan KuanMnasi, SNV, NRL, Yayasan Alfa Omega, Caritas, Humanity Inclusion, PLAN, WVI, IOM, UNICEF dan Save The Children melakukan riset perubahan iklim, advokasi sanitasi inklusi dan sarana air bersih, pemberdayaan ekonomi kaum difabel, <i>Global Migration Film Festival GMFF</i>, kelas memasak inklusif, bincang-bincang upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan difabel, layanan akta kelahiran bagi anak-</p>		<p>dang disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu mendorong lahir kelompok-kelompok penyandang disabilitas di desa-desa di NTT - Desa Inklusi menjadi salah satu cara untuk mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di desa-desa.
--	--	--

<p>anak difabel yang belum memiliki akta dan tergabung dalam forum tanggap covid inklusi NTT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama Pemerintah yaitu BAPPELITBANGDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, Dinas Sosial Kota Kupang, BPS Provinsi NTT, Dinkes Kota Kupang, Ombudsman NTT, DPRD NTT, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Staf Khusus Presiden melaksanakan diskusi terkait data difabel di NTT, 		
--	--	--

<p>pelatihan pembuatan hand sanitizer, diskusi akses layanan publik, webinar diseminasi hasil kajian cepat dampak covid terhadap kaum difabel, perkenalan organisasi GARAMIN NTT Kepada DPRD NTT dan pemutaran film “Sejauh Ku Melangkah”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama Forum Peduli Disabilitas yaitu kerjasama dalam forum tanggap inklusi di bidang sharing informasi COVID-19 - Sosialisasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), <i>Aus-</i> 		
---	--	--

<p><i>tralian Award Scholarship (AAS) dan English Language Training Assistance (ELTA) bagi penyandang difabel di NTT dimana beasiswa-beasiswa tersebut juga terdapat kuota tersendiri bagi penyandang disabilitas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginisiasi terbentuknya kelompok difabel di desa Oelomin, Kabupaten Kupang, NTT - Bersama media yaitu Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kupang, Jurnalis Online Indonesia (JOIN) NTT, Ikatan Wartawan Online (IWO) NTT, ABC 		
---	--	--

<p>News, TIMEX Kupang, Pos Kupang, Victory News dan Koran Tempo dalam mempublikasi kegiatan-kegiatan GARAMIN NTT agar dapat diketahui oleh masyarakat luas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan lembaga agama rumah harapan GMT yaitu bincang santai 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan - Kerja sama dengan SIGAB Indonesia membuat kelas singkat Desa inklusi 5 Kabupaten (Kupang, TTS, Malaka, Sikka dan Sumba Timur) 		
---	--	--

2. FORUM BELARASA DIFABEL NIAN SIKKA (FORSADIKA)

<p>PENGALAMAN ORGANISASI</p>	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN</p>	<p>AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Bersama organisasi disabilitas di NTT yaitu PERSANI NTT dan GARAMIN NTT dalam rangka koordinasi, komunikasi dan konsultasi terkait kegiatan difabel tingkat kabupaten, provinsi dan nasional - Bersama organisasi disabilitas di luar NTT yaitu 	<p>Mengikuti Musrenbang tingkat desa dan kelurahan sebagai organisasi difabel, namun belum terlibat aktif karena koordinasi dengan pemerintah belum berjalan maksimal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas publik yang ramah disabilitas dapat diakses dengan baik di beberapa Gereja, Puskesmas, Bank dan KPP Pratama Kabupaten Sikka - Terhadap dokumen perencanaan baik RPJMN Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi belum bisa diakses dengan baik karena

<p>SIGAB Indonesia, Yayasan SAPDA dan PUSPADI Bali dalam melaksanakan seminar virtual terkait pembuatan kaki palsu dan kursi roda serta mendorong terbentuknya unit layanan disabilitas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama organisasi non disabilitas, CARITAS dalam melakukan pendampingan dan advokasi peningkatan kapasitas lembaga serta pengembangan jaringan kemitraan - Bersama Bank NTT dan Bank BRI melakukan 		<p>komunikasi dengan pemerintah belum dibangun dengan baik dan rutin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi terkait bantuan sosial dapat diakses dengan baik melalui media sosial, surat edaran dan poster. Terdapat anggota FOR-SADIKKA yang mendapat bantuan sosial dimaksud dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> 1. PKH : 10 2. BLT : 100 3. BST : 50 4. KIS : 100 5. Selanjutnya juga dianggarkan kurang lebih 50 juta rupiah dari dana desa untuk penyandang disabilitas dan
---	--	--

<p>kampanye hak-hak difabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama Forum Peduli Disabilitas melaksanakan seminar pemenuhan hak-hak difabel - Pelatihan kewirausahaan secara virtual dengan Perkumpulan Peduli penyandang Disabilitas (PERPED) - Workshop penguatan kapasitas unit layanan disabilitas bersama BPBD Kabupaten Sikka. 		<p>anggaran tersebut telah digunakan untuk untuk pelatihan dan pemberdayaan bagi kelompok difabel</p>
--	--	---

3. PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI) CABANG KOTA KUPANG

<p>PENGALAMAN ORGANISASI</p>	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN</p>	<p>AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>- Bersama Organisasi Disabilitas di NTT dan diluar NTT yaitu PERTUNI prov, Pertuni Kab Kupang, Persani, Garamin, Yayasan tanpa batas, PLAN, WVI, Pikul dan IOM dalam melaksanakan pelatihan dan workshop tentang tantangan dan strategi dalam perkuliahan bagi difabel</p>	<p>Organisasi PERTUNI Kota Kupang, mengikuti Musrenbang tetapi sebagai individu dan bukan sebagai organisasi difabel, namun tidak terlibat secara aktif dengan alasan sungkan untuk berbicara dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat.</p>	<p>- Terhadap fasilitas publik ramah disabilitas dapat diakses di Puskesmas oebobo, Kota Kupang</p> <p>- Terkait akses terhadap dokumen perencanaan, kaum difabel pada PERTUNI Kota Kupang tidak dapat mengakses karena dokumen tersebut dalam bentuk hard</p>

<p>netra di kampus Akademi Pekerjaan Sosial Kupang Bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota Kupang menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Penyandang disabilitas serta merekomendasikan anggota pertuni yang layak mendapatkan bantuan sosial.</p> <p>Bersama Forum Peduli Disabilitas dalam kerjasama dalam forum tanggap inklusi di bidang sharing informasi covid-19.</p>		<p>copy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi bantuan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, Alat Bantu, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indoensia Sehat dan bantuan lainnya sudah diperoleh dari Pemerintah setempat, media sosial, keluarga dan teman. Namun, hingga saat ini, PERTUNI Kota Kupang belum menerima bantuan karena kendala administrasi dan koordinasi dengan pihak terkait yang belum maksimal.
---	--	--

4. PELITA HARAPAN DISABILITIES FLOBAMORA (PHDF)

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<ul style="list-style-type: none"> - Bersama organisasi disabilitas di luar NTT yaitu PPDI NTT dan SIGAB Indonesia melakukan Advokasi dan Temu inklusi tahun 2018 di Gunung Kidul, Jogja - Pelatihan guru-guru SLB dan guru sekolah inklusi bekerjasama 	<p>Pelita Harapan Disabilitas Flobamora telah ikut berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat provinsi sebagai kader difabel dan ikut memberikan pendapat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait fasilitas publik ramah disabilitas, berdasarkan pengalaman, kaum difabel Pelita Harapan Disabilitas Flobamora tidak dapat mengakses aula Gubernur - Terkait dokumen perencanaan baik RPJM Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan Provinsi, tidak dapat diakses dengan alasan doku-

<p>dengan <i>Netherlands Leprosy Relief</i> (NRL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seminar dan pertemuan dengan Pusat Pelatihan Anak (PPA) Pohonitas Alak terkait pembelajaran mentor PPA baik secara teori maupun praktek tentang metode pembelajaran bagi beberapa anak berkebutuhan khusus di PPA. - Bersama ROTARACK TEAM/HAND FORTUNA melaksanakan beberapa kegiatan antara lain kegiatan kemanusiaan taman baca 		<p>men tersebut tidak dibagikan ke publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait informasi bantuan sosial, dapat diperoleh melalui media sosial yaitu WA, dan beberapa anak binaan PHDF mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
---	--	---

<p>inklusi dan pembagian sembako, pendampingan dalam pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Ibu dan Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pelatihan tanggap bencana bagi kaum disabilitas tahun 2018.</p>		
---	--	--

5. PERHIMPUNAN MANDIRI KUSTA (PERMATA)

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<ul style="list-style-type: none">- Bersama organisasi disabilitas lainnya yaitu PERTUNI Kota Kupang, PERSANI NTT, KTK dan PERTUNI Provinsi NTT melakukan advokasi dan kampanye penyadaran hak-hak difabel- Kerjasama dengan Pelayanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (PRBM) Solo dalam peningkatan kapasitas	Organisasi PERMATA telah terlibat dalam Musrenbang baik di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten sebagai organisasi difabel dan terlibat aktif dalam memberikan gambaran tentang situasi penyandang disabilitas dan kebutuhannya.	<ul style="list-style-type: none">- Terkait fasilitas publik ramah disabilitas, PERMATA berpendapat sebenarnya sudah ada tetapi masih banyak kekeliruan dalam pemanfaatannya seperti guiding block di trotoar yang di pasang pot bunga, audio ada di puskesmas tetapi tidak dilengkapi dengan gambar visualnya, audio visual yang lengkap di

<p>anggota PERMATA dan pendampingan kepada beberapa project terkait penyakit kusta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama organisasi non disabilitas yaitu Bengkel AP-PEK, CIS Timor, PIAR, Rumah Perempuan, Pikul, Humanity Inclusion yaitu melakukan pelatihan advokasi, pembentukan karakter dan <i>peer to peer</i> bagi penyandang disabilitas. - Bersama Pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang melakukan penyuluhan dan deteksi dini penyakit kusta 		<p>bank tetapi toilet yang belum bisa diakses dengan baik dan bidang miring yang sudah disiapkan di puskesmas tetapi disimpan benda-benda yang menghambat mobilitas serta penunjuk arah yang belum tersedia di semua loket/ poli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan dapat diakses dengan baik dalam bentuk hard copy - Terkait informasi bantuan sosial, dapat diakses dengan baik dan terdapat 214 orang yang telah menerima bantuan tersebut.
---	--	--

<ul style="list-style-type: none">- Bersama Forum Peduli Disabilitas melaksanakan beberapa kegiatan antara lain advokasi kepada kaum difabel, talkshow pada televisi dan radio, pengembangan kegiatan ekonomi, dan terlibat dalam drafting perda dan pergub penyandang disabilitas- Bersama stakeholders lainnya dalam pembentukan forum inklusi desa dan kelurahan		
--	--	--

6. YAYASAN TRANSFIGURASI TABOR MULIA (YTTM)

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<p>- Bersama organisasi disabilitas lainnya di NTT seperti PERTUNI NTT, PERMATA NTT, KTK, GERKATIN Manggarai, GARAMIN NTT, NPC NTT melaksanakan beberapa kegiatan antara lain membangun pemahaman konsep disabilitas, men-sosialisasikan tentang hak-hak penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun</p>	<p>Yayasan Transfigurasi Tabor Mulia belum pernah mengikuti Musrenbang dengan alasan belum percaya diri untuk mengikuti kegiatan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Fasilitas publik ramah disabilitas sudah terdapat di beberapa tempat di kota kupang dan dapat diakses dengan baik- Dokumen perencanaan bisa diakses dengan baik- Informasi bantuan sosial dapat diperoleh dengan baik dari Pemerintah De-

<p>2016, peningkatan kapasitas pengorganisasian, sosialisasi kekerasan berbasis gender, pemahaman tentang akomodasi yang layak berbasis gender, pelatihan komputer, pelatihan daur ulang barang bekas, refleksi tentang capaian organisasi, penguatan kapasitas teknis Organisasi Penyandang Disabilitas dan bersama sahabat perempuan difabel dalam mensosialisasikan hak dan keadilan bagi kaum difabel di NTT</p> <p>- Bersama organisasi disabilitas di luar NTT yaitu SIGAB Indonesia, Yayasan SAPDA, HWDI, ASB dan YAKKUM melaksanakan</p>		<p>sa, LSM, Pekerja Sosial, Media Sosial dan Surat Edaran. Rincian bantuan yang telah diterima adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BST 10 orang 2. PKH 5 orang 3. pemenuhan kebutuhan dasar 3 orang 4. alat bantu 4 orang
--	--	--

<p>beberapa kegiatan antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan eksploitasi, kekerasan dan Pelecehan Seksual, peningkatan kapasitas Perempuan Penyandang Disabilitas dan Pemerintah daerah dalam memajukan dan melindungi Hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. 2. Penguatan Tata Kelola pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Risiko Bencana Inklusif 3. Pelatihan Gerakan Sekolah Advokasi 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none">- Bersama Organisasi non disabilitas seperti sanggar suara perempuan, Rumah Harapan GMT, PIKUL, Yayasan Tanpa Batas, PLAN, IOM, UNICEF, Save The children, Bengkel APPEK dalam beberapa kegiatan antara lain pendataan kaum difabel, penguatan kapasitas berorganisasi, sekolah pendidikan aman bencana dan penanganan covid-19.- Kerjasama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mensosialisasikan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang inklusi di instansi terkait (Dinas pendidikan, Dinas		
--	--	--

<p>Kesehatan, PUPR, BPBD,)</p> <ul style="list-style-type: none">- Bersama komunitas peace maker kupang (KOMPAK) dan Mybank melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi- Bersama Forum NBD, NBS dan oebobo melakukan Seminar terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam berorganisasi		
---	--	--

7. PERTUNI CABANG SUMBA TIMUR

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<ul style="list-style-type: none"> - Bersama organisasi disabilitas lainnya yaitu PERTUNI Provinsi NTT melaksanakan pelatihan komputer bicara menggunakan JAWS/ pembaca layar, daur ulang barang bekas dari kertas dan pembuatan aksesoris seperti vas bunga dan pot bunga - Bersama organisasi non disabilitas yaitu Yayasan 	<p>PERTUNI Cabang Sumba Timur telah mengikuti Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan serta terlibat aktif dalam mengusulkan program pembangunan fisik yang aksesibel dan berhasil meyakinkan ke forum untuk melibatkan difabel dalam program pem-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Di tempat pelaksanaan Musrenbang, belum adanya akses yang memadai bagi penyandang disabilitas - Dokumen Perencanaan dapat diperoleh dengan mudah dari petugas kelurahan - Informasi terkait bantuan sosial dapat diakses dengan baik melalui media sosial, tel-

<p>Bahtera dan YASALTI melaksanakan sekolah gradiasi dasar dan seminar tentang data difabel dan pendidikan inklusif (https://ekspedisidifabel.wordpress.com/tag/sekolah-gradiasi/)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dalam pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan - Bersama Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur melaksanakan rapat tentang Data Terpadu Kesejahteraan 	<p>berdayaan dalam pembangunan.</p>	<p>evisi, radio, dan tetangga. Sejauh ini terdapat 6 orang anggota PERTUNI Cabang Sumba Timur yang mendapat Bantuan Langsung Tunai dari Kementerian Sosial sejumlah Rp. 600.000/ orang.</p>
--	-------------------------------------	---

Sosial (DTKS) dan isu-isu sosial lainnya - Bersama lembaga perbankan yaitu Mybank melaksanakan Pelatihan Wirausaha		
---	--	--

8. PERTUNI CABANG Manggarai Barat

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
Bersama PERTUNI PROVINSI NTT dan Yayasan Kita Labuan bajo melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas pengurus	DPC PERTUNI Manggarai Barat belum pernah mengikuti Musrenbang dengan alasan belum pernah diundang	<ul style="list-style-type: none">- Fasilitas publik ramah disabilitas sudah ada dan bisa diakses dengan baik diantaranya terdapat di Kantor Pemerintah, Hotel dan trotoar di Kampung Ujung Labuan Bajo.- Dokumen perencanaan belum bisa diakses- Bantuan sosial seperti Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

		<p>(BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat diakses dengan baik. Sejauh ini, ada 7 orang yang telah mendapat BLT dari Dana Desa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Selanjutnya, telah dianggarkan dari dana desa sejumlah kurang lebih 3 juta untuk DPC PERTUNI Manggarai Barat.
--	--	---

9. PERTUNI CABANG NGADA

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
Bersama PERTUNI Provinsi NTT di bidang kerajinan tangan dalam mendaur ulang barang bekas dan pelatihan komputer bicara JAWS/ pembaca layar	PERTUNI Cabang Ngada belum pernah terlibat dalam Musrenbang karena belum mengetahui apa itu Musrenbang dan belum pernah diundang.	PERTUNI Cabang Ngada belum mengetahui ada atau tidaknya fasilitas publik ramah disabilitas, belum bisa mengakses dokumen perencanaan dan bantuan sosial.

10. PERTUNI CABANG KABUPATEN MANGGARAI

<p>PENGALAMAN ORGANISASI</p>	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN</p>	<p>AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Bersama PERTUNI NTT dan Kabupaten/Kota, GERKATIN dan NPC melakukan kerjasama dalam peningkatan kapasitas anggota, pengurus dan pelatihan lainnya. - Bersama organisasi disabilitas luar NTT yaitu BILIQ, Mata Hati Indoensia, Disabilitas Bergerak 	<p>PERTUNI Cabang Kab. Manggarai belum terlibat dalam kegiatan Musrenbang dengan alasan tidak pernah diundang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan pengalaman organisasi PERTUNI Cabang Kab. Manggarai bahwa belum adanya fasilitas publik yang ramah disabilitas dengan alasan kepedulian pemerintah yang belum memprioritaskan kaum disabilitas dan masih dalam proses perencanaan ke depan. - Dokumen perencanaan tidak

<p>Bandung dan Ayo Indonesia dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan Lembaga Non Disabilitas yaitu PLAN, WVI dan Sabe The Children antara lain pelatihan komputer bicara, advokasi pembangunan sanitasi yang inklusif dan advokasi kebijakan tentang disabilitas. - Bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Mangarai 		<p>bisa diakses karena tidak ada koneksi internet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi bantuan sosial dapat diakses dan sejauh ini terdapat 19 orang anggota yang menerima bantuan
---	--	---

11. PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS MALAKA (PERSAMA)

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<ul style="list-style-type: none">- Bersama organisasi disabilitas lainnya di NTT yaitu PERSANI, YYTM, GARAMIN NTT, NPC, KUMPESA dan APDIS dalam memberikan informasi terkait topik webinar yang terbuka bagi difabel- Bersama organisasi disabilitas diluar NTT yaitu	Organisasi PERSAMA belum pernah terlibat dalam proses perencanaan dengan alasan tidak pernah diundang dan belum adanya komunikasi yang baik antara PERSAMA dengan Pemerintah setempat serta audiens yang dijadwalkan dengan pemerintah seringkali tidak dilaksanakan ka-	<ul style="list-style-type: none">- Belum ada fasilitas umum yang ramah disabilitas.- Dokumen perencanaan juga belum bisa diakses dengan baik- Informasi terkait bantuan sosial dapat diakses dengan baik melalui media sosial, LSM, keluarga, teman dan pemberitahuan

<p>SIGAB Indonesia, Perkumpulan Jiwa Sehat Indonesia dan OHANA dalam webinar online terkait kegiatan-kegiatan advokasi inklusi disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama Organisasi Non Disabilitas yaitu PLAN dan Yayasan Pijar Timur Indonesia dalam melaksanakan pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan jamban (closet) dan pelatihan pembuatan pembalut dari kain - Bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai 	<p>rena pemerintah berhalangan</p>	<p>langsung. Namun, hingga saat ini PERSAMA belum dapat menerima bantuan dengan alasan pemerintah tidak mendata kaum difabel untuk mendapatkan bantuan tersebut.</p>
--	------------------------------------	--

12. KOMITE PENYANDANG DISABILITAS (KIPDA) TTS

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<ul style="list-style-type: none">- Bersama organisasi disabilitas lainnya yaitu GARAMIN NTT melaksanakan pelatihan desa inklusi dan survey dampak COVID-19 terhadap difabel di NTT tahap 1 2020 dan tahap 2 2021- Bersama Organisasi Disabilitas diluar NTT yaitu SIGAB Indonesia dan	<p>KIPDA TTS terlibat dalam Musrenbang sebagai kader difabel dan ikut memberikan pendapat dan pertanyaan terkait pemenuhan hak-hak kaum difabel.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Di kabupaten TTS, telah ada beberapa fasilitas publik yang ramah disabilitas diantaranya di Taman Kota Soe, Pengadilan Negeri TTS, dan Aula Sanggar Suara Perempuan TTS.- Dokumen perencanaan juga dapat diakses dengan baik yakni diberikan oleh pihak penyelenggara dalam bentuk

<p>PERDIK melaksanakan pelatihan desa inklusi di TTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama organisasi non disabilitas yaitu Yayasan Tanpa Batas, ASB dan My Bank melakukan penyuluhan kesehatan mata inklusif, menjadi fasilitator Desa Tangguh Bencana, dan pelatihan kewirausahaan. - Bersama BPBD melakukan kerja sama dalam bidang Penanggulangan Pengerangan Resiko Bencana.. - Bersama Dinsos Kabupaten TTS dan Dinsos Provinsi dalam bidang pelatihan 		<p>hard copy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi terkait bantuan sosial juga terakses dengan baik melalui media sosial, televisi, teman, keluarga, surat edaran dan poster. Sejauh ini terdapat 300 anggota KIPDA yang mendapat bantuan tersebut. Selanjutnya juga terdapat anggaran (dana desa) sejumlah 25 juta yang dianggarkan untuk kaum difabel dan anggaran tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi bagi kaum difabel. Akan tetapi, masih ada anggota yang belum mengakses bantuan ter-
--	--	--

<p>Ketrampilan Menjahit, pertukangan dan Salon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama Bappeda Kabupaten TTS dalam bidang Sanitasi dan Air Bersih (POKJA AMPL). - Bersama DPRD kabupaten TTS, Bapenperda dan Forum Parlemen dalam bidang pembuatan dan penyusunan Ranperda penghormatan dan perlindungan Hak-hak penyandang Disabilitas Di kabupaten TTS. 		<p>sebut karena tidak adanya identitas kependudukan dan belum terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan Dinas PMD dan Kementerian Desa dan menerima bantuan alat pertanian berupa traktor dan mesin foto copy.
---	--	--

13. National Paralympic Committee (NPC) NTT

<p>PENGALAMAN ORGANISASI</p>	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN</p>	<p>AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>- Bersama PERTUNI Prov NTT, PERTUNI Kota Kupang, PERMATA NTT, PERSANI NTT, KTK, GERKATIN Manggarai, YTTM, FORSADIKA, KIDPA So'e, GARAMIN NTT, KUMPESA, KKI, PERSAMA mendorong munculnya bibit-bibit atlet -atlet kaum difabel di NT.</p>	<p>Tidak pernah ikut karena tidak diundang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akses ke fasilitas publik yang ramah disabilitas di Bandara, hotel dan rumah sakit. - Belum bisa mengakses dokumen perencanaan dan bantuan social - Gedung olah raga belum aksesibel.

14. Komunitas Tuli Kupang (KTK)

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP BANTUAN FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<p>- Bersama organisasi disabilitas lainnya yaitu PERTUNI Prov NTT, PERTUNI Kota Kupang, PERSANI NTT, YTTM, KIDPA So'e, GARAMIN NTT, NPC melakukan koordinasi, membangun kemitraan dan memperkuat kapasitas organisasi.</p>	<p>Organisasi KTK pernah mengikuti musrenbang di Dusun, Kabupaten dan juga Prov NTT sebagai organisasi difabel juga sebagai individu difabel.</p>	<p>- Fasilitas yang sudah ramah disabilitas seperti di Polda NTT, Puskesmas Kupang, Gereja GMIT dan Advent. Namun terdapat beberapa kendala dalam mengakses informasi yakni belum banyaknya bahasa isyarat dalam fasilitas dimaksud.</p> <p>- Dokumen RPJMD dapat diakses dengan baik</p> <p>- Informasi terkait bantuan</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan organisasi lainnya yaitu ASB, Bengkel APPEK, KOMPAK, KOPI SA, Cis Timor, YTB, PLAN, UNICEF melakukan kegiatan penanggulangan resiko bencana, kesehatan reproduksi, pendidikan inklusi, sosialisasi konsep disabilitas dan etika berinteraksi serta pelatihan bahasa isyarat di Polda dan RSUD Kupang dan Kab. Kupang. - Bersama organisasi disabilitas diluar NTT yaitu Yayasan SAPDA, GER- 		<p>didapat dari pendamping/pekerja sosial, organisasi difabel, LSM, media sosial, dan teman dalam bentuk surat edaran/poster.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan yang diketahui berupa Bantuan Pangan Non Tunai / Sembako (BPNT/ APBD I/APBN), BST(Kemensos), BPUM, BSU, Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Kota Kupang/ APBD II), Prakerja, serta bansos lainnya dari Swasta, LSM dan Lembaga Keagamaan. Sejauh ini terdapat 35 anggota KTK yang telah menerima bantuan tersebut.
---	--	---

<p>KATIN, ASB Indonesia melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Penanganan Resiko Bencana, kesehatan reproduksi dan etika berinteraksi dengan difabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan lembaga lainnya seperti rumah perempuan, Yayasan Pijar Timur Indonesia, PIKUL, Yayasan Tanpa batas melakukan pendidikan inklusif dan ramah disabilitas serta penanganan COVID-19 terhadap kaum difabel - Bersama pemerintah 		
--	--	--

<p>yaitu DINSOS, BPBD, BAPEDDA dan DINKES Kota Kupang terlibat dalam penyusunan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2020 tentang penyandang disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dengan pihak gereja seperti GMT dan Advent menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) pada saat kebaktian.		
--	--	--

15. Kumpulan Penyandang Disabilitas (Kumpesa) Rai Belu

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
- Bersama organisasi Disabilitas lainnya yaitu PERTUNI Provinsi NTT, PERTUNI Kabupaten Belu, PERSANI NTT melakukan pembahasan Anggaran Dasar Rumah Tangga, Penanganan COVID-19, pembahasan UU No 8 tahun 2016, dan berbagi Informasi dan pen-	- Belum pernah mengikuti Musrenbang karena belum mengetahui apa itu kegiatan musrenbang.	- Belum ada fasilitas publik yang ramah disabilitas - Tidak bisa mengakses dokumen perencanaan - Informasi bantuan sosial dapat diperoleh dengan baik dari pemerintah desa/ kelurahan, organisasi penyandang disa-

<p>galaman terkait dengan hak-hak difabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama Yayasan Pijar Timur Indonesia dan PLAN melaksanakan seminar dan workshop serta kerjasama dan pemberdayaan ekonomi melalui pembuatan masker dan pembalut dari kain - Bersama Dinas sosial Kabupaten Belu membahas Peraturan Disabilitas PEMDA Belu. - Bermitra dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Belu melakukan sosialisasi Mandi, Kebersihan dan Menstruasi (MKM) 		<p>bilitas lainnya dan televisi. Sejauh ini banyak anggota KUMPESA Rai Belu yang telah mendapat bantuan sosial tersebut.</p>
---	--	--

16. Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT

<p>PENGALAMAN ORGANISASI</p>	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN</p>	<p>AKSES TERHADAP BANTUAN FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>- Bekerja sama dalam bidang advokasi hak-hak difabel dengan PERTUNI Prov. NTT, PERTUNI Kota, PERTUNI Kab.Kupang, Kab.Malaka, Kab.Belu, Kab.Manggarai, Manggarai Barat, Kab.Sumba Timur, PERMATA NTT, KTK, YTTM, Kipda So'e,</p>	<p>- PERSANI NTT mengikuti Musrenbang di tingkat kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Prov. NTT sebagai organisasi difabel dan individu difabel serta berpartisipasi aktif dalam menyampaikan kebutuhan difabel.</p>	<p>- Fasilitas publik yang sudah ramah disabilitas seperti di Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Daerah NTT, Kantor camat oebobo, kantor lurah oebobo, Puskesmas oebobo, kantor Lurah Nunbaunsabu. - Dokumen RPJMD belum bisa diakses - Informasi terkait bantuan</p>

<p>Garamin NTT, NPC, KUMPESA, PERSAMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan organisasi difabel dari luar NTT seperti SIGAP, Yayasan SABDA, PUSPADI Bali, CIQAL, BILIQ melaksanakan program pelatihan jurnalis dan program pelatihan ketrampilan komputer serta bahasa inggris - Bekerja sama dengan organisasi non difabel seperti Yasalti, Yayasan Sanggar Suara Perempuan, Yayasan Pijar Timur Indonesia, 		<p>didapat dari Pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, Tokoh agama, Pendamping/pekerja sosial, Organisasi difabel, LSM, WA, Keluarga dan Tetangga dalam bentuk surat edaran dan poster.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan yang dikatehui berupa PKH, Alat Bantu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)/ sumber dari Pusat (APBN)/ Kemensos, BST Kemensos, Beasiswa Pendidikan dan bansos lainnya. - Jumlah anggota yang menerima ada 22 orang.
---	--	---

<p>Yayasan Tanpa Batas, Humanity Inclusion, PLAN dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sanitasi dan inklusi serta program magang tentang manajemen organisasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Bekerja sama dengan pemerintah dalam bidang Kebencanaan, kesehatan, pendidikan dan sosial.		
---	--	--

17. Yayasan Dola Koyakoya

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP BANTUAN FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah bekerja sama dengan organisasi difabel. - Belum pernah bekerja sama dengan organisasi luar dan juga pemerintahan. 	<p>Yayasan Dola Koyakoya pernah mengikuti musrenbang sebagai individu namun belum terlibat secara aktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada aksesibilitas. - Dokumen RPJMD belum dapat diakses - Informasi bantuan yang diketahui seperti PKH (Program Keluarga Harapan) Bantuan Pangan Non Tunai / Sembako, (BPNT/ APBD I/APBN Kartu Indonesia Pin-

		<p>tar, (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Prakerja (Kursus/pelatihan dan bantuan tunai), Beasiswa Pendidikan. Namun belum ada anggota yang pernah menerima bantuan tersebut.</p>
--	--	--

18. YAYASAN KITA KELUARGA INSANI

PENGALAMAN ORGANISASI	PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	AKSES TERHADAP FASILITAS PUBLIK RAMAH DISABILITAS, DOKUMEN PERENCANAAN DAN BANTUAN SOSIAL
<ul style="list-style-type: none">- Bekerja sama dengan organisasi lainnya seperti Yayasan Bina Daya Cabang Sikka dalam bidang Perawatan penderita gangguan jiwa.- Bersama Balai Rehabilitasi Sosial Laras Pati, Semarang, Jawa Tengah	Yayasan ini belum pernah mengikuti musrenbang karena tidak diundang.	<ul style="list-style-type: none">- Belum ada aksesibilitas.- Dokumen RPJMD belum dapat diakses- Informasi bantuan yang diketahui BST. Namun belum ada anggota yang pernah menerima bantuan tersebut.

<p>dalam bidang Rehabilitasi penderita gangguan jiwa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bekerja sama dengan pemerintah lewat kegiatan seminar dan workshop.- Bekerja sama dengan forum peduli disabilitas seperti Yayasan Bina Daya Cabang Sikka dan Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose di Mangarai dalam kegiatan seminar dan workshop.		
---	--	--

Secara umum dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengalaman organisasi, dari 18 organisasi disabilitas yang ada, sebagian besar sudah terlibat aktif dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah, organisasi disabilitas dan mitra pembangunan lainnya baik yang berada di NTT maupun diluar NTT seperti PERSANI, PERMATA, GARAMIN NTT, FORSADIKA. Namun, terdapat beberapa organisasi disabilitas yang sangat minim dalam membangun jaringan dan kemitraan antara lain DPC PERTUNI Manggarai Barat, PERTUNI Cabang Ngada, *National Paralympic Committee (NPC)* dan Yayasan Dola Koyakoya. Diharapkan dengan adanya dokumen profil disabilitas ini, dapat menjadi acuan dan motivasi bagi beberapa organisasi yang belum aktif tersebut untuk bekerjasama dengan organisasi lainnya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengadvokasi hak-hak difabel.
2. Terkait dengan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan yakni kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), terdapat 8 organisasi difabel yang belum pernah terlibat secara langsung yaitu DPC PERTUNI Manggarai Barat, PERTUNI Cabang Ngada, Pertuni Manggarai, PERSAMA, YTTM, NPC NTT, KUMPESA Rai Belu, Yayasan Kita Keluarga Insane dan 4 organisasi yang sudah terlibat namun belum berpartisipasi aktif antara lain FORSADIKA, PERTUNI Kota Kupang, KTK, Yayasan Dola koyakoya. Diharapkan agar dapat

berkoordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah setempat baik di tingkat desa/ kelurahan, kabupaten/kota dan provinsi agar kaum difabel dapat dilibatkan tidak saja dari musrenbang, tetapi dari proses pra musrenbang dengan memperhatikan beberapa hal yang menjadi kendala kaum difabel tidak dilibatkan dalam kegiatan pra musrenbang dan musrenbang dimaksud antara lain undangan secara tertulis dari pemerintah, fasilitas publik yang ramah disabilitas, bentuk dokumen perencanaan yang aksesibel secara khusus untuk difabel sensorik netra berupa *soft copy*, penyediaan juru bahasa isyarat pada saat musrenbang baik secara virtual maupun tatap muka dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat.

3. Terkait dengan akses terhadap fasilitas publik ramah disabilitas, sudah terdapat di beberapa fasilitas publik seperti perkantoran pemerintah, lembaga perbankan, puskesmas, gereja dan hotel. Diharapkan agar semakin banyak lagi fasilitas publik ramah disabilitas sehingga dapat mendukung kaum difabel dalam melaksanakan aktivitasnya.
4. Beberapa organisasi disabilitas yang belum bisa mengakses dokumen perencanaan yakni FOR-SADIK, PERTUNI Cabang Kota Kupang, PHDF, DPC PERTUNI Manggarai Barat, PERTUNI Cabang Ngada, PERTUNI Kabupaten Manggarai, PERSAMA, NPC NTT, KUMPESA Rai Belu, PERSANI NTT, Yayasan Dola koyakoya, Yayasan Kita Keluarga Insane dapat mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat karena

dokumen tersebut merupakan dokumen publik yang boleh diakses oleh kaum disabilitas maupun masyarakat pada umumnya.

Pemerintah perlu menyediakan dokumen berupa soft file yang bisa diakses oleh difabel Netra dan perlu menyediakan Juru Bahasa isyarat dalam setiap pertemuan tatap muka maupun online untuk memberikan akses bagi sahabat Tuli. Dengan diberikannya akses maka akan mendorong peningkatan partisipasi aktif difabel dalam musrenbang di berbagai level.

5. Terkait dengan informasi bantuan sosial, beberapa organisasi yang belum mendapat informasi yakni Pertuni Kota Kupang, Pertuni Cabang Ngada, PERSAMA, NPC NTT, GERKATIN Manggarai, Yayasan Dola Koyakoya dan Yayasan Keluarga Insane dapat mengkomunikasikan dengan Pemerintah Daerah setempat baik di tingkat desa/ kelurahan maupun Organisasi Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Sosial dan Dinas lainnya yang mengelola bantuan sosial agar dapat memperoleh informasi untuk mendapat bantuan tersebut.
6. Ke depan, untuk melakukan pemantauan pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas bisa melihat lebih detail pada buku panduan memantau pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang disusun oleh jaringan pegiat dan organisasi penyandang disabilitas Indonesia yang dikoordinir oleh Bapak M Joni Yulianto yang bisa diunduh pada website formasi disabilitas.

BAB IV
INOVASI DAN PEMBELAJARAN YANG DIPETIK
(*LESSON LEARNED*) DARI LAKU INOVATIF
DALAM KOMUNITAS DAN KELOMPOK
PENYANDANG DISABILITAS:

*Mendukung keragaman dan inklusi dalam
inovasi tahun 2020-2021*

Mengubah Paradigma Inovasi

Istilah 'inovasi' mengacu pada pengembangan produk, layanan, proses atau cara kerja, baik oleh karyawan, atau oleh orang yang menjalankan bisnis mereka sendiri.

Mengadopsi perspektif keberagaman dan inklusi pada inovasi sangat penting untuk memahami bagaimana bakat dan kebutuhan setiap orang dapat diwujudkan dan ditangani dalam masyarakat yang beragam dan multikultural.

Konsep inovasi tradisional cenderung mengutamakan teknologi daripada inovasi sosial; produk mutakhir dan inovatif di atas inovasi dalam konteks pelayanan (*service delivery*); dan nilai ekonomi di atas nilai sosial. Namun, asumsi yang diterima begitu saja ini dapat menjadi masalah dan konsep inovasi direkonseptualisasikan untuk memasukkan inovasi dengan dan oleh beragam aktor dan untuk kepentingan semua. Pendekatan “inovasi yang diperluas” ini dipandang perlu. Pendekatan ini juga

mengakui pentingnya interseksionalitas, yaitu sifat identitas sosial dan kategori sosial yang beragam dan tumpang tindih, seperti jenis kelamin, etnis, penyandang disabilitas/ difabel (*disability/ difability*), dan seksualitas.

Pemerintah Provinsi NTT juga menyadari bahwa Penyandang disabilitas mewakili kelompok yang sangat heterogen. Lebih jauh, pengalaman orang tentang disabilitas justru dapat menjadi pendorong untuk inovasi dan bagaimana pemikiran tentang konsep disabilitas memberi kita lensa berbeda untuk berpikir tentang inovasi. Promosikan partisipasi dalam inovasi oleh penyandang disabilitas dan dari semua komunitas (etnis dan berbagai latar belakang lainnya) dan menumbuhkan keragaman dan inklusi di semua aktivitas kita, justru juga akan mengarah ke lebih kuat inovasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT.

Kabar baiknya adalah semakin banyak organisasi yang mengakui disabilitas sebagai sumber keanekaragaman, bakat dan inovasi. Perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar dari sebelumnya untuk menghadirkan penyandang disabilitas, sebagai pelanggan dan klien, tetapi juga sebagai karyawan dan manajer dan karenanya mendapatkan keunggulan kompetitif.

Bagi penyandang disabilitas, itu berarti pekerjaan yang layak artinya mereka dapat diberdayakan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, komunitas, dan masyarakat mereka pada umumnya, membangun bersama ekonomi yang lebih inklusif.

Laporan ini memilih dan me-review 5 Praktik Inovatif yang berdampak positif pada hak-hak penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dengan mendapatkan akses ke lingkungan binaan, transportasi, kota dan pariwisata, TIK, layanan (bantuan, keuangan, produk) dan budaya (Tabel 1). Praktek baik yang terpotret antara lain dari Yayasan Dola Koya Koya ALor, Forsadika Maumere, Pertuni Kota Kupang, PHDF dan GARAMIN NTT.

Review ini dimaksudkan untuk memotret situasi umum mengembangkan kerja inovatif yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Provinsi NTT. Mulai dari upaya untuk menggambarkan karakteristik, besaran/cakupan kerja karya-karya inovatif, diikuti dengan deskripsi ringkas karya dimaksud, dan analisis mengenai hubungan karya-karya inovatif dimaksud dalam kerangka partisipasi penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Hasil dari review ini akan digunakan sebagai landasan pengembangan kebijakan yang bersifat inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budayanya. Data dan informasi untuk review pada bagian ini diperoleh dari survey singkat di tingkat lokal secara online (kami kombinasikan wawancara langsung, *focus group discussion*, dan rilis tertulis dari organisasi) dengan menggunakan pendekatan *Appreciative inquiry*.

Tabel 1. Organisasi bagi kelompok orang berkebutuhan khusus menggagas inovasi untuk kelompoknya di seluruh wilayah NTT sepanjang tahun 2020

No	Organisasi	Lokasi	Inovasi	Masalah Yang Hendak Diselesaikan	Cara memecahkan masalah
1	Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GAR-AMIN) NTT	Kota Kupang	1. Desa Inklusi di Oelomin	Minimnya ruang dan kesempatan bagi kelompok difabel NTT untuk berpartisipasi dalam siklus perencanaan pembangunan	Menempa dan melahirkan individu/kelompok individu difabel NTT yang berkapasitas supaya terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa

			2. Whatsapp Group Forum Tanggap Inklusi	Minimnya ruang komunikasi antara difabel dengan stakeholders	Menghubungkan difabel, pemerintah, dan LSM untuk memperluas informasi terkait disabilitas
			3. Kelas Masak (Uji Coba)	Tidak mandiri dalam menentukan menu dan jenis makanan bagi keluarga difabel	Melahirkan chef difabel baru untuk bisa mandiri memasak masakan sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain
			4. Riset (Inisiatif)	Sulitnya menjangkau kelompok difabel NTT yang heterogeni	Melahirkan tim riset difabel yang inklusi di NTT
2	Forum Belarasa Difabel Nian Sikka (Forsadika) Maumere	Kab. Sikka	1. Pengorganisasian Kelompok Difabel di Tingkat Desa di wilayah	Minimnya ruang komunikasi antara difabel dengan stakeholders	Menghubungkan difabel, pemerintah, pekerja medis, lembaga koperasi, komisi

			Kabupaten Sikka	Paradigma beneficiaris masih kental di antara anggota kelompok berkebutuhan khusus	<p><i>caritas</i> di keuskupan Maumere, dan LSM untuk memperluas informasi terkait disabilitas dan advokasi.</p> <p>Melakukan advokasi dan memfasilitasi teman-teman berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan kemasyarakatan umum lainnya di tingkat desa.</p>
--	--	--	-----------------	--	--

			2. Unit Pelayanan Disabilitas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	Minimnya informasi tanggap bencana dan paradigma mitigasi bencana bagi kelompok berkebutuhan khusus	Melakukan kerjasama dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Klaten untuk proses advokasi dan sosialisasi kebencanaan.
3	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Kota Kupang	Kota Kupang	Koperasi Tuna Netra	Mematahkan stigma difabel hanya bisa berjualan kemoceng dan tukang pijat	Membentuk Koperasi Tuna Netra
4	Pelita Harapan Disabilitas FLOBAMORA (PHDF)	Kota Kupang	1. Pendidikan Inklusif	Orang yang berkebutuhan khusus cenderung lebih sulit mengakses pendidikan yang bermutu dan ling-	Melakukan advokasi secara reguler ke dalam kelompok orang berkebutuhan khusus tentang pentingnya pendidikan

				kungan pendidikan yang ramah terhadap kebutuhan kelompok difabel	
			2. Dunia Kerja Inklusif	Orang yang berkebutuhan khusus cenderung tidak mendapat kesempatan yang setara dan akses yang memadai ke berbagai jenis pekerjaan di kota Kupang	Melakukan advokasi secara reguler ke dalam kelompok orang berkebutuhan khusus tentang pentingnya kesempatan kerja dan tetap bekerja di tengah pandemi covid-19

			3. Pendampingan Akses Dokumen Dasar Kependudukan	Orang berkebutuhan khusus dan anggota keluarganya sulit mengakses dan mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan dasar yang memadai dan lengkap	Melakukan advokasi secara reguler ke dalam kelompok orang berkebutuhan khusus tentang pentingnya akses sosial dan martabat anak maupun keluarga anak penyandang disabilitas secara khusus terhadap akses mendapatkan hak berbagai dokumen dasar kependudukan.
5	Perhimpunan Mandiri Kusta	Kota Kupang	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.		

6	Yayasan Transfigurasi Tabor Mulia		Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.
7	PERTUNI Cabang Sumba Timur	Kambera, Sumba Timur	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.
8	PERTUNI Cabang Manggarai Barat	Labuan Bajo, Manggarai Barat	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.
9	PERTUNI Cabang Ngada	Bajawa, Ngada	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.
10	PERTUNI Cabang Manggarai	Ruteng, Manggarai	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.

11	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Malaka (PERSAMA)	Malaka	1. Pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi covid-19	Informasi terkini tentang covid-19, pentingnya menjaga kebersihan, dan pentingnya kebiasaan hidup sehat belum tersampaikan secara memadai dan lengkap untuk di mengerti oleh kelompok orang berkebutuhan khusus.	Melakukan sosialisasi secara internal ke dalam kelompok orang berkebutuhan khusus tentang pentingnya masker dan mencuci tangan pakai sabun (pola hidup bersih dan sehat) di tengah pandemi covid-19
			2. Pendidikan berkesinambungan	Kesempatan mendapatkan/melanjutkan pendidikan belum dipahami secara	Melakukan sosialisasi secara internal ke dalam kelompok orang berkebutuhan khusus tentang pentingnya

				utuh oleh kelompok orang berkebutuhan khusus	pendidikan melalui ujian paket A, B, dan C.
12	Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) TTS	Mollo Selatan, TTS	1. Pendampingan Akses Dokumen Dasar Kependudukan	Orang berkebutuhan khusus dan anggota keluarganya sulit mengakses dan mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan dasar yang memadai dan lengkap	Pendampingan pembuatan e-KTP, kartu keluarga, dan BPJS bagi penyandang disabilitas yang belum mendapat pelayanan dokumen dasar kependudukan di TTS.
13	National Paralympic Committee (NPC) NTT	Kota Kupang	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.		

14	Komunitas Tuli Kupang	Kota Kupang	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.		
15	Gerkatin Manggarai	Labuan Bajo, Manggarai Barat	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.		
16	Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PER-SANI)	Kota Kupang	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.		
17	Yayasan Dola Koyakoya (YDK)	Teluk Mutiara, Alor	Rumah Singgah-Rumah Asuh untuk ODGJ di Alor	Sulitnya kelompok dengan berkebutuhan khusus mendapatkan akses penginapan yang memadai dan peka terhadap	Menetapkan dan menyiapkan sebuah rumah/hunian yang ramah dan inklusif bagi kaum difabel yang sedang dalam perjalanan singgah di

				kebutuhan khusus ODGJ	Alor
18	Yayasan Kita Keluarga Insani	Kota Ratu, Ende	Tidak memunculkan inovasi saat mengisi formulir dan tidak mengirimkan tulisan susulan cerita inovasi.		

Catatan: Inovasi yang dilakukan adalah mulai tahun 2018 ke atas untuk menangkap kontribusi penyandang disabilitas saat masa pandemi. Wawancara mendalam, Diskusi terpusat dilakukan via zoom bagi yang menyampaikan inovasi-inovasi yang dibuat. Press rilis yang dikumpulkan juga menjadi acuan dalam penulisan pada bab ini. Tim inklusi (Penyandang disabilitas dan non disabilitas terlibat dalam proses ini). Panduan disusun oleh bagian LITBANG sesuai pertanyaan inovasi daerah yang dimodifikasi.

1

Nama Inovasi: RUMAH SINGGAH - RUMAH ASUH untuk ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI ALOR

Inisiator Inovasi: El Asamau – Yayasan Dola Koyakoya Alor

Bagaimana proses inovasi ini lahir?

El Asamau, pria kelahiran Alor, 35thn, memutuskan untuk berhenti berkarir sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Alor kemudian mulai peduli dengan komunitas dan kebutuhan dari kelompok orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dengan segala kesungguhannya, El memantapkan perhatiannya kepada ODGJ setelah bertolak dari pengalaman dan keprihatinannya atas keadaan yang dialami salah satu anggota keluarganya, Nona Ance, yang mengalami depresi berat yang berujung pada gangguan jiwa; namun karena kegigihan seluruh anggota keluarga, Nona Ance akhirnya sembuh dan perlahan-lahan selama dua tahun terakhir ini bisa kembali ke kehidupan sosialnya semula. Pengalaman melihat dan mengalami semбуhnya seorang ODGJ justru membuka kesadaran baru bagi El tentang pentingnya perhatian dari sesama bagi sesama yang lain karena berkebutuhan khusus.

“...berawal dari situ, mulai sadar bahwa ternyata orang dengan gangguan jiwa di sekitar saya, di Alor itu banyak. Nah bersyukur kami dikasih kesempatan untuk

menyaksikan bahwa orang dengan gangguan jiwa itu bisa sembuh, dibuktikan dengan adik ini. Sehingga suatu saat ketika saya ke Mainang Alor Selatan, ada nona Weli.....tidur di lantai di pasar...padahal Mainang itu dingin luar biasa sekali...saya langsung ambil inisiatif untuk antar ke rumah karena dengar juga dari warga sekitar bahwa dia juga mendapat kekerasan...biasa ada orang mabuk yang kesana ganggu dia...kita langsung angkut kerjasama dengan puskesmas setempat kita bawa ke rumah walaupun tempat belum siap...kita sekat dapur supaya dia bisa tinggal sama-sama."

Pengalaman dan keseharian seluruh anggota keluarga El Asamau bersama Weli inilah yang kemudian menghantarkannya untuk memberi perhatian, membuka diri dan keluarga, dan berbuat secara lebih kepada ODGJ. Rumah Singgah-Rumah Asuh untuk ODGJ menjadi artikulasi penting atas semua itu.

Bagaimana inovasi ini memecahkan masalah yang Anda/komunitas/ organisasi Anda alami?

El Asamau dan Yayasan Dola Koyakoya Alor menyadari bahwa kebutuhan terbesar dari individu segera setelah divonis (baik secara medis maupun, kadang-kadang, didahului oleh vonis secara sosial) sebagai individu dengan masalah psikologis dan kesehatan mental adalah kebutuhan untuk diterima

di dalam masyarakat dan akses terhadap kebutuhan hidupnya sebagai manusia yang bermartabat. Namun, tidak semua orang dapat menangkap pentingnya layanan atas kebutuhan dan akses tersebut. Justru persis di sana terlihat pentingnya El dan Yayasan menghadirkan Inovasi Rumah Singgah-Rumah Asuh untuk ODGJ di Alor.

“..jadi waktu pertama lihat Weli kayak ter-panggil betul-betul..jadi saya bilang ke isteri..dapur kita ukuran 3x6 nah ini kita partisi bagi dua...ada satu ruang yang pintunya ke arah luar nah itu yang kita rombak jadi kamarnya Weli sementara...kita rombak dan dia tinggal di situ..sementara lagi kumpul bahan, lagi ada persiapan tempatnya sudah ada sudah difondasi,kita ada mau bangun satu kamar yang cukup representatif...intinya...dengan adanya rumah ini harapan kita dia punya *space* tersendiri lalu ketika suatu saat dia mau jalan ke mana kita bisa tahan dia supaya jam makan dia makan jam minum obat dia minum obat kalau mau jalan-jalan dia bisa jalan rame-rame dengan yang lain.”

Siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini di awal pelaksanaannya?

Mengajak orang lain untuk perduli atas situasi sosial yang dialami sesama lain adalah tugas yang tidak mudah. Selain karena keperdulian itu mutlak memerlukan motivasi asali yang bersih, keperdulian itu

sendiri terkadang menuntut pengorbanan dalam artian yang luas. El Asamau dan Yayasan Dola Koyakoya telah menyadari sedari awal tantangan ini. Maka penggerak utama untuk inovasi ini mesti dimulai dari lingkaran terdekat (keluarga inti, keluarga besar, dan jalur pertemanan) sebelum nantinya akan merembes ke lingkaran yang lebih besar. Maka, tak terhindarkan, semua keluarga inti El Asamau turut terlibat dan ambil peran untuk membantu pemulihan ODGJ yang dirawat di rumah. Bahkan beberapa teman yang ikut membantunya di Yayasan pun turut menjadi “karyawan” di proses penyembuhan ODGJ.

“...jadi kita berbagi peran walaupun minim pengalaman tetapi hanya dengan modal niat dan kita kasih pemahaman sehingga semua bahu membahu untuk urus Weli termasuk dari mandi, cuci pakaiannya, untuk kasih obat, lalu antar bahkan sampai konsultasi ke rumah sakit kita berbagi tugas.”

Berapa biaya yang dikeluarkan untuk memastikan inovasi ini dapat dilaksanakan?

Rumah singgah-rumah asuh untuk ODGJ di Alor pada prinsipnya adalah rumah tinggal, namun ditata sedemikian rupa agar akses pengasuh dan perawat kepada ODGJ tetap ada dan pada saat yang sama, pasien ODGJ juga diberi akses ke lingkungan sekitar dan tetap dalam kondisi yang juga terawasi. Maka biaya pembangunan rumah menjadi pengeluaran utama mewujudkan inovasi ini di samping biaya operasional keseharian.

“...sudah pernah hitung...bahkan sudah gambar...tempatnya sudah ada...jadi rencana satu kompleks sama tempat kita tinggal kebetulan lahan agak luas sedikit...jadi biar mudah dipantau...biar dia tidak merasa sendiri. Perkiraan saat itu karena kita di dekat pantai maka yang buat mahal adalah atapnya kalau pakai atap seng biasa takut keropos seperti yang sekarang kita alami jadi mau pesan yang baja ringan. Nah biaya yang kita butuhkan kemaren itu tidak sampai 60 juta sebenarnya. Jadi kita kumpul sedikit-sedikit, kita coba bangun perlahan-lahan...”

Dari mana sumber pembiayaan untuk inovasi ini? Bagaimana peran pemerintah/aparat (desa/kota/kabupaten/provinsi) membantu Anda/organisasi Anda menyukkseskan inovasi ini?

El menyadari bahwa uang (kapita) bukan modal satu-satunya untuk mewujudkan inovasi. Karena inovasi ini lahir di dalam masyarakat, maka modal sosial juga main peran penting. Ini tergambar dari bagaimana beban biaya pembangunan Rumah Singgah-Rumah Asuh untuk ODGJ dapat terpenuhi setahap demi setahap dalam keseluruhan proses pembangunannya berkat uluran berbagai pihak.

“...bahan yang ada yang sudah kita beli sekarang itu memang kita sisihkan dari pendapatan dari usaha yang ada, tetapi ada rencana untuk misalnya ke depan kita temui

kendala akan di-share untuk bisa dapat donasi sehingga tempat untuk Weli ini bisa dibangun. Jadi sementara masih dari kita sendiri, dari Yayasan tetapi tidak banyak, lalu sempat diundang oleh wakil ketua DPRD Alor untuk bertemu khusus membahas tentang ini...dan dijanjikan kasih donasi untuk bisa kerja, namun mungkin beliau lupa dengan kesibukan sampai sekarang belum, tapi kita tetap dalam perencanaan...”

Siapa saja yang mendapat manfaat dari inovasi ini?

Kehadiran Rumah singgah-rumah asuh untuk ODGJ di Alor tentu bermanfaat langsung bagi pasien ODGJ dan anggota keluarganya. Selain karena menjadi tempat singgah dan perawatan, Yayasan juga membantu pengurusan dokumen administratif kewarganegaraan (akta kelahiran, KTP, jaminan kesehatan, kartu keluarga, dll) yang diperlukan ketika ODGJ mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, RSUD Kalabahi, maupun rumah sakit di luar Alor yang menjadi rujukan.

“Ketika kita bangun rumah singgah ini,...dengan keterbatasan yang ada...kita akan bawa mereka ke Kupang...jadi di Alor kita cuma kasih perawatan harian sebelum mereka dihantar ke Kupang...mungkin data-datanya...pengalaman Weli kemaren rumahnya ada di kampung jauh sekali di sana terus cari kartu keluarga,harus mutasi dia ke kota,urus administrasinya begitu be-

gitu...jadi mereka bisa terdata dengan baik dulu baru kita lanjutkan entah ke Kupang atau lakukan perawatan sementara di Alor dahulu...”

Namun, lebih lanjut, sistem kesehatan Kabupaten Alor justru juga mendapat manfaat langsung dari kehadirannya karena bisa menjadi rumah singgah rujukan bagi ODGJ yang hendak berobat di Rumah Sakit Umum di Kalabahi. Di tengah keterbatasan dan ketiadaan tempat dan rumah sakit khusus bagi ODGJ di Alor, justru Rumah singgah-rumah asuh untuk ODGJ di Alor menjadi titik simpul antara ODGJ dengan akses terhadap layanan kesehatan. Bahkan ketika ODGJ harus dirujuk berobat ke kota lain (Kupang, Jakarta, Surabaya), rumah singgah ini menjadi tempat perawatan selama masa persiapan keberangkatannya.

“...dengan adanya begini kita kayak orang-orang di Alor mulai komunikasi kontak di yayasan...jadi sudah jadi tempat orang bertanya ada orang tua datang menangis-menangis anaknya lagi kuliah tiba-tiba orang bilang dia kerasukan...terus ini dihantar kembali ke Alor tiba-tiba diam tidak mau begini tidak mau begitu dan karena pengalaman urus adik nona...kita bilang itu masuk ke tahap awal depresi...kalau bisa langsung ditangani,bolehlah berdoa tapi perlu juga dengan tindakan medis karena sudah banyak isu itu kutukan dan segala macam...dengan adanya tempat ini ber-

syukur sekian lama selain kontak secara online ada yang sudah datang dan bertanya khususnya tentang kesehatan mental...begitu kaka."

Kehadiran inovasi Rumah singgah-rumah asuh untuk ODGJ di Alor juga menghadirkan dampak secara tidak langsung bagi kontinuitas dan ketersediaan jenis obat khusus dan lazim diresepkan bagi ODGJ (obat golongan sedatif, relaksan, dan golongan obat sejenis lainnya) karena Rumah singgah-rumah asuh untuk ODGJ di Alor secara rutin membuat data sebaran ODGJ berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengalaman berkunjung ke kampung-kampung di Pulau Alor. Data inilah yang dipakai juga untuk menjadi salah satu informasi rujukan oleh Puskesmas kedalam perencanaan pengadaan obat tahunannya.

"...salah satu manfaat yang sebelum itu kita sudah dapatkan dengan kehadiran Weli adalah mulai di setiap puskesmas di Alor mulai dilakukan pengadaan obat-obat untuk yang penenang begitu kaka untuk penanganan ODGJ dan depresi. Jadi obat sekarang kita tidak perlu pesan dari Kupang...sekarang kita hanya perlu ke Puskesmas untuk dapatkan obat."

Apakah ada rencana inovasi ini akan dimodifikasi/diperluas cakupannya/berhenti dilakukan di masa yang akan datang? Kenapa?

Inovasi Rumah Singgah-Rumah Asuh untuk ODGJ di Alor adalah langkah kecil dengan dampak yang luas. Maka, menghadirkan inovasi ini juga harus terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar termasuk bahwa inovasi ini akan justru merangkul lebih banyak lagi komunitas terkait.

“Kita memang sudah tetapkan ini sebagai salah satu kegiatan...kerja...sebenarnya kemaren mengundurkan dari ASN juga salah satu alasan supaya bisa fokus mengurus Weli dan kawan-kawan...sebisa mungkin kalau tempatnya memadai,kita kan punya teman-teman di sini dengan PPNI, perawat, dokter, mereka rajin kunjungan, kita bangun komunikasi, ada hal-hal kita tanya...jadi saya pikir kalau seperti itu banyak yang mau membantu kenapa Weli saja padahal di jalan banyak tuh orang yang gangguan jiwa dan bukan saja yang sudah akut, yang mulai gejala dan depresi dan lain-lain harusnya sudah harus ditangani hanya karena tempatnya tidak ada...malah mereka disalahkan kenapa mentalnya tidak kuat, salah sendiri, kenapa begini kenapa begitu...kalau tempatnya cukup repre-sentatif untuk mereka kita pasti membuka selebar-lebarnya pintu untuk mereka.”

Pemerintah Provinsi NTT dan Inovasi

Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi Inovasi Rumah Singgah-Rumah Asuh untuk ODGJ di Alor bukan sebagai inovasi yang berdiri sendiri di tengah masyarakat tetapi sebagai bagian dari jejaring inovasi yang turut mencerdaskan kehidupan masyarakat NTT. Maka, laku inovasi ini layak tidak saja harus di *expose* tetapi juga dalam kemandiriannya dapat dicatat sebagai usaha yang tumbuh dalam keseluruhan Sistem Inovasi Daerah. Maka, Pemprov NTT mengajak Inovasi Rumah Singgah-Rumah Asuh untuk ODGJ di Alor untuk ikut dicatat ke dalam *Innovative Government Award* (IGA) dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021.

2

Nama Inovasi: PENGORGANISASIAN KELOMPOK DIFABEL DI TINGKAT DESA

Inisiator Inovasi: Forum Belarasa Difabel Nian Sikka (Forsadika)

Bagaimana proses inovasi ini lahir?

Norma Ngewi, Ellen, dan Ambros Dan, didukung oleh penggerak Forum Belarasa Difabel Nian Sikka, menggagas pentingnya mengorganisir semua pribadi yang berkebutuhan khusus yang tersebar sampai di tingkat dusun di wilayah Kabupaten Sikka. Mengorganisirnya berarti memungkinkan semua pribadi yang berkebutuhan khusus menempatkan diri dalam kumpulan secara nyata sekaligus memastikan mereka telah dapat dengan baik mengakses segala haknya dan terutama memastikan hak itu tidak diabaikan begitu saja. Gerakan ini telah dimulai sejak September 2018 hingga saat ini dengan target agar kelompok kategorikal bagi orang berkebutuhan khusus terbentuk sampai menjangkau seluruh desa/dusun di wilayah Sikka. Lebih lanjut, gerakan ini menjadi gerakan yang digagas untuk tumbuh secara subur dari dalam kelompok orang berkebutuhan khusus dengan menanamkan motivasi utama mengubah paradigma kaum berkebutuhan khusus sebagai kelompok orang yang penerima bantuan sosial (beneficiaris) menuju paradigma baru sebagai kelompok sosial yang ikut terlibat secara partisipatif dan terlibat langsung dalam setiap aspek pembangunan dalam masyarakat. Maka gerakan inovatif

ini juga menjadi gerakan advokasi masif di wilayah Kabupaten Sikka.

“...ketika kita bicara tentang teman-teman ini terutama soal advokasi, soal kampanye, yang paling kita butuhkan awal dan sangat penting itu adalah data...data yang benar-benar terorganisir...kita tidak bisa bicara tentang pemenuhan dan perlindungan teman-teman difabel kalau kita tidak punya data yang riil, kan kita tidak mungkin kita ke dinas sosial dan bilang oh jumlah difabel sekitar seratusan, kan tidak bisa kita bilang seratusan, harus pasti.Nah itu yang menjadi dasar Forsadika melakukan pengorganisir kelompok difabel sehingga teman teman difabel mempunyai data yang riil by name, by address, bahkan by picture”

Bagaimana inovasi ini memecahkan masalah yang Anda/komunitas/ organisasi Anda alami?

Forsadika menggagas pendekatan hak tanpa mengedepankan intervensi; mementingkan integritas perjuangan pemenuhan hak-hak difabel dan menjauhkan diri dari gerakan dengan paradigma orang yang ingin mendapatkan bantuan dan pendekatan sejenis untuk penguatan *livelihood*. Sehingga gerakan swadaya skala mikro justru menjadi faktor penguat yang terus digaungkan untuk kerja-kerja advokasi yang mereka gagas.

“...pemberdayaan yang kami lakukan sedikit berbeda dari kelompok-kelompok difabel

yang difasilitasi oleh teman-teman dari lembaga yang lain...mungkin saja, tapi bisa saja saya salah atau keliru...yang terjadi di teman-teman atau lembaga yang lain pengorganisasian untuk teman-teman difabel itu pendekatannya untuk livelihood, kalau kami itu murni pendekatan hak. Jadi tidak ada intervensi apapun dari forسادika untuk kelompok itu tapi mereka kami bangun untuk lebih kepada integritas komitmen mereka menjadi perjuangan bersama..."

Justru setiap individu dalam kelompok orang berkebutuhan khusus ini main peran penting untuk setiap jenis kegiatan kemasyarakatan dalam rangka penguatan kapasitas dan advokasi. Ini terlihat dalam bentuk partisipasi swadaya untuk swakelola yang dijalankan.

"...mereka mulainya dengan swadaya...ada iuran, ada arisan, simpan pinjam, itu murni semua dari kelompok itu sendiri anggota kelompok masing-masing...jadi tidak ada intervensi ternak atau apa seperti di lembaga yang lain itu tidak dilakukan oleh forسادika yang selama ini..."

Siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini di awal pelaksanaannya?

Mengajak individu-individu dengan pemahaman yang sama tentang integritas, pemenuhan hak, dan kesetaraan dalam akses layanan (*service*) bagi ke-

lompok orang berkebutuhan khusus, bukan perkara mudah jika tidak ingin dibilang sulit. Sekat-sekat sosial dan pola pikir yang masih tertutup atas isu kaum difabel justru menciptakan kesenjangan dan tantangan tersendiri dalam mengeksekusi kerja-kerja advokasi di level operasional. Maka, forsadika menyebar pun mengajak kelompok kecil

“...yang terlibat itu (selain Ibu Norma, juga) Bapak Ambrosius Dan, luar biasa, Ibu Elen, dan ada beberapa teman lain lagi yang ikut terlibat di dalamnya, bahkan teman-teman difabel yang kita juga melakukan pengkaderan untuk mereka juga ikut di lapangan sehingga proses belajar mereka di lapangan langsung...learning by doing...”

“...awal sebelum kami mengorganisir pembentukan kelompok-kelompok difabel di desa itu, kami mencari teman-teman difabel potensial kurang lebih ada 25 orang. Itu yang kami dampingi terlebih dahulu untuk penguatan kapasitas pemenuhan hak-haknya. Nah dari situ, mereka kan diambil dari beberapa desa dan beberapa kelurahan, nah dari situ mereka kami minta kembali ke desa dan kelurahan masing-masing mengorganisir lagi teman-teman yang ada di desa dan kelurahannya dan kita mulai mengorganisirnya menjadi kelompok.

Dari mana sumber pembiayaan untuk inovasi ini?

Menggagas laku advokasi dengan melibatkan sebanyak mungkin individu dan dengan sebaran yang luas tentu membutuhkan usaha dan dukungan baik moriil dan materiil yang tidak dapat ditakar. Setiap dukungan mempunyai nilai lebih justru karena dukungan itu hadir pada waktu dan tempat yang tepat saat dibutuhkan. Ada banyak pihak yang turut terlibat memberi dukungan moriil dan materiil, mulai dari lembaga/komisi karitas dalam keuskupan, BUMN, sampai dengan donatur dan pemerhati masalah sosial. Namun forsadika tidak ingin terjebak dalam siklus beneficiaris yang kerap muncul ketika sebuah kelompok pemerhati berkelimpah materiil. Maka swadaya dalam kelompok justru menjadi arus utama untuk menopang kegiatan forsadika.

“...karena kita difasilitasi oleh *caritas* keuskupan dan memang dua tahun ini kita disupport oleh *caritas* keuskupan, tapi tidak semua. Ada juga dari teman-teman difabel juga dengan swadayanya di kelompok masing-masing...nah ini satu lagi yang menarik, saat kita melakukan perorganisasian di kelompok di desa, kita betul-betul memberikan *warning* ke teman-teman untuk menghilangkan *image* bantuan karena kita sedang advokasi bahwa teman-teman untuk mendapatkan sesuatu harus berdasarkan hak mereka.”

Terutama, gerakan advokasi ini adalah gerakan penguatan untuk kelompok difabel di dalam desa, dengan swadaya secara mandiri; maka dukungan moral dan materiil secara swadaya itu selalu sudah diarahkan sedemikian rupa supaya akan bergulir di dalam kelompok itu sendiri dan dapat di antara kelompok dari desa ke desa.

“...jadi ketika kita mengorganisir kelompok difabel di desa, kita tidak langsung lapor ke desa, oh ini kelompok difabel sudah terbentuk, sehingga kadang juga pemahaman di desa oh ini nanti sudah lapor kelompok ini nanti pasti mau minta bantuan, mau support dana. Tapi ketika kita mengorganisir kelompok difabel di desa itu kita pendampingan minimal sekitar 3-6 bulan mereka harus swadaya dulu, mereka harus bisa melakukan apa yang bisa mereka buat. Nanti setelah itu baru kita lapor ke desa setelah kita lapor ke desa, kelompok ini memang sudah benar-benar hidup...”

“...dan kami hanya punya dana yang kami akses lewat bantuan CSR PT. Pelindo III itu kami jadikan dana bergulir untuk ke kelompok-kelompok...”

Siapa saja yang mendapat manfaat dari inovasi ini?

Usaha advokasi bagi kelompok orang berkebutuhan khusus ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Tidak sedikit orang yang belum terbuka terhadap isu kesetaraan hak bagi semua golongan.

gan memberikan nada pesimistis atas usaha ini; masih juga ditemui sebagian kelompok masyarakat yang menganggap usaha advokasi ini adalah “sebuah proposal” untuk mendapatkan donasi, bantuan sosial, dan bentuk bantuan lainnya yang sudah selama ini lekat dengan kelompok orang berkebutuhan khusus ini. Namun tidak dapat dipungkiri, sebagaimana usaha advokasi dan pemberdayaan pada umumnya, secara nyata advokasi telah turut menyuarakan kesetaraan dan hak yang juga menjadi bagian integral dari kelompok orang berkebutuhan khusus. Gencarnya usaha advokasi ini telah turut menciptakan riak dan menggugah kesadaran individu-individu di luar kelompok orang berkebutuhan khusus untuk turut terlibat menyuarakan akses atas hak yang setara untuk semua.

“...terutama teman-teman difabel yang selama ini tidak diperhatikan. Ketika 10 tahun menjadi anggota DPR itu ketika berbicara tentang kelompok rentan atau kelompok cacat waktu itu selalu arahnya ke bantuan dan kabupaten Sikka waktu jaman kami selalu alokasi anggaran untuk bantuan itu ada, tetapi sasaran ke bawahnya itu kelemahannya itu data...data itu memang yang paling ngeri...dan kedua,...ketika kita mulai menggaungkan hak-hak disabilitas itu mulai terbuka mata tapi masih rijek juga, tapi bagi saya para pemangku kebijakan sudah mulai terbuka mata.”

Hingga saat ini telah 19 desa dan 6 kelurahan dari 147 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Sikka yang telah secara resmi mendapat pendampingan dari for-sadika untuk proses penguatan kelompok dan pembentukan jejaring orang berkebutuhan khusus. Yang membanggakan adalah, gerakan advokasi ini justru selain melibatkan kelompok orang berkebutuhan khusus, juga menggugah kesadaran inklusi di lingkungan desa; ini tercermin dari bervariasinya individu yang memberikan dukungan.

“...yang manfaatnya yang pasti pertama adalah teman-teman difabel di desa itu sendiri...karena kita bentuk kelompok difabel inikan kelompok inklusi jadi tidak hanya teman-teman difabel saja tapi ada teman difabel, ada orang tua yang mewakili teman difabel, dan juga ada kelompok pemerhati atau peduli yang mau juga terlibat nah itu kita masukkan ke dalam kelompok sehingga inklusi tidak eksklusif seperti di yang ada di lembaga-lembaga.”

Terlihat bahwa dukungan bagi gerakan advokasi ini juga secara perlahan-lahan mulai mengalir bahkan secara resmi-prosedural melalui penerbitan Surat Keputusan di tingkat Desa yang memberikan pengakuan keberadaan kelompok orang berkebutuhan khusus yang selanjutnya berimbas pada keterlibatan mereka dalam alur pembangunan desa. Tentu ini adalah sebuah kemajuan yang berarti karena secara tidak langsung menegaskan kesetaraan hak yang sedang diperjuangkan.

“...kalau dari pemerintah desa yang sudah

ada kelompok difabel di desa...kita ada upaya untuk koordinasi,ada beberapa desa juga yang kita dorong untuk mengeluarkan atau menerbitkan SK untuk kelompok difabel yang ada di desa. Jadi sudah ada beberapa desa yang sudah mengeluarkan SK untuk desa...sudah ada juga sekita 4 desa yang sudah ada dana desa untuk teman-teman difabel..."

Bagaimana mereka mendapat manfaat dari inovasi ini?

Menggagas terbentuknya kelompok-kelompok bagi komunitas berkebutuhan khusus di tingkat desa justru membawa manfaat praktis bagi komunitas, mulai dari terbukanya akses permodalan mikro non bank sampai dengan akses kepada identitas kewarganegaraan (KTP, Kartu Keluarga, Jaminan Sosial, dan lain-lain).

"...Forsadika sekarang juga sudah bermitra dengan salah satu koperasi yaitu Kopdit Pintu Air. Ini menjadi contoh untuk koperasi dan lembaga keuangan non bank lainnya...dan Kopdit Pintu Air ini membantu untuk memfasilitasi agar teman-teman difabel yang belum mendapat identitas kewarganegaraannya mendapat identitas kewarganegaraannya..."

Bagaimana peran pemerintah/aparat (desa/kota/kabupaten/provinsi) membantu Anda/organisasi Anda menyukseskan inovasi ini?

Dukungan oleh pemerintah/aparat desa dan kabupaten di wilayah Sikka juga sudah mulai bisa dirasakan gerakan advokasi ini dan terutama karena keterlibatan/ dukungan pemerintah/aparat desa adalah salah satu bentuk nyata dukungan kelembagaan negara. Praksisnya, dukungan pemerintah/aparat desa di wilayah Sikka justru juga telah membuat akses gerakan advokasi ini ke desa-desa lainnya menjadi relatif lebih mudah terkoordinasi dan mendapat kemudahan esensial lainnya.

“...sudah mulai mendukung perlahan-lahan dan makin pasti karena sekarang juga kita sudah mulai dengan pembentukan Unit Pelayanan Disabilitas di Badan Penanggulangan Bencana...itu SK-nya sudah keluar hanya ketika menyentuh soal anggaran ini masih ribet...”

Bagaimana interaksi antar anggota organisasi Anda setelah inovasi ini lahir?

Interaksi antar anggota organisasi Forsadika menjadi lebih *fluid* karena inovasi dalam gerakan advokasi ini justru memungkinkan elemen lain dalam struktur advokasi: pemberdayaan individu. Maka secara relatif justru kerekatan di dalam dan ke dalam organisasi Forsadika (*organisation cohesiveness*) semakin diperkuat.

“...terkait pengorganisasian, satu tahun terakhir ini kami cukup terbantu karena untuk koordinasi di beberapa desa dan kelurahan malah bukan dilakukan oleh *caritas* Maumere atau Forsadika tetapi ada pihak luar lain yang juga punya perhatian diperhatikan dengan gerakan ini mereka itu yang melakukan koordinasi di desa dan tinggal menyampaikan...jadi itu ada hal baru yang kami dapatkan di sini”

Kerekatan itu semakin terjalin sedemikian rupa dan justru memberi ruang bagi pihak luar untuk ikut terlibat dalam gerakan advokasi secara luas ini.

“...jadi sekarang itu makin banyak orang yang mau terlibat di urusan ini...saya sangat senang karena teman-teman di medis juga mau terlibat jadi kita advokasinya mulai lebih mudah untuk membangun tokoh-tokoh kunci untuk bergerak bersama untuk advokasi.”

Walaupun tantangan masih tetap ada, namun tantangan itu telah diakui dan disadari keberadaannya. Pengakuan ini justru penting karena dengan pengakuan atas adanya tantangan secara internal justru semakin membantu forsadika untuk mengerahkan dan mengarahkan segala *resource* yang dimilikinya untuk memperkecil dan menghilangkan tantangan.

“...anggota forsadika kita solid, koordinasinya baik. Hanya saat ini kita harus memberikan atau menjadi satu kendala bagi forsadika itu sendiri adalah kita harus

ekstra dan hati-hati untuk memberikan pemahaman teman-teman anggota forsadika yang baru karena teman-teman ini kan sudah terpolo, sudah menjadi beneficiary, pendekatan-pendekatan terdahulu, misalnya pendekatan berbasis bantuan segala macam, karitatif, sehingga ketika mereka gabung di forsadika itu terkadang mereka merasa bahwa forsadika menyediakan segala sesuatu untuk mereka. Mereka masih berharap bahwa forsadika juga punya pendekatan yang sama seperti terdahulu memberikan bantuan, oh begini...begini...inilah yang menjadi kendala bagi forsadika terkadang kami menjelaskan ke mereka...ada yang paham...lalu kita harus terus melakukan pendampingan menjelaskan bahwa forsadika itu sebuah organisasi pergerakan hanya memfasilitasi teman-teman untuk teman-teman sendiri bersama forsadika untuk mendampingi bisa mendapatkan kembali hak-hak yang dulunya tidak pernah didapatkan...misalnya dulu teman-teman hanya didata diberi beras 5 kg, gula 5 kg...selesai...tetapi bagaimana teman-teman ada di forsadika ini teman-teman akan difasilitasi oleh forsadika supaya teman-teman bisa berpartisipasi bicara di kantor desa paling tidak diundang di kantor desa...jadi kita perlu menjelaskan hal-hal sederhana untuk membuka pemahaman mereka.”

Tuntutan perubahan paradigma masih main peran kunci untuk mengatasi tantangan secara internal ini.

“...mengubah paradigma teman-teman dari yang sebelumnya beneficiaris menjadi orang yang berpartisipasi dan turut terlibat di dalamnya...”

Apakah ada rencana inovasi ini akan dimodifikasi/ diperluas cakupannya/ berhenti dilakukan di masa yang akan datang? Kenapa?

Jalan panjang kerja advokasi untuk pengorganisasian kelompok difabel di Kabupaten Sikka masih akan menuntut usaha konkret. Forsadika menyadari bahwa masih banyak desa dan kelurahan yang perlu mendapat perhatian agar dapat segera terbentuk organisasi difabel di tingkat paling kecil dan tugas ini bukan tugas yang mudah. Sebab komitmen waktu dan usaha juga dituntut secara maksimal dari for-sadika agar laku inovatif memiliki peluang untuk diperluas.

“...kalau bicara advokasi ini akan terus. Nah kita di kabupaten Sikka ini ada 147 desa dan 13 kelurahan dan kita target untuk bisa menjangkau desa-desa yang lain karena dari 147 desa kita baru 19 desa dan 6 kelurahan, masih sisa PR banyak...paling tidak harus disosialisasi supaya diberi pemahaman tentang kelompok disabilitas dan hak-hak difabel di sana”

Bukan itu saja, kemungkinan untuk memperluas laku inovasi ini juga ditunjukkan dengan menggandeng beberapa stakeholders' terkait untuk menggagas bentuk-bentuk riil dari kerja advokasi. Salah satunya adalah dengan menggagas kerjasama lintas daerah untuk mempelajari dan mereplikasi bentuk-bentuk advokasi yang positif dan bahkan lintas sektor.

"...di mulai di tahun 2019, diawali dengan kerjasama kami dengan BPBD Klaten...dan teman-teman dari ASB juga ikut sharing waktu itu...itu memperkenalkan kepada kami apa itu ULD kepada Forsadika, kepada caritas Maumere, dan juga stakeholders yang bekerja di isu kebencanaan. Kami menjadi mitra kerjanya dari Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten, mereka mendampingi caritas Maumere, caritas Larantuka, dan Yasalti untuk pendampingan lahirnya ULD di 3 kabupaten."

Apa saran Anda untuk meningkatkan peran serta organisasi Anda dalam perencanaan dan pembangunan di wilayah ini.

Sekurang-kurangnya ada satu pesan moral yang diminta oleh Forsadika kepada segenap instansi pemerintah baik vertikal dari pusat yang ada di daerah maupun lembaga pemerintah yang ada di daerah. Pesan itu sangat kental dengan pemahaman tentang hak-hak yang baik kelompok orang berkebutuhan khusus dan pemahaman itu harus juga bisa menjwai setiap orang atau kelompok yang ditunjuk

untuk bekerjasama dan bergerak untuk persamaan hak bagi kaum berkebutuhan khusus. Sebab tanpa menjiwai dengan lengkap perspektif perjuangan kelompok orang berkebutuhan khusus, justru akan menyulitkan dalam proses itu sendiri.

“...Untuk mengalokasikan berbagai kebijakan, itu memang kita punya 22 hak itu harus diperhatikan betul...kadang-kadang mereka juga tidak berpikir karena mereka orang normal kita ini orang difabel kalau kita tidak bersuara maka mereka tidak akan pernah berpikir sejauh itu malah mereka berpikir secara sederhana, lebih ke arah bagaimana karitatif bantuan, padahal yang kita butuh lebih jauh dari itu...nanti kalau tidak ada bantuan kita bisa mandiri...”

“...sudah banyak lembaga instansi bentukan pemerintah yang bekerja untuk kelompok rentan termasuk difabel...yang punya mimpi besar untuk kesejahteraan kelompok difabel, tapi penempatan orang-orang di lembaga-lembaga tersebut menurut saya harus diseleksi model ke seperti masuk TNI ABRI Polri...kalau orang-orang yang duduk di lembaga instansi vertikal horisontal tidak punya pespektif hak difabel, itu sama saja seperti kita menempatkan sesuatu di dalam tong kosong dan tidak bermanfaat apa-apa.”

Pemerintah Provinsi NTT dan Inovasi

Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi Inovasi Pengorganisasian Kelompok Difabel di Tingkat Desa di Kabupaten Sikka sebagai sebuah advokasi yang tumbuh dari masyarakat sendiri untuk nilai-nilai universal yang lebih besar. Maka, Pemprov NTT mengajak Inovasi Pengorganisasian Kelompok Difabel di Tingkat Desa di Kabupaten Sikka untuk ikut dicatat ke dalam *Innovative Government Award* (IGA) dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021.

3

Nama Inovasi: Koperasi Tuna Netra

Inisiator Inovasi: Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)



Kisah ini berawal dari Made dan Lukas (Tunanetra dan anggota Pertuni Kota Kupang) berdiskusi untuk membuat koperasi tunanetra. Modal awal dari Made sebesar dua juta rupiah. Lalu keduanya mengajak teman-teman tunanetra yang lain untuk bergabung dengan ketentuan setiap orang yang mendaftar adalah tunanetra atau anggota keluarga dari tunanetra dan harus menabung terlebih dahulu lima ratus ribu rupiah untuk menjadi anggota. Karena sudah dua bulan tapi belum ada yang mau bergabung di koperasi tunanetra maka kami memberikan keringanan untuk persyaratan menjadi anggota yaitu bagi yang belum memiliki uang lima ratus ribu rupiah untuk mendaftar menjadi anggota koperasi tunanetra dapat langsung meminjam di koperasi tunanetra sebesar maksimal satu juta rupiah namun dipotong lima ratus ribu untuk ditabung langsung di koperasi tunanetra untuk



menjadi anggota. Jadi anggota yang telah mendaftar hanya akan menerima uang sebesar empat ratus delapan puluh ribu saja setelah dipotong administrasi dua puluh ribu. Pinjaman tersebut akan dicicil selama lima sampai sepuluh bulan tergantung anggota itu sendiri dengan ditambah bunga sebesar 1,5%/bulan. Sehingga jika pinjamannya satu juta dan lama pinjamannya sepuluh bulan maka anggota tersebut akan mengembalikannya dengan mencicil setiap bulan sebesar seratus lima belas ribu selama sepuluh bulan sehingga total yang akan dikembalikan adalah satu juta seratus lima puluh ribu. Dengan aturan seperti itu perlahan lahan mulai ada yang mendaftar dan sampai akhir tahun 2020 anggota koperasi tunanetra telah berjumlah 15 orang.

Pada tanggal 30 Januari 2021 koperasi tunanetra sudah mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) di rumah bapak Siprianus Taus Jl. TDM 2 RT 010 RW 003 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang. Dalam RAT tersebut telah terpilih Januarius Silla sebagai ketua dan Gabriel Mbabho sebagai ketua pengawas koperasi tunanetra.

Selain itu juga disampaikan laporan keuangan tahun buku 2020.

1. Jumlah anggota: 15 orang
2. Jumlah tabungan : Rp10.200.000
3. Total pemasukan : Rp1.270.000
4. Total pengeluaran: Rp1.137.000
5. Sisa kas: Rp133.000
6. Total pinjaman: Rp15.300.000
7. Jumlah SHU: Rp1.137.000
8. Jumlah pinjaman yang sudah dikembalikan: Rp5.700.000
9. Jumlah pinjaman yang belum dikembalikan: Rp11.820.000

Sampai tulisan ini dibuat tanggal 24 Juni 2021 jumlah anggota koperasi tunanetra telah berjumlah 22 orang.

Bagaimana Cara kerja koperasi tunanetra?



Koperasi tunanetra memiliki dua orang pengelola yaitu Made dan Lukas. Masing-masing memiliki tugas

yang berbeda. Lukas bertugas untuk melakukan penagihan cicilan dan memberikan slip bukti pembayaran kepada anggota yang telah menyetorkan uang. Lukas dibantu oleh saudaranya yang non disabilitas untuk menulis slip untuk diberikan kepada anggota. Sementara Made bertugas mengambil uang yang telah terkumpul di Lukas dan menginput datanya ke aplikasi. Aplikasi yang digunakan adalah MS Excel yang dibuat sendiri dengan menggunakan rumus yang telah tersedia. Untuk menjaga kepercayaan anggota dan membuatnya lebih transparan maka setiap data yang telah diinput akan dikirim ke anggota melalui pesan WhatsApp, pesan tersebut juga akan diteruskan ke grup pengurus agar ketua dan pengawas dapat mengetahui setiap transaksi di koperasi tunanetra.

Ide yang lahir tanggal 20 Januari 2020 untuk membentuk koperasi tunanetra muncul karena beberapa alasan:

1. Tunanetra ketika membutuhkan uang sering meminjam uang ke koperasi harian yang bunganya relatif besar yaitu 20%/bulan.
2. Dalam arisan Pertuni sering kali anggota Pertuni meminta kepada pengurus untuk dapat arisan duluan dengan alasan sedang butuh mendadak.
3. Supaya ada wadah yang memiliki dana dari usaha bersama sehingga kedepan harapannya dapat membuat program yang dapat memberdayakan tunanetra itu sendiri.

Beberapa manfaat yang diperoleh para tuna netra dan keluarganya yang menjadi anggota ketika bergabung dalam wadah koperasi antara lain:

1. Dapat meminjam uang dengan bunga relatif lebih ringan yaitu 1,5%/bulan dari pada di koperasi harian yang 20%/bulan.
2. Mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah tabungan.
3. Transaksi lebih mudah diketahui karena setiap storan akan dilaporkan ke anggota yang bersangkutan melalui Whatsapp.
4. Dengan menabung anggota akan mendapat SHU tahunan dan dapat meminjam uang dengan bunga relatif rendah.

Untuk memulai ide ini, Made hanya perlu membeli buku nota dan stempel, sedangkan penunjang lainnya seperti uang tunai Rp 2.000.000 sebagai modal awal dan peralatan lainnya adalah milik pribadi Made berupa:

1. Satu unit laptop/komputer
2. Satu unit handphone.
3. Data internet

Hingga saat ini, belum ada bantuan dari pemerintah atau pihak luar, mungkin karena koperasi tunanetra belum memiliki badan hukum dan belum didaftarkan ke Dinas Koperasi. Akan tetapi, meskipun baru, dampak dari inovasi koperasi terhadap anggotanya, antara lain:

1. adanya pembagian tugas sekaligus wadah bagi tunanetra belajar.
2. adanya pertemuan setiap tahun dalam rapat anggota tahunan (RAT).
3. adanya rapat pengurus setiap tiga bulan sekali.

Harapan Made untuk korasi ini antara lain :

1. Akan merangkul lebih banyak lagi tunanetra dan secara bertahap jumlah pinjaman akan dinaikan.
2. Akan mendaftarkan koperasi tunanetra di Dinas Koperasi setempat
3. Akan mencari tahu asuransi yang dapat menjamin dana anggota Semisal Daperma.
4. Akan membuat program yang akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota.

Harapan Made, wadah ini bisa membuat tunanetra dapat berdaya dan memiliki keterampilan baru tidak hanya terpaku pada keterampilan membuat sapu kemoceng dan jasa pijat saja.

Pemerintah Provinsi NTT dan Inovasi

Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi Inovasi Koperasi Tuna Netra di Pertuni Kota Kupang sebagai sebuah model koperasi komunitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi anggota difabel netra yang tergabung dalam wadah PERTUNI Kota Kupang.

Maka, Pemprov NTT mengajak Inovasi Koperasi Tuna Netra PERTUNI Kota Kupang untuk ikut dicatat

ke dalam Innovative Government Award (IGA) dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

4

Nama Inovasi: PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA KUPANG

Inisiator Inovasi: Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF)

Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF) mengkhususkan diri secara inklusif untuk mendukung partisipasi penuh penyandang disabilitas dari aspek kehidupan dan penghidupan. Secara spesifik, PHDF ingin memastikan akses pendidikan berbasis terapi bagi kelompok anak berkebutuhan khusus yang mengalami kondisi atau masalah dengan fungsi intelektual dan fungsi adaptifnya, seperti anak autisme, *down syndrome*, *cerebral palsy*, dan keterbatasan sejenis lainnya.

Kekhususan ini dilandaskan pada kenyataan bahwa secara kasat mata kelompok anak dengan kondisi dimaksud “tidak tampak” tetapi justru menjadi nyata ketika harus melakukan aktivitas yang menuntut banyak kerja motorik dan kognitif. Justru karena kondisi “tersembunyi” ini membuat PHDF harus mengalami situasi penolakan di sana-sini termasuk oleh sekolah-sekolah yang khusus disiapkan bagi orang berkebutuhan khusus maupun sekolah-sekolah reguler. Apapun alasan atas penolakan ini justru semakin menegaskan disparitas atas akses pendidikan bagi kelompok orang berkebutuhan khusus. Maka, pendekatan yang baru harus menjadi pilihan. PHDF menggagas Pendidikan Inklusif di Kota Kupang dengan pendekatan terapi sebagai bentuk usaha inovatif untuk

semakin mendekatkan dunia pendidikan kepada kelompok orang berkebutuhan khusus.

Bagaimana proses inovasi ini lahir?

Inovasi ini lahir berdasarkan pada karakter anak-anak disabilitas yang menjadi binaan PHDF, yaitu anak dengan jenis disabilitas intelektual, dimana anak disabilitas dengan jenis ini mengalami berbagai keterlambatan disetiap tahap perkembangan yang berkontribusi pada seluruh tingkat kecerdasan anak. Mulai dari tahap perkembangan fisik (pada beberapa anak tertentu) baik itu motorik halus maupun motorik kasar, kognitif, sosial emosional, bahasa/komunikasi maupun pada perkembangan fungsi adaptif (bina diri). Sementara secara kasat mata (tampilan fisik keseluruhan), anak-anak dengan jenis disabilitas ini justru mengalami berbagai hambatan disetiap aspek dan menjalani hidup kesehariannya.

Kenapa inovasi ini lahir?

Inovasi ini lahir berdasarkan pengalaman pribadi pendiri Yayasan PHDF yaitu seorang aktivis penyandang disabilitas, alm. Bp. Iwan Hermawan Pongkapadang yang semasa hidupnya mengalami berbagai diskriminasi, penolakan dan stigma negatif dari masyarakat sekitar dan keluarga sehingga beliau tidak ingin anak-anak disabilitas pada masa sekarang juga merasakan hal yang ia rasakan, yaitu diskriminasi dari berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, perlindungan hukum maupun mata pencaharian (aspek kehidupan dan penghidupan). Sehingga program yang menjadi dasar dari lembaga kami adalah

“Pendidikan Berbasis Terapi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”.

Kapan inovasi ini lahir?

Inovasi ini muncul mulai dari tahun 2011, yaitu saat PHDF mulai terbentuk dan terdaftar secara hukum di kantor notaris.

Bagaimana inovasi ini memecahkan masalah yang Anda/komunitas/ organisasi Anda alami?

Sebagian besar anak disabilitas yang menjadi binaan PHDF berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah kebawah. Hal ini justru akan memperparah kondisi anak disabilitas itu sendiri karena peluang yang mereka miliki untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan maupun jaminan sosial secara layak juga semakin kecil. Contohnya saja dalam 1 keluarga terdapat 3 orang anak dan salah satu anak tersebut adalah seorang penyandang disabilitas, maka 2 anak yang nondisabilitas pasti akan mendapat perlakuan yang lebih *istimewa*, atau minimal terpenuhi segala kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun jaminan sosial secara layak, sedangkan seorang anak disabilitas tersebut hanya sebagai pelengkap keluarga yang mungkin tidak akan pernah terpikirkan oleh orangtuanya bahwa kelak ia juga dapat membangun masa depan yang cerah jika diberi dukungan maupun kesempatan oleh pihak keluarga.

Maka dari itu terapi merupakan fondasi awal anak disabilitas intelektual menuju masa depannya (dalam arti kemandirian). Hal itu mengingat bahwa anak-anak dengan disabilitas intelektual memiliki 2 tahapan

usia yang berbeda, yaitu *usia kalender* (usia periodik berdasarkan tanggal kelahiran) dan *usia mental* (usia perkembangan mental/kematangan berfikir yang didasarkan pada perbandingan antara tingkat perkembangan mental anak disabilitas dengan anak nondisabilitas pada usia tersebut). Sehingga dengan kesenjangan dua tahapan usia tadi, melalui terapi okupasi akan dapat mempersiapkan diri untuk hidup dimasyarakat. Hal ini mengingat bahwa didalam terapi okupasi terdapat banyak terapi seperti terapi sensori integrasi, terapi wicara, terapi ramidial, terapi behavior, terapi playfloor, dll.

Adapun pelaksanaan terapi tersebut dimulai dari survey anak-anak disabilitas yang ada pada suatu wilayah, lalu melakukan assesmen kepada anak disabilitas, keluarga dan lingkungan sekitar, dan pendekatan kepada Ketua RT untuk memint ijin melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang hak-hak penyandang disabilitas sesuai UU No.8 Tahun 2016, baik untuk keluarga penyandang disabilitas itu sendiri maupun untuk masyarakat sekitar agar anak-anak disabilitas tersebut tidak mendapat stereotip, stigmasasi, pelabelan maupun diskriminasi. Begitu pula kami melakukan pendekatan ditingkat kelurahan-kelurahan yang menjadi tempat tinggal anak. Akhirnya secara perlahan-lahan, jika ada program/bantuan dari pemerintah, ketua RT tersebut akan memperhatikan warganya yang penyandang disabilitas tersebut.

Sehingga layanan terapi yang kami berikan kepada anak disabilitas tersebut menjadi bagian *advokasi nyata* yang dapat memicu kesadaran pihak keluarga,

masyarakat, maupun lingkup pemerintahan lokal setempat, minimal mulai dari lingkup terkecil yaitu RT/RW.

Siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini di awal pelaksanaannya?

- Anak disabilitas itu sendiri, keluarga penyangga disabilitas serta masyarakat sekitar (3 aktor utama dalam proses assesmen)
- Ketua Yayasan PHDF sebagai programmer yang bertugas menyusun program pembelajaran langsung kepada anak disabilitas berdasarkan hasil assesmen yang telah dilakukan oleh terapis, setelah itu selama 3 bulan dan 6 bulan, ketua harus melakukan monitoring maupun evaluasi program berdasarkan laporan tertulis maupun video capaian perkembangan anak yang telah direkap oleh terapis. Jika terjadi kecolongan/kesalahan pada tahapan pembelajaran anak, maka pemrograman akan dimulai dari awal, contohnya : program toilet training, lalu program kamar tidur, program makan, program ke sekolah, dll.
- Bendahara
- Sekertaris
- Kepala Bidang Ekonomi dan Mitra Usaha Dana
- Terapis
- Pemerintah (Ketua RT/RW, Kelurahan, Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2 SLB yang menjadi mitra PHDF, beberapa Puskesmas diwilayah kerja tempat tinggal anak, Dekranasda, Dinas Koperasi dan Nakertrans Prov NTT)

- Volunteer dan peneliti/pemegang yang sedang melakukan tugas PKL maupun aktivis pendidikan inklusi.

Berapa biaya yang dikeluarkan untuk memastikan inovasi ini dapat dilaksanakan?

Rp. 75.000.000,- untuk pemberian 6 buah terapi berdasarkan masing-masing kebutuhan anak disabilitas.

Dari mana sumber pembiayaan untuk inovasi ini?

Pada awalnya kami melakukan pembiayaan sendiri melalui kegiatan swadaya yaitu pemberdayaan yang bersifat halal, seperti pembuatan abon ikan tuna, bakso tuna, catering, usaha ternak, perkiosan maupun pembukaan kursus “Ganeca English Course” untuk kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas dan untuk membiayai operasional Yayasan PHDF.

Lalu sejak tahun 2016, PHDF mulai mendapat support pembiayaan dari NGO Internasional. Namun semenjak musibah seroja tahun 2021 dan meninggalnya pendiri Yayasan PHDF, maka ditahun ini kami tidak mendapat subsidi dari donor, sehingga sejak awal tahun ini kami memberlakukan subsidi silang bagi keluarga penyandang disabilitas. Jika keluarga anak disabilitas berasal dari keluarga tidak mampu, maka tidak dipungut biaya, sedangkan bagi keluarga mampu (orangtua PNS) maka dikenakan biaya spp per bulan. Walaupun dengan system spp subsidi dilang serta usaha yang bersifat halal, tetap tidak dapat menutup biaya operasional Yayasan, sehingga saat ini terap

maupun staff bersifat volunteer karena keterbatasan sumber dana organisasi.

Siapa saja yang mendapat manfaat dari inovasi ini?

Anak penyandang disabilitas (khususnya yang menjadi *champion* anak disabilitas), keluarga, masyarakat sekitar, warga sekolah tempat anak disabilitas belajar (Kepala Sekolah, guru-guru, teman-teman baik yang disabilitas maupun yang nondisabilitas), Tokoh Agama (2 Gereja yang mulai menjadi Gereja Inklusi), Lintas sektoral pemerintah (Dinas-dinas terkait), Penyedia Layanan Kesehatan khususnya 3 Puskesmas yang mulai ramah dengan anak disabilitas binaan PHDF, Dunia Usaha (kelompok UMKM) dan media lainnya yaitu pihak kampus untuk berbagai riset maupun penelitian/kegiatan magang untuk mendukung dunia pendidikan yang inklusi.

Bagaimana mereka mendapat manfaat dari inovasi ini?

Daftar penerima manfaat	Jumlah	Sebutkan
Anak Disabilitas dan orangtua anak disabilitas	80	40 anak disabilitas dan 40 orangtua/pendamping/keluarga anak disabilitas mendapatkan layanan terapi
Anak non disabilitas dan orang dewasa	60	30 anak non disabilitas dan 30 orang pendamping diikutkan dalam berbagai sosialisasi tentang kedisabilitasan maupun tentang pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas

Dinas/ Instansi Pemerintah	15	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnakertrans, Kominfo, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dekranasda yang dilibatkan dengan berbagai kondisi kedisabilitas anak/keluarga penyandang disabilitas
Sekolah/Lembaga Pendidikan	9	SLB Asuhan Kasih, SLBN Kota Kupang, SMPN 3 Kota Kupang, SDN Batuplat-2, PAUD Mawar, PAUD Tunas Zaitun, PAUD Piastena, PAUD Teruna Elim, dimana anak disabilitas PHDF bersekolah
Puskesmas/ RS/Lembaga Layanan Kesehatan	5	Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Puskesmas Sikumana, Pusk Oebobo dan Pusk Oesapa yang didukung dengan peningkatan kompetensi petugas kesehatan melalui berbagai pelatihan maupun pengadaan fasilitas puskesmas yang ramah anak Disabilitas
Organisasi/ Lembaga Adat/Agama	3	Gereja Pohonitas Alak, Gereja Imanuel Oepura dan Gereja Batu Karang Oebobo, dimana beberapa jemaat mendapat intervensi dari PHDF
Organisasi Masyarakat/LSM	2	Hand Fortuna, Yayasan Cahaya Kasih yang dilibatkan dengan berbagai kegiatan PHDF sehingga

		menjadi LSM yang mulai inklusi
Pihakswasta/dunia usaha	5	Anggota UMKM Kota Kupang yang tergabung dalam berbagai stand/bazaar/pameran yang mendukung program pemerintah menjadi dunia usaha yang inklusi
Lainnya (media massa, riset/kampus, dll)	6	Universitas Citra Bangsa Kota Kupang, Universitas Katolik Soegiyopranoto Semarang, STIKOM Uyelindo, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Padjadjaran Bandung dengan berbagai kegiatan riset, magang maupun program PKL dari kampus tersebut

Bagaimana peran pemerintah/aparat (desa/kota/kabupaten/provinsi) membantu Anda/organisasi Anda menyukkseskan inovasi ini?

Sampai saat ini untuk bantuan para aparat pemerintah baru sebatas dukungan regulasi/kemudahan akses saja, namun untuk pembiayaan sama sekali belum ada kontribusi.

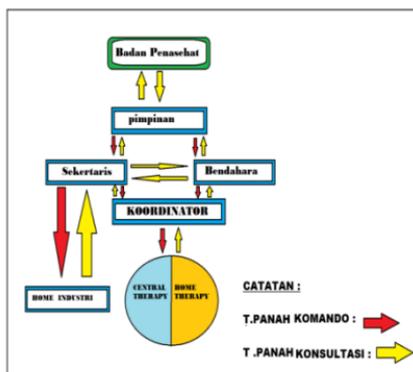
Contoh :

- Ketua RT/RW sudah mulai menaruh perhatian lebih pada keluarga disabilitas dampingan PHDF, sehingga akses ke kantor lurah maupun dinas sosial juga diprioritaskan.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.NTT (Khususnya Kabid PKLK) menegaskan bahwa dinas PK bekerjasama dengan LMS/NGO untuk

menjaring dan mengupayakan anak disabilitas agar dapat bersekolah dengan cara memberikan kemudahan akses pendidikan dan bersedia menerima laporan satuan pendidikan tertentu jika sekolah tersebut menolak calon siswa/ anak disabilitas yang akan bersekolah, baik di SLB maupun disekolah reguler.

Bagaimana interaksi antar anggota organisasi Anda setelah inovasi ini lahir?

Interaksi antar anggota organisasi berjalan dengan sangat lancar karena kami mempunyai suatu sistem, yaitu *sistem komando* (interaksi komando dari atasan kepada staf dibawahnya berdasarkan tugas yang sudah tercantum dalam kontrak kerja) dan *sistem koordinasi/konsultasi* (yaitu setiap bidang mempunyai kesempatan untuk berkoordinasi/berkonsultasi antara sesama bidang pelayanan dan pimpinan eksekutif yayasan, maupun kepada pembina yayasan jika terjadi sesuatu hal yang perlu didiskusikan bersama).



Apakah ada rencana inovasi ini akan dimodifikasi/diperluas cakupannya/berhenti dilakukan di masa yang akan datang? Kenapa?

Rencana tahun 2022, inovasi ini akan diperluas dengan pembuatan TK Inklusi agar anak-anak disabilitas dapat bersekolah bersama-sama dengan anak nondisabilitas lain pada usianya, sedangkan sementara ini PHDF hanya mendampingi sekolah-sekolah mitra dimana anak disabilitas binaan PHDF bersekolah, sehingga kedepannya PHDF dapat menjadi barometer pendidikan inklusi di Kota Kupang melalui implementasi teknik dan metode pembelajaran yang berpusat pada anak, berdasarkan jenis kedisabilitasan dan karakter kebutuhan anak disabilitas tersebut.

Terapi Sensori Integrasi dan Terapi Wicara



Terapi Ramidial di Central Terapi PHDF

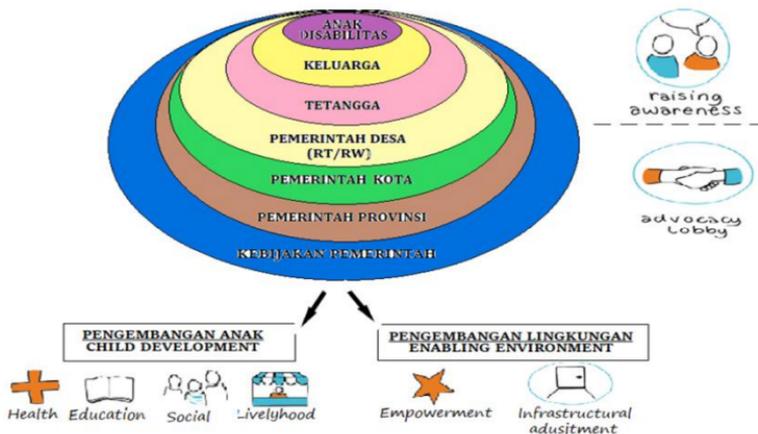


Kegiatan Fisioterapi di Central Terapi PHDF



Terapi Okupasi dalam bentuk pelatihan keterampilan agar remaja disabilitas tetap produktif





★ Jika anak diberikan :

“PELUANG/OPORTUNITY”
(INKLUSI)

➔ TOLERANSI

★ Jika anak diberikan :

“STIGMA (-)”

➔ DISKRIMINASI

terlihat

tidak terlihat

Masyarakat dengan stigma diperlukan “ADVOKASI”

Pembangunan Inklusi dengan melibatkan semua
lintas sektoral pemerintah, masyarakat dan keluarga penyanggah disabilitas.

Pemerintah Provinsi NTT dan Inovasi

Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi Inovasi Pendidikan Inklusif di Kota Kupang oleh Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora sebagai sebuah upaya inovasi yang sangat penting bagi NTT. Maka, Pemprov NTT mengajak Inovasi Pendidikan Inklusif di Kota Kupang untuk ikut dicatat ke dalam Innovative Government Award (IGA) dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA KUPANG Inisiator Inovasi: Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF)

5

Nama Inovasi: Whats app Group Tanggap Covid-19 NTT Inklusif

Inisiator Inovasi: Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN NTT)

Whats app Group Tanggap Covid-19 NTT Inklusi lahir tahun lalu pada tanggal 6 April 2020. Inisiatif ini lahir dari pendiri GARAMIN NTT (Berti Malingara, ELmi Ismau, Yani Nunuhitu, Yafas A Lay, Yunita Baitanu). Tujuan forum ini dibentuk agar membangun solidaritas antar penyandang disabilitas baik individu maupun yang telah tergabung dalam organisasi di Pulau Timor, Flores dan Sumba. Selain Organisasi disabilitas, ada juga LSM lokal, Lembaga keagamaan, LSM Internasional, media, kampus, organisasi independent, legislative dan pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 dan isu-isu advokasi hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan di NTT. Hingga saat ini Tanggap Covid-19 NTT inklusi memiliki anggota sebanyak 177 orang. Jaringan Tanggap Covid-19 NTT dibangun secara swadaya dan dimentori oleh Jaringan Disabilitas Nasional melalui pertemuan mingguan bernama WEBKUSI (Webinar Inklusi). Penguatan kapasitas dari WEBKUSI kepada jaringan di NTT terutama Organisasi disabilitas yang baru terbentuk seperti GARAMIN NTT, KIPDA Soe dan FORSADIKA cukup besar. Ketiga LSM ini sangat aktif dalam mendukung Survei dampak Covid-19 terhadap penyandang disa-

dalam kegiatan jaringan disabilitas nasional yang bermitra dengan BAPPENAS pada tanggal 9 Juni 2020 lalu. GARAMIN NTT mengkoordinir grup tanggap inklusi dengan berkolaborasi dengan organisasi disabilitas maupun mitra pembangunan melalui sharing informasi terkait isu disabilitas yang ada di nasional maupun yang ada di daerah serta menyelenggarakan kegiatan webinar sebanyak 10 kali.

Webinar
 “
 Dampak Pandemi COVID-19 Bagi
 Penyandang Disabilitas
 Dan Mempersiapkan Normal Baru
 Yang Inklusif Di NTT

Narasumber

- M. Joni Yulianto**
 Insanor Jaringan DPO Region Covid-19
- Ishak Salim**
 Founder @ The 401 Makassar
 Ketua Umum Perguruan Difabel Indonesia
 (PDI) Sulawesi (Perdi)
- Berti S D Malingara**
 Founder GARMIN NTT
 Koordinator Forum Tanggap COVID-19
 NTT Inklusif
- Imanuel Nuban**
 Ketua KIPDA ITS

Moderator

- Ana Djukana**
 Anggota Parlemen

Mentor

- Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Kn.**
 Gubernur Nusa Tenggara Timur
- Dinna N. Noach**
 Staf Khusus Gubernur NTT
 Bidang Disabilitas

Pendaftaran.
<https://bit.ly/3eQAYHB>
 CP. 0852-3900-0060 Yani Nunuhitu

Jumat 24 Juli 2020
10.00-12.00
Wita

TESEDA JURU BAHASA ISYARAT

LIVE <http://www.radioswarant.com/streaming> Garamin NTT

Ada beberapa tujuan kami menyelenggarakan webinar swadaya ini. Pertama, untuk membangun solidaritas, menjalin silaturahmi antar daerah dan saling membagikan informasi dan pengalaman. Kedua, kami ingin menjadi jembatan bagi organisasi disabilitas dengan pemerintah, kampus, pemberi beasiswa dan organisasi disabilitas di level nasional. Ketiga, untuk meningkatkan kapasitas diri maupun organ-

isasi difabel untuk bisa lebih percaya diri dalam membangun jaringan. Kapasitas diri dan skill memfasilitasi sebuah forum diskusi online menjadi modal dalam pergerakan kami ini tentunya kami peroleh melalui proses belajar dan latihan berulang-ulang kali.



Diskusi ONLINE

" Menuju Perguruan Tinggi NTI yang INKLUSIF: Kampus dan Mahasiswa/i Difabel Beradaptasi Ditengah Situasi COVID-19 "



Sabtu, 23 Mei 2020
Pukul : 14.00 - 16.00

Narasumber:



Facebook
Garamin NTT



Voni Y. Malelak, S.Si (Tech), MA
Wakil III
Bidang kemahasiswaan APS Kupang

HOST:



Elmi S. Ismau, A.Md
Wakil Direktur GARAMIN NTT



Dr. Lanny Koroh, M. Hum
Dosen
Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Moderator:



Berti Malingara, SE.,MDPP
Koordinator Forum Tanggap
C-19 NTT INKLUSI



Nelci Therik, S.Pd, M.Pd
Ketua Prodi Pendidikan Luar Biasa
Universitas San Pedro Kupang



I Made Astika Dhana, A.Md
Pertani Kota Kupang / Forum Tanggap
C-19 NTT INKLUSI



Honorata Rambu Anna Djawa
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa
Universitas San Pedro Kupang



Fendri Detakiuk
Mahasiswa Fakultas Theologi
Universitas Kristen Artha Wacana



Dinna N. Noach
Mahasiswa FISIP
Universitas Nusa Cendana Kupang



Yulianus Wallu
Mahasiswa
Institut Agama Kristen Negeri Kupang



Fandy Dawenan, SS., MDPP
Alumni Australia Awards Indonesia
FLINDERS UNIVERSITY

Tersedia Layanan
Juru Bahasa Isyarat


Garamin NTT


Garamin NTT


Garaminntt@yahoo.com


081997988296
082339485302

GARAMIN mampu beradaptasi dengan teknologi seperti mengoperasikan zoom, menggunakan google formulir, mendesign undangan kegiatan, dan menggunakan facebook untuk mempromosikan kegiatan melalui siaran langsung yang disediakan oleh FB. Tujuan lain dari webinar yang kami lakukan adalah untuk mengupdate situasi di NTT, mempromosikan kerja organisasi disabilitas maupun LSM lokal yang focus berjuang untuk isu inklusi disabilitas di NTT.

Sebagai anak muda difabel kami juga berkontribusi di nasional dengan mengambil tanggung jawab sebagai anggota panitia webkusi dan salah satu anak muda difabel (Sandra Lola) berhasil menjadi salah satu narasumber untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan usaha menjahit dan sebagai designer muda.

Kegiatan diskusi online Jaringan Tanggap Peduli Covid-19 NTT Inklusi.

Berikut tema-tema diskusi online atau webinar yang telah diselenggarakan oleh jaringan ini antara lain;

1. Dimanakah penyandang disabilitas berada saat COVID-19 melanda NTT?
2. Menangkap Peluang Dana Desa saat COVID-19 untuk pendataan penyandang disabilitas di desa-desa se-NTT.
3. Update perkembangan Data Penyandang Disabilitas dan Bansos yang dilakukan pada 5 Mei 2020.

4. Kampus dan Mahasiswa-mahasiswi difabel beradaptasi ditengah situasi Covid-19 part satu, 23 Mei 2020.
5. Kampus dan Mahasiswa-mahasiswi difabel beradaptasi ditengah situasi Covid-19 part dua, yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2020
6. Kolaborasi inklusi Alumni Australia Awards dan LPDP saat Pandemi Covid-19 bergerak mendukung difabel mengakses beasiswa bagi di Nusa Tenggara Timur, 13 Juni 2020
7. Relasi Media dan disabilitas dalam mengeliminir Covid-19 di NTT, 16 Juni 2020.
8. Media, sahabat perempuan difabel dalam memperjuangkan hak dan keadilan di NTT, 2 Juli 2020
9. Webinar dampak Pandemi covid 19 bagi penyandang disabilitas dan mempersiapkan normal baru di NTT, 24 Juli 2020
10. Webinar Peran unit layanan disabilitas dalam mempersiapkan generasi pekerja social yang inklusif di Akademi Pekerjaan Sosial, 4 Agustus 2020
11. Talk show peran kampus dalam mendukung Pendidikan inklusi di NTT, 3 Desember 2020

GARAMIN NTT berharap forum ini bukan saja akan ada saat pademi saja tapi akan menjadi forum yang akan menjadi media komunikasi dan informasi dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi NTT.

Keanggotaan Jaringan Tanggap Peduli Covid-19 NTT Inklusi

SEMINAR VIRTUAL

Forum tanggap Covid-19 NTT Inklusi

"Media, Sahabat perempuan difabel dalam memperjuangkan hak dan keadilan di NTT"

Narasumber :

- Joey Ribi Ga (Jurnalita)
- Agrianus Marutho Bere (Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia)
- Rambu Alanau Mella (Berkas SIP Tanggap Bencana Perempuan Sisa)

Moderator :

- Ana Djukana (Aktiva Perempuan)
- Paulus Manek (Kelas Perlemba Ta)

Penanggap :

- Yohana Felisitas Bunga Keraf, S.Pai (Praktis)
- Imanue Nuban (Kelas KPDA TTS)
- Petronela Naskofi (Kelas Negeri Berkebutiran Sisa Bina)
- Viktor Haning (Kelas IPC NTT)

Kamis, 2 Juli 2020
17.00 - 19.00 Wita

LIVE **f** **Garamin Ntt**

Pendaftaran dapat dilakukan melalui link <https://bit.ly/3eKYsFt> untuk mendapatkan password dan ID → GP 0652-6900-6060 Yani Nuruhite

TESEDIA JURU BAHASA ISYARAT

Keanggotaan dalam grup ini bersifat sukarela. Anggota grup adalah individu atau organisasi disabilitas, LSM local, LSM Internasional, Pemerintah, Universitas, Media dan Komisi Keterbukaan informasi Publik NTT yang punya kepedulian dan siap bergerak Bersama memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di NTT.

Berikut daftar Anggota Forum Tanggap Covid-19 NTT Inklusi, antara lain: Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) NTT, PERTUNI (Perkumpulan Tuna Netra Indonesia), Yayasan Transfigurasi Tabor Mulia (YTTM), Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI NTT), Komunitas Tuli Kupang (KTK), Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA) Indonesia, Komite Penyand

dang Disabilitas (KIPDA) TTS, National Paralympic Committee (NPC) / Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas NTT, Forum belarasa difabel nian Sikka (FORSADIKA), GERKATIN, APDIS (Aliansi Penyandang Disabilitas), Forum Disabilitas Nun Baun Sabu (NBS), Forum Disabilitas Oebobo, Bengkel APPEK, Sanggar Suara Perempuan (SSP), Yayasan Pijar Timur Indonesia, Caritas Keuskupan Maumere/ Forum belarasa difabel nian Sikka (FORSADIKA), Keuskupan Ende, Kelompok Kasih Insani (KKI), Yayasan Bahtera Sumba, Pusat Rehabilitasi Yakkum, Yayasan Wali Ati (Yasalti), Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba, Credos Institute Undana, PIKUL, PIAR NTT, Forum Tanggap Bencana, Forum Genre, Yayasan Tanpa Batas, Forum Academia NTT, Susteran, IRGSC, Yayasan Kuan Mnasi, Sanggar Suara Perempuan (SSP), Jarpuk Ina Foa, Humanity Inclusion (HI), Save the Children, SNV Netherlands Development Organization, Wahana Visi Indonesia, PLAN NTT, NRL, Akademi Pekerjaan Sosial, Institute Agama Kristen Negeri, Universitas Nusa Cendana, Universitas San Pedro, Universitas Kristen Artha Wacana, DPRD Kota Kupang, Radio Max FM, Timex, Pos Kupang, Liputan 6/Dian Timur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Desa, BAPPEDA Provinsi NTT, Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Sosial Kota Kupang, RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Naimata, Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Pemerintah Desa Oesena, Komisi Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan ini merupakan kegiatan swadaya GAR-AMIN NTT dan didukung oleh jaringan/ anggota

yang ada. Webinar-webinar yang diselenggarakan tidak menggunakan dana karena pembicara-pembicar yang hadir memberikan waktu dan pengetahuan dengan sukarela. Yang dibutuhkan hanya fasilitas zoom berbayar yang mendapat sumbangan dari Ibu Eni ayng tinggal di Adelaide sebesar 1 juta untuk kami mendaftarkan zoom berbayar lalu swadaya GARA-MIN setiap bulan sebsar 285 ribu per bulan. Jika ditotal hampir Rp 3 juta.

Anggota mengisi form data organisasi dan tema-tema apa saja yang ingin diangkat serta kekuatan isu masing-masing untuk jadi bahan sinegitas dalam grup.

Grup ini sangat bermanfaat bagi organisasi difabel, pemerintah, media, akademisi dan masyarakat akar rumput untuk bisa mendukung advokasi hak-hak disabilitas di NTT.

Pemerintah Provinsi NTT dan Inovasi

Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi Inovasi Pendidikan Inklusif di Kota Kupang oleh Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora sebagai sebuah upaya inovasi yang sangat penting bagi NTT. Maka, Pemprov NTT mengajak Inovasi Pendidikan Inklusif di Kota Kupang untuk ikut dicatat ke dalam Innovative Government Award (IGA) dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA KUPANG Inisiator Inovasi: Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF)

BAB V PENUTUP

Dengan terpotretnya 18 Organisasi penyandang disabilitas ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekuatan besar untuk mendukung proses menuju pembangunan NTT inklusif di NTT. Isi dari profil ini akan membantu organisasi penyandang disabilitas semakin percaya diri dan memiliki jaringan yang akan semakin luas sehingga bisa terus meningkatkan kapasitas baik individu maupun kapasitas organisasi agar bisa terlibat secara aktif dan penuh dalam pembangunan di NTT. Kehadiran profil ini merupakan karya kasih dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara timur dalam memberikan ruang bagi kelompok rentan untuk menunjukkan kerja kolaborasi yang kuat untuk NTT inklusi. Buku ini adalah potret yang menunjukkan kekuatan dan kemampuan organisasi penyandang disabilitas dalam masa pandemi sebagai subyek pembangunan.

Buku Profil ini adalah proses dinamis yang memungkinkan pembaharuan setiap tahun agar bisa memotret kondisi terkini sekaligus merekam organisasi-organisasi baru di kabupaten-kabupaten lain yang akan terus bermunculan sebagai upaya advokasi di level kabupaten di provinsi NTT. Keterbatasan isi buku karena keterbatasan waktu menjadi pemicu agar ke depan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat NTT dan Indonesia.

Buku ini akan dijadikan sebagai salah satu acuan pemerintah maupun stakeholder lainnya dalam perencanaan seperti Rencana Aksi Daerah Penyandang disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M. (2016). Akses Ruang yang Adil: Meletakkan dasar keadilan sosial bagi kaum difabel, makalah disampaikan pada Diseminasi Nasional "Perwujudan Fasilitas umum yang aksesibel bagi semua", Yogyakarta, 27-28 September 2021.
- Fuad, Bahrul, (2010). Revitalisasi Gerakan Difabel di Indonesia. *Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel*, edisi 65, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Joni Yulianto, M (2007), *"Investigation on the influence of the Disability Movement in Indonesia: An advance Investigation of the Influence of the Disability Movement in Indonesia"*, VDM Verlag Dr.Muller, May.
- Kondrat, M.E. & Julia, M. (1997). *Participatory Action Research:Self-Reliant Research Strategies for Human Social Development. Social Development Issues*,1991: 32-49
- Kurnia, Damaiati R.;Slamet, Thohari (2016). Menormalkan yang Dianggap "Tidak Normal" (Studi Kasus: Penertiban Bahasa Isyarat Tunarungu di SLB Malang). *IJDS:INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY,[S.I]*,v.3,n.1,p. 34-43.

Li, Tania Murray, (2012). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, Marjin Kiri, Jakarta

Liu Ekawati dan Brown, Lyla, (2015). *Disability data and the development agenda in Indonesia*, dalam INSIDE Indonesia 119:Jan-Mar 2015.

Oliver, M. (1990). *The politics of disablement*. London: Macmillan.

_____. (1996) *Understanding Disability: From theory to practice*. Basingstoke, Palgrave Press

_____. (1997) Disability Movement is a new social movement, in community development journal, Vol.32, No 3, p.244-251.

Salim, Ishak (2021) *Keluar dari Hegemoni Pencacatan*.

Suharto, (2010) *Community-based Empowerment for Translating Diffabled People's Right to work: A Case Study in Klaten Regency, Central Java, Indonesia*, Research Papre, The Hague, The Netherlands: International Institute of Social Studies.

LAMPIRAN I

Kesan Tim Penyusun Profil Organisasi Penyandang Disabilitas

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Baik, akhirnya perjuangan saya selama ini untuk saudara-saudari selesai juga. Ide ini datang dari saya dan Pak Jonny Ataupah, dimana Perencanaan kita mau jalan untuk sahabat-sahabat kita ini apa yang harus kita buat supaya perencanaan dan kebijakan tepat sasaran, maka kita perlu data sehingga mendorong pendataan yang lebih baik. (**Tresia M. Sarina Lendes - Bappelitbangda**)

Saya merasa sangat senang ketika Bapelitbangda Provinsi NTT meminta saya masuk dalam tim penyusun profil disabilitas Nusa Tenggara Timur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, saya adalah salah satu penyandang disabilitas yang beruntung karena mendapatkan pengalaman belajar bersama orang-orang hebat. Bisa mendengarkan kisah-kisah inovatif dari organisasi disabilitas yang ada di 11 kabupaten dan satu Kota membuat saya menjadi terinspirasi. Kalau dulu penyandang disabilitas hanya bisa menjadi objek dari kebijakan pemerintah bahkan sering sebagai target penerima bantuan saja, namun dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam tim penyusun profil disabilitas NTT ini, Bapelitbangda NTT telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas dimana salah satu hak penyandang disabilitas yai-

tu berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang inklusif. (**I Made Astika Dhana - PERTUNI Kota Kupang**)

Bapelitbangda Provinsi NTT bersama dengan Organisasi Difabel Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusif (GARAMIN) NTT dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kota Kupang, melakukan Penyusunan Profil Penyandang Disabilitas di Nusa Tenggara Timur. Dalam Penyusunan Profil Disabilitas ini, dari 15 orang ada 3 orang difabel yang terlibat sebagai Tim Penyusun, Saya di percayakan untuk menjadi salah satu perempuan difabel yang terlibat aktif sebagai Tim Penyusun Profil penyandang disabilitas Provinsi NTT. Kami difabel diberikan kesempatan oleh Bapelitbangda Provinsi untuk terlibat aktif mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Dari Proses ini, saya secara pribadi banyak mendapatkan hal-hal baru seperti mendesain pertanyaan, meluangkan waktu untuk membantu mengisi form profil difabel bagi beberapa organisasi difabel di Kabupaten yang mengalami kesulitan dan kendala dalam mengisi form profil disabilitas, Tabulasi Data profil difabel dan belajar wawancara terkait dengan Inovasi yang sudah dilakukan oleh organisasi difabel. Melalui penyusunan Profil Difabel, merupakan salah satu hal yang positif dan bentuk wujud nyata, dimana Pemerintah provinsi (Bapelitbangda Provinsi) memberikan Akses, sarana pintu masuk, ruang dan kesempatan yang luas bagi difabel dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak difabel diberbagai lintas sektor, selain itu juga penyandang disabilitas dapat menjadi subjek dalam mendukung

Tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Inklusif. *“Live your life Without limits”*. (Elmi Sumarni Ismau – GARAMIN NTT)

Buku profil ini adalah bukti bahwa kesetaraan itu ada. Bukti bahwa difabel bisa duduk bersama dan melahirkan ide-ide yang membawa perubahan untuk Nusa Tenggara Timur. Awal persahabatan yang indah antara organisasi penyandang disabilitas dan pemerintah. Proses yang menjadi ruang untuk saling belajar bekerja sama dalam tim yang inklusi. Sebagai orang muda yang dipercaya tentu menjadi tanggung jawab besar bagi saya dan 3 sahabat difabel lainnya. Bappelitbangda sangat yakin kalau kami bisa. Itu yang membuat kami belajar untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang kami miliki. Kepercayaan diri terbangun, kemampuan bekerja dalam tim terlatih, Kemampuan memfasilitasi webinar bersama pemerintah menjadi lebih baik, kemampuan menganalisis terlatih dan masih banyak lagi pelajaran hidup bermakna yang saya peroleh. Ini adalah pengalaman pertama menyiapkan dokumen yang kelak akan bisa menjadi acuan untuk pemerintah dalam melakukan perencanaan yang inklusi yang tentunya tidak melupakan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan yang masih perlu untuk dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan di NTT. Tim penyusun adalah pemberi kekuatan terbesar bagi saya saat jatuh sakit terkena COVID -19. Semoga buku profil ini bisa bermafaat bagi pemerintah, organisasi difabel yang sedang merencanakan berbagai upaya untuk beradaptasi dengan situasi pandemic tanpa melupakan upaya pemenuhan

hak-hak bagi difabel di NTT. Buku ini akan menjadi salah satu kekuatan pergerakan organisasi difabel di NTT untuk bersinergi membangun Indonesia Inklusi dari pulau-pulau dan kampung-kampung di Provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur. **(Berti Soli Dima Malingara - GARAMIN NTT)**

LAMPIRAN II

Lampiran Foto Proses Penyusunan Profil Organisasi Penyandang Disabilitas Nusa Tenggara Timur

Rabu, 6 Januari 2021 Pertemuan dengan Kepala Bappelitbang Provinsi NTT membahas tentang rencana Penyusunan Profil Organisasi Penyandang Disabilitas NTT dengan melibatkan Penyandang disabilitas



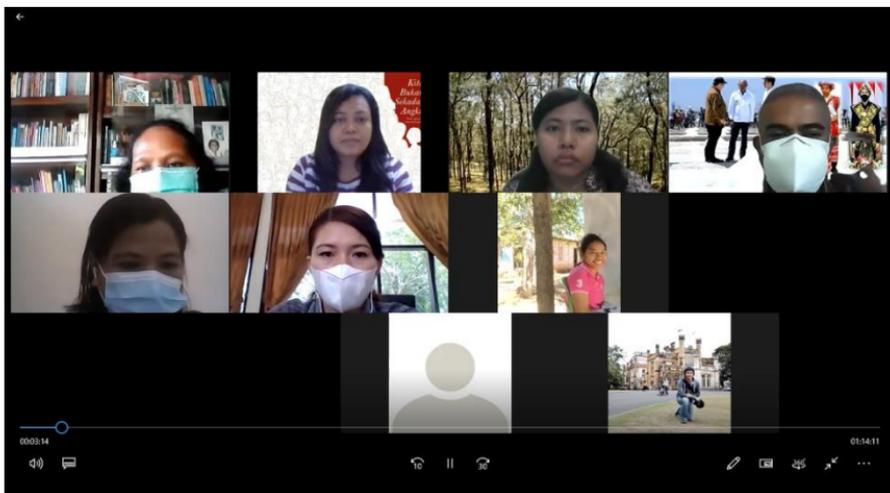
Jhony Erikson Ataupah (Kabid Sosbud Bappelitbangda Provinsi NTT), Yani Nunuhitu (Garamin NTT), Yunita Baitanu (Garamin NTT), Elmi Sumarni Ismau (Garamin NTT), Kosmas D Lana (Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT), Dinna Novista Noach (Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas), Berti Soli Dima Malingara (GARAMIN NTT), Theresia M. Sri Sarinah L (Kasubid Kesos dan Budaya pada Bappelitbangda Nusa Tenggara Timur

Jumat, 8 Januari 2021 Rapat Perdana Tim Penyusun Profil Organisasi Penyandang Disabilitas NTT

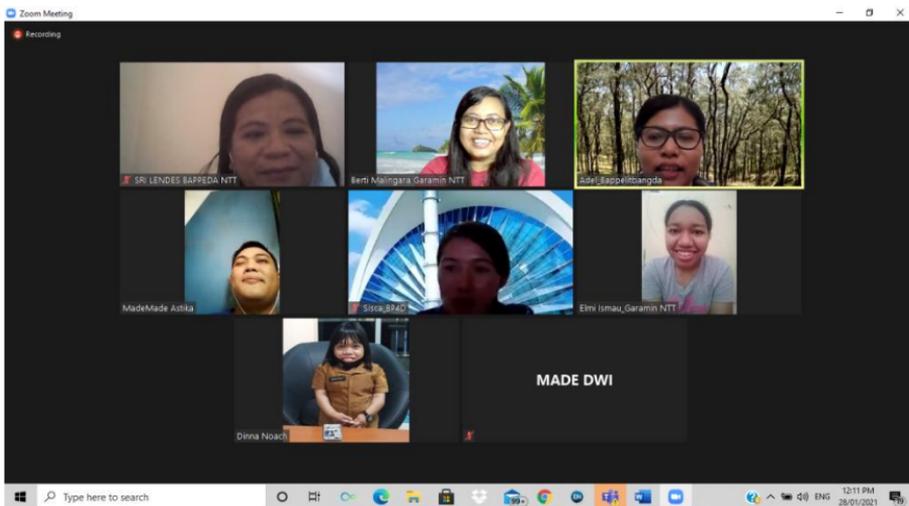




Rapat kedua secara virtual melalui zoom meeting, 15 Januari 2021



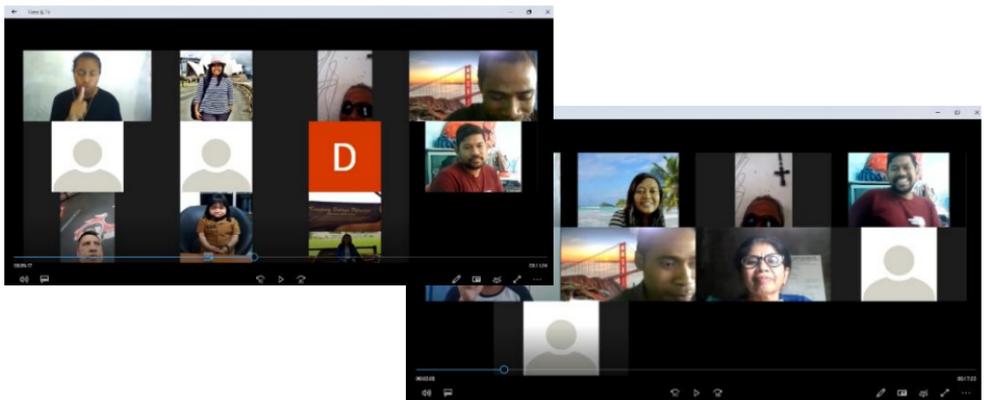
Rapat ketiga via zoom, 28 Januari 2021



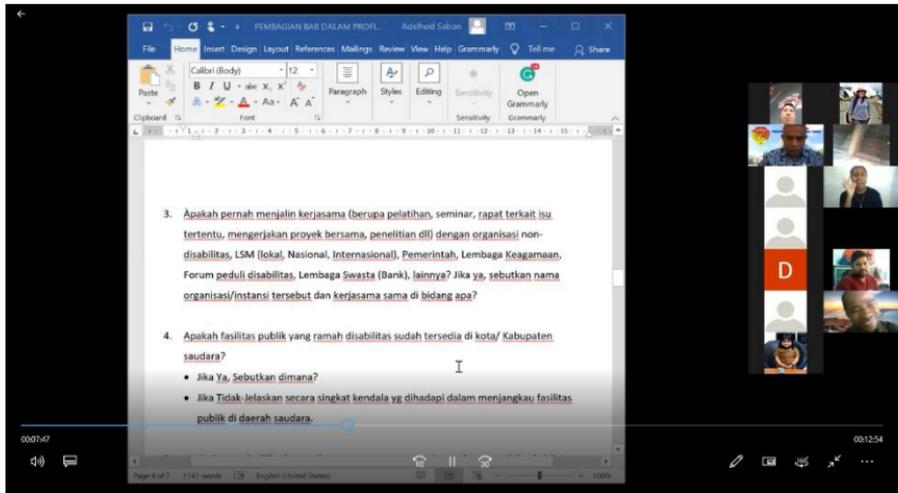
Persiapan Simulasi Tim penyusun yang berasal dari Organisasi Difabel, 16 Februari 2021



Pertemuan dengan Organisasi difabel di NTT untuk presentasi rancangan Profil, 17 Februari 2021



Koordinasi Tim Penyusun Buku, 2 Juni 2021



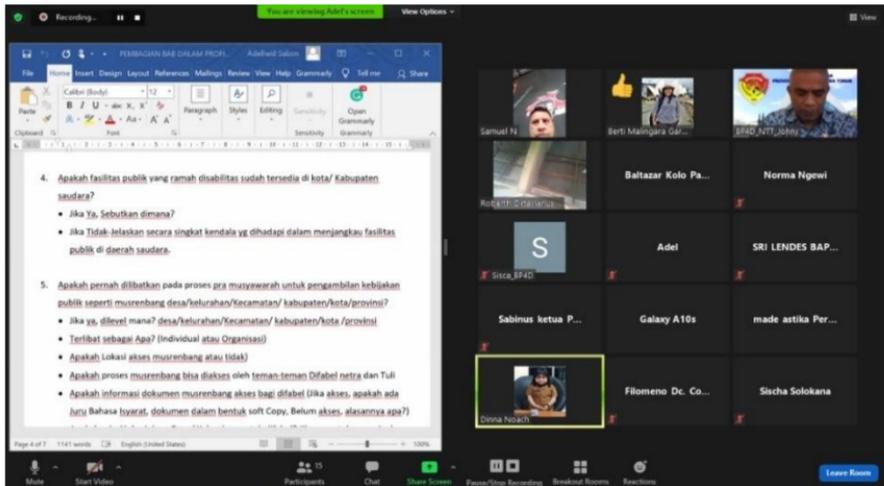
The screenshot shows a Zoom meeting window. On the left, a Microsoft Word document titled "PEMBAGIAN BAB DALAM PROFIL..." is open. The document contains two numbered questions:

3. Apakah pernah menjalin kerjasama (berupa pelatihan, seminar, rapat terkait isu tertentu, mengerjakan proyek bersama, penelitian dll) dengan organisasi non-disabilitas, LSM (lokal, Nasional, Internasional), Pemerintah, Lembaga Keagamaan, Forum peduli disabilitas, Lembaga Swasta (Bank), lainnya? Jika ya, sebutkan nama organisasi/instansi tersebut dan kerjasama sama di bidang apa?

4. Apakah fasilitas publik yang ramah disabilitas sudah tersedia di kota/ Kabupaten saudara?

- Jika Ya, Sebutkan dimana?
- Jika Tidak Jelaskan secara singkat kendala yg dihadapi dalam menjangkau fasilitas publik di daerah saudara.

On the right side of the Zoom window, there is a vertical grid of video thumbnails for participants. Some thumbnails are active, showing people's faces, while others are greyed out. A red 'D' icon is visible in one of the thumbnails.



This screenshot shows a Zoom meeting window with a different view of the same Microsoft Word document. The document content is:

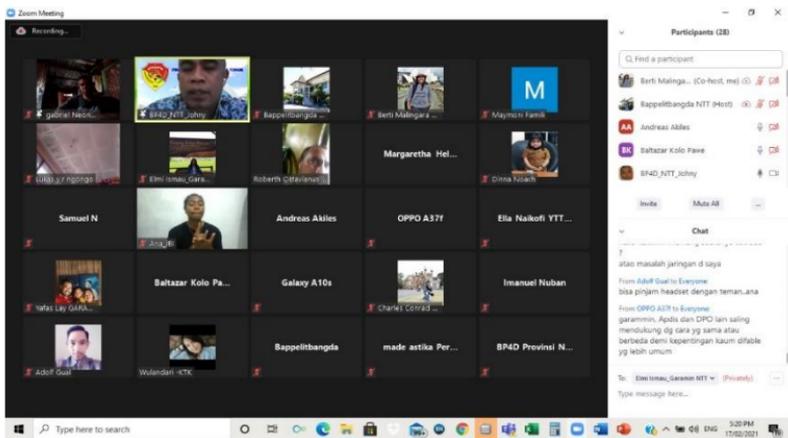
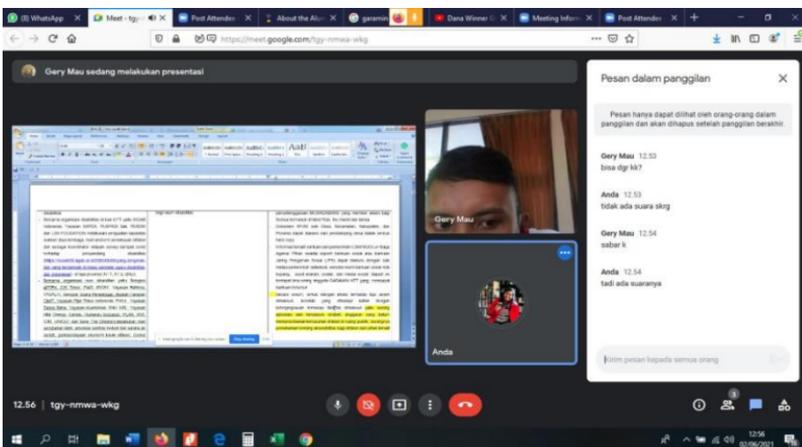
4. Apakah fasilitas publik yang ramah disabilitas sudah tersedia di kota/ Kabupaten saudara?

- Jika Ya, Sebutkan dimana?
- Jika Tidak Jelaskan secara singkat kendala yg dihadapi dalam menjangkau fasilitas publik di daerah saudara.

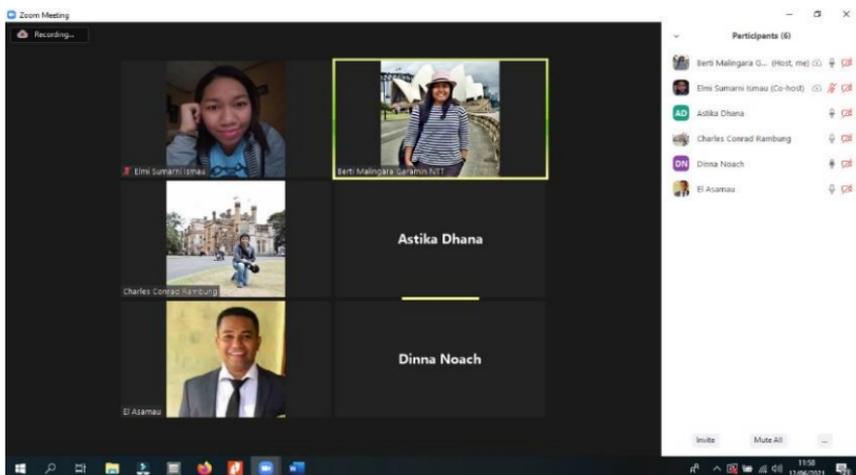
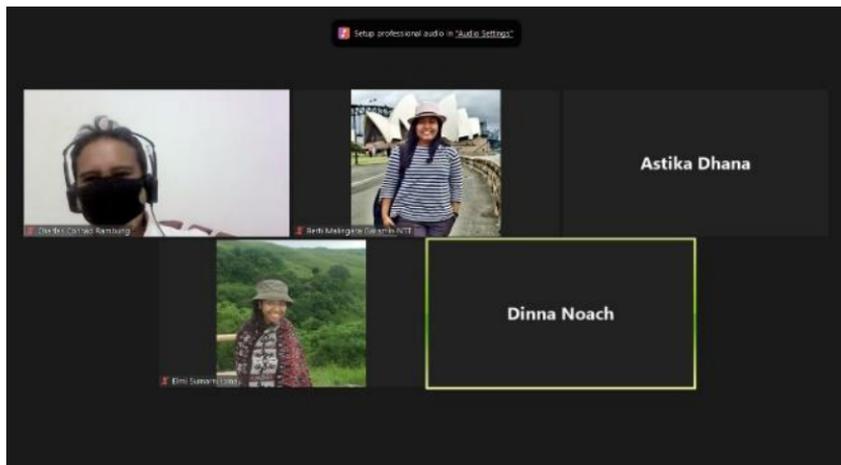
5. Apakah pernah dilibatkan pada proses pra musyawarah untuk pengambilan kebijakan publik seperti musrenbang desa/kelurahan/dcamatan/ kabupaten/kota/provinsi?

- Jika ya, di level mana? desa/kelurahan/dcamatan/ kabupaten/kota/ provinsi
- Terlibat sebagai Apa? (Individual atau Organisasi)
- Apakah Lokasi akses musrenbang atau tidak?
- Apakah proses musrenbang bisa diakses oleh teman-teman Difabel netra dan Tuli
- Apakah informasi dokumen musrenbang akses bagi difabel (Dik akses, apakah ada juty bahasa isyarat, dokumen dalam bentuk soft Copy, Belum akses. alasannya apa?)

On the right side, there is a grid of video thumbnails for participants. The thumbnails are arranged in a 3x3 grid. The thumbnails show various participants, some with their names visible below them, such as Samuel N., Bertu Mangera, Balhazar Kolo Pa..., Norma Ngowi, Adel, SRI LENDES BAP..., Sabinus ketus P..., Galaxy A10s, made astika Per..., and Sicha Solokana. A red 'S' icon is visible in one of the thumbnails.



Wawancara Appreciative Inquiry menggali Inovasi Organisasi Penyandang Disabilitas, 12 Juni 2021



LAMPIRAN III

DAFTAR REGULASI RUJUKAN

- Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Peraturan presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang komisi nasional disabilitas.
- Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
- Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang disabilitas
- Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman pelayanan publik dari bencana bagi penyandang disabilitas.
- Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang ketenaga kerjaan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 68 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Kupang No 5 tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN IV

DAFTAR WEBSITE RUJUKAN

<https://www.diantimur.com/2020/04/13/bps-ntt-belum-kantongi-data-disabilitas-garamin-belum-ramah-difabel/> diunduh pada 16 Juni 2021

<https://timexkupang.com/2020/04/17/ini-9-rekomendasi-diskusi-dimanakah-penyandang-disabilitas-berada-saat-covid-19-melanda-ntt/> diunduh pada 16 Juni 2021

<https://www.solider.id/baca/6173-rekomendasi-garamin-normal-baru-ntt> diunduh pada 16 Juni 2021

<https://nusafloramora.com/2020/07/25/garamin-ntt-ajak-semua-elemen-perhatikan-penyandang-disabilitas-di-era-new-norm/>

<https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2020/04/13/renungan-paskah-sebuah-tulisan-untuk-perempuan-flobamora-tercinta-di-tengah-covid19/> diunduh pada 16 Juni 2021

<https://www.solider.id/baca/6041-difabel-media-berperan-eliminir-dampak-covid-19> diunduh pada 16 Juni 2021

<https://www.timesjatim.com/berita/131229/kipda-timor-tengah-selatan-berbagi-kasih-bersama-26-orang-penyandang-disabilitas> diunduh pada 16 Juni 2021

<https://kupang.tribunnews.com/2020/05/17/20-penyandang-distabilitas-di-desa-mnela-lete-dapat-paket-sembako-dan-masker-dari-yudit-selan-info>
diunduh pada 16 Juni 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200609224115-20-511597/86-persen-difabel-turun-pendapatan-kala-corona-bansos-minim> diunduh pada 16 Juni 2021

<https://difabel.tempo.co/read/1351634/survei-81-persen-difabel-mengalami-dampak-negatif-covid-19>
diunduh pada 16 Juni 2021

<https://difabel.tempo.co/read/1352687/sebab-penyandang-disabilitas-belum-dapat-bantuan-sosial-covid-19> diunduh pada 16 Juni 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=T7KKK-S8VfA>
diunduh pada 16 Juni 2021

<https://www.solider.id/baca/6720-38-difabel-kupang-ikuti-vaksinasi-gelombang-dua>

<https://www.solider.id/baca/6607-pengukuhan-keanggotaan-formasi-disabilitas>

<https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2020/07/22/dampak-ekonomi-keluarga-difabel-covid-19-cerita-dari-ntt/>

<https://ekspedisidifabel.wordpress.com/tag/garamin-ntt/>

<https://timexkupang.com/2021/03/13/stafsus-gubernur-dan-garamin-ntt-organisir-difabel-akses-layanan-pool-test/>

<https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-penyandang-disabilitas-bantu-pemulihan-dampak-bencana-alam-di-ntt/5861325.html>

<https://victorynews.id/beranda/garamin-ntt-kembali-gelar-vaksinasi-untuk-disabilitas/>

<https://nttprogresif.com/2021/02/21/melangkah-bersama-untuk-gerakan-inklusi-dan-transformasi-disabilitas/>

<https://nttprogresif.com/2021/02/09/pengarusutamaan-inklusi-disabilitas-di-desa-oelomin-dalam-proses-pembangunan-desa-yang-inklusif-2-3/>

<https://nttprogresif.com/2021/02/04/layanan-digital-bank-ntt-untuk-penyandang-disabilitas/>

<https://nttprogresif.com/2020/09/28/mimpi-ntt-inklusi-disabilitas-berti-soli-dima-malingara/>

<https://timorline.com/2020/06/15/persani-ntt-serukan-persatuan-kaum-penyandang-disabilitas/>

<https://www.suara-ntt.com/2021/09/14/jumlah-penyandang-disabilitas-di-ntt-sebanyak-8-081-orang/>

<https://www.australiaawardsindonesia.org/article/detail/803/15/berti-soli-dima-malingara-fights-for-inclusion-of-people-with-disabilities-in-covid-19-responses>

<https://intdev.tetrattechasiapacific.com/berti-soli-dima-malingara-fights-for-inclusion-of-people-with-disabilities-in-covid-19-responses/>

<https://tirto.id/gagalnya-negara-memenuhi-hak-disabilitas-yang-terjangkit-covid-19-gist>

www.ekspedisidifabel.wordpress.com

www.sigab.or.id

www.solider.or.id

<https://formasidisabilitas.id/>

www.garamin.org

<https://pusdatin.kemkes.go.id/>

Terbitnya buku profil organisasi penyandang disabilitas di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini memiliki makna strategis karena akan memberikan beberapa kontribusi dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas. Yang pertama buku ini menunjukkan bahwa kawan-kawan difabel di NTT sudah memiliki kesadaran tentang hak-haknya dan mampu mengorganisir gerakan bersama untuk mendorong dan mewujudkan NTT inklusi disabilitas. Yang kedua adalah adanya dukungan dari jajaran pemerintah provinsi NTT dalam menyusun buku ini. Yang ketiga adalah buku ini Profil Organisasi Penyandang Disabilitas NTT I xii menggambarkan visi inklusi yang kuat diantara organisasi difabel di NTT dan mengobarkan semangat untuk berkolaborasi. Yang keempat buku ini bisa menjadi rujukan bagi berbagai pihak untuk mendapatkan informasi dan data penyandang disabilitas yang tergabung dalam berbagai organisasi difabel di NTT.

Sunarman Sukanto

Tenaga Ahli Madya Kedeputan V Kantor Staf Presiden Bidang Kajian dan
Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan,
dan HAM Strategis

Tersusunnya buku profil organisasi disabilitas di NTT merupakan Bukti bahwa organ pergerakan difabel telah memulai membangun ruang inklusif ini. Mereka, dengan berbagai keterbatasan, tapi energi dan komitmen yang besar, telah menghadirkan banyak karya untuk Kelompok mereka, untuk masyarakat, bahkan untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Muhammad Joni Yulianto

Dewan Pengurus SIGAB Indonesia, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau
untuk Indonesia Inklusi Disabilitas (FORMASI Disabilitas)

Tim penyusun buku yang inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa inklusi itu lahir dalam keseharian kita dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas profil ini memberikan pengalaman berharga bagi penyandang disabilitas dalam bermitra dengan pemerintah dan menghasilkan sebuah dokumen yang akan bermanfaat bagi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia

Dinna Novista Noach

Staf Khusus Gubernur NTT bidang Disabilitas

Buku ini lahir dari kreativitas dan semangat inklusi yang dibangun dalam tim penyusun yang solid yang majemuk yang terus berupaya untuk bisa memberikan kontribusi saat pandemi Covid-19. Buku ini merupakan symbol gerakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas untuk terus mewujudkan Nusa Tenggara Timur Inklusi menuju Indonesia yang inklusi.

Kosmas D. Lana, SH, Msi

Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur

